



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR II TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan dokumen perencanaan pembangunan berupa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KABAG HUKUM	KASUBBAG

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>u.</i>

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6.	W

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
PASAL 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2020-2024.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
PASAL 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX. PENUTUP

PASAL 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6-	14

BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PASAL 5

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas, meliputi:
- a. persentase luas kawasan kumuh;
 - b. cakupan aksesibilitas antar wilayah;
 - c. persentase rumah tangga bersanitasi;
 - d. persentase rumah tangga yang terakses air bersih;
 - e. rasio elektrifikasi;
 - f. indeks pembangunan manusia;
 - g. indeks pembangunan gender;
 - h. rata-rata lama sekolah;
 - i. harapan lama sekolah;
 - j. angka harapan hidup;
 - k. indeks pemberdayaan gender;
 - l. tingkat kemiskinan;
 - m. pengeluaran perkapita;
 - n. indeks GINI;
 - o. tingkat pengangguran terbuka;
 - p. tingkat pertumbuhan nilai investasi;
 - q. laju pertumbuhan ekonomi;
 - r. produk domestik regional bruto sektor pertanian (Milyar Rp);
 - s. produk domestik regional bruto sektor pariwisata (Milyar Rp);
 - t. indeks reformasi birokrasi;
 - u. predikat akuntabilitas kinerja;
 - v. indeks persepsi korupsi;
 - w. indeks kepuasan masyarakat;
 - x. jumlah penghargaan kebudayaan;
 - y. jumlah agenda atau kegiatan (*event*) penyelenggaraan budaya Daerah;
 - z. indeks kualitas lingkungan hidup;
 - aa. status pencemaran air sungai (indeks kualitas air);
 - bb. status pencemaran udara (indeks kualitas udara); dan
 - cc. tutupan lahan (indeks kualitas tutupan lahan).
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024.

PASAL 6

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PASAL 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

Penetapan RPJMD ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD dengan Perda.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD PASAL 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

PASAL 10

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Perda.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b.</i>	<i>lu</i>

BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
PASAL 11

- (1) Penyusunan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (2) RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan Daerah sebagai pedoman RKPD tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, meliputi:
 - a. pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - c. optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan;
 - d. optimalisasi pengentasan kemiskinan;
 - e. peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat;
 - f. peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - g. pengembangan agribisnis;
 - h. peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata;
 - i. percepatan reformasi birokrasi;
 - j. pelestarian kebudayaan Daerah; dan
 - k. peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan dan isu strategis Daerah serta kemampuan riil keuangan Daerah.
- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 12

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
 - a. RPJMD teknokratik untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat serta permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah; dan
 - b. RKPD tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan/atau RPJMD Teknokratik.
- (2) Tata cara penyusunan RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJMD teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah bersama Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh partai politik.
- (4) RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 274

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10, 107/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHDI, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Perencanaan pembangunan Daerah tersebut dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan Daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, bahan penyusunan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, serta pedoman dalam menyusun RKPD. RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi pelaku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi Pemerintahan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 bab dan 13 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup RPJMD, sistematika RPJMD, Indikator Kinerja Utama, pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, kaidah pelaksanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 274.a

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah	II-2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.3 Demografi	II-13
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-15
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-20
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.3.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-26
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-32
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-40
2.3.4 Urusan Penunjang	II-42
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-44
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-44
2.4.2 Fokus Investasi	II-46
2.4.3 Fokus Infrastruktur	II-46
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-46
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1 Analisis Pembiayaan	III-10
3.3 Kerangka Pendanaan	III-12
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Isu-Isu Strategis	IV-29
4.2.1 Isu Internasional	IV-30
4.2.2 Isu Atau Kebijakan Nasional	IV-36
4.2.3 Isu Atau Kebijakan Daerah	IV-47
4.2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas	IV-54
4.2.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Gunung Mas	IV-77
4.2.6 Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas	IV-88

BAB V	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi	V-1
	5.2. Misi	V-3
	5.3. Tujuan dan Sasaran	V-7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi	VI-1
	6.2. Arah Kebijakan	VI-9
	6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	VI-10
	6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	VI-43
	6.3.1 Pengembangan Potensi Prioritas di Kabupaten Gunung Mas	VI-43
	6.3.2 Prioritas Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Gunung Mas	VI-47
	6.3.3 Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunung Mas	VI-48
	6.4. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	VI-49
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
	8.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	VI-1
	8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-32
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1. Pedoman Transisi	IX-1
	9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018	Hal II-2
Tabel	2.2	Statistik Klimatologi Kabupaten Gunung Mas, tahun 2018	II-8
Tabel	2.3	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunung Mas	II-8
Tabel	2.4	Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan	II-10
Tabel	2.5	Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018	II-13
Tabel	2.6	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas (Persen) Tahun 2014-2018	II-17
Tabel	2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2014-2018	II-18
Tabel	2.8	Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya Kabupaten Gunung Mas, 2014-2018	II-22
Tabel	2.9	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013-2018	II-27
Tabel	2.10	Indikator Kinerja Urusan Pemukiman Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013-2018	II-29
Tabel	2.11	Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Gunung Mas 2013-2018	II-30
Tabel	2.12	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013-2018	II-35
Tabel	2.13	Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2017	II-39
Tabel	2.14	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017	II-40
Tabel	2.15	Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018	II-41
Tabel	2.16	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2013-2018	II-42
Tabel	2.17	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-43
Tabel	2.18	Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018	II-48
Tabel	2.19	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2013 – 2018	II-72
Tabel	2.20	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2013 – 2018	II-77
Tabel	2.21	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial	II-79

Tabel	2.22	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-80
Tabel	2.23	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2013 - 2018	II-81
Tabel	2.24	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	II-82
Tabel	2.25	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	II-82
Tabel	3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2018 (Jutaan Rupiah)	III-2
Tabel	3.2	Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah) Kabupaten Gunung Mas 2016-2018 (dalam jutaan)	III-3
Tabel	3.3	Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam jutaan)	III-6
Tabel	3.4	Realisasi Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2018	III-9
Tabel	3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2018 (dalam jutaan)	III-11
Tabel	3.6	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	III-13
Tabel	3.7	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	III-14
Tabel	3.8	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	III-15
Tabel	3.9	Alokasi Anggaran Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	III-16
Tabel	4.1	Rumusan masalah dan Akar Masalah dari Permasalahan Pokok “Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah”	IV-5
Tabel	4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas (Persen) Tahun 2014-2017	IV-8
Tabel	4.3	Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2017	IV-11
Tabel	4.4	Jumlah Perusahaan Dagang di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2016	IV-12

Tabel	4.5	Rumusan Permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok “Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan Daerah”	IV-12
Tabel	4.6	Indeks Pembangunan Manusia beserta Komponen Penyusunnya Kabupaten Gunung Mas, 2013-2017	IV-17
Tabel	4.7	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis kelamin dan status pekerjaan utama di Kabupaten Gunung Mas (%)	IV-18
Tabel	4.8	Rumusan Permasalahan “Masih rendahnya kualitas daya saing SDM dan kesejahteraan masyarakat”	IV-21
Tabel	4.9	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik”	IV-26
Tabel	4.10	Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup”	IV-28
Tabel	4.11	Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2019-2024	IV-45
Tabel	4.12	Visi dan Misi RPJMD Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya	IV-48
Tabel	4.13	Sandingan/Keselarasan Program RTRW dan Program RPJMD	IV-59
Tabel	5.1	Rumusan tujuan dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	V-8
Tabel	5.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	V-14
Tabel	5.3	Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	V-20
Tabel	6.1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024	VI-2
Tabel	6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	VI-14
Tabel	6.3	Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas	VI-27
Tabel	6.4	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	VI-44
Tabel	6.5	Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet Kabupaten Gunung Mas	VI-46
Tabel	7.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	VII-1
Tabel	8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	VIII-1
Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	VIII-4

Tabel	8.3	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	VIII-33
Tabel	8.4	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	VIII-45
Tabel	8.5	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial	VIII-48
Tabel	8.6	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VIII-49
Tabel	8.7	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana	VIII-50
Tabel	8.8	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	VIII-51
Tabel	8.9	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah	VIII-51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	Hal I-8
Gambar	2.1	Peta Kabupaten Gunung Mas	II-3
Gambar	2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018	II-14
Gambar	2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018	II-15
Gambar	2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas, 2014-2018 (juta Rupiah)	II-16
Gambar	2.5	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2014-2017 (Juta Rupiah)	II-20
Gambar	2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-21
Gambar	2.7	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-23
Gambar	2.8	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-24
Gambar	2.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-25
Gambar	2.10	Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Cabang Gunung Mas Tahun 2018	II-28
Gambar	2.11	Persentase Air Yang Disalurkan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018	II-29
Gambar	2.12	Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-31
Gambar	2.13	Pengeluaran Konsumsi Perkapita Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018	II-32
Gambar	2.14	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017	II-33
Gambar	2.15	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018	II-34
Gambar	2.16	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Gunung Mas	II-36
Gambar	2.17	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Gunung Mas	II-38
Gambar	2.18	Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2018	II-45
Gambar	2.19	Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2018	II-45
Gambar	2.20	Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018	II-47
Gambar	4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas	IV-3
Gambar	4.2	Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2017	IV-4

Gambar	4.3	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Gunung Mas (km) tahun 2017	IV-5
Gambar	4.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017	IV-10
Gambar	4.5	Pengeluaran Konsumsi Perkapita di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017	IV-10
Gambar	4.6	Jumlah Koperasi Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017	IV-11
Gambar	4.7	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017	IV-15
Gambar	4.8	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2017 (Ribu)	IV-19
Gambar	4.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017	IV-20
Gambar	4.10	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut lapangan Pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas, tahun 2017	IV-21
Gambar	4.11	Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan	IV-46
Gambar	5.1	Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi	V-3
Gambar	5.2	Keterkaitan antara Visi dan Misi	V-5
Gambar	5.3	Keterkaitan antara Visi, Misi, Smart Agro, Smart Human Resources, Smart Tourism	V-7
Gambar	6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahunan Tahun 2020-2024	VI-10
Gambar	6.2	Pengembangan Potensi (Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas)	VI-45
Gambar	6.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Gunung Mas	VI-47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari Pusat hingga Daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Pembangunan Kabupaten Gunung Mas telah memasuki arah pembangunan jangka menengah ke-III (2015-2019) dengan tujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Gunung Mas telah menyelaraskan



tujuan pembangunan Daerah dengan pembangunan jangka menengah nasional dan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah (2016-2021).

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi, dengan mengedepankan pada kekhasan dan sasaran pembangunan Daerah sesuai permasalahan dan isu strategis Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu pada tahapan ke-tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya saing Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Mendalami hal tersebut, pada RPJM ke-tiga ini Kabupaten Gunung Mas akan memprioritaskan perhatian pembangunan pada upaya mempertahankan pembangunan berkelanjutan demi terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

Prioritas terhadap pembangunan perekonomian Daerah yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian dalam rangka mewujudkan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan maka Kabupaten Gunung Mas pada RPJPD ke-tiga ini akan berkonsentrasi pada produktivitas kegiatan perekonomian, ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh perkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien, terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta pengembangan infrastruktur perdesaan yang akan terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dalam rangka mensejahterakan masyarakat Gunung Mas.

Dengan dilantiknya Bupati (**Jaya Samaya Monong, SE., M.Si**) dan Wakil Bupati (**Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si**), Visi pembangunan “Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)”. Visi pembangunan Bupati terpilih akan dijabarkan ke dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas



Tahun 2019-2024. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4. Pelaksanaan musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan Daerah sebagai bahan

h



penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

6. Penetapan Perda tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Perda tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah tahap IIIIRPJPD 2009-2028 yang akan dimulai tahun 2019.

Adapun tujuan kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan Daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
5. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2019-2024;
6. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati;
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas; dan
8. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

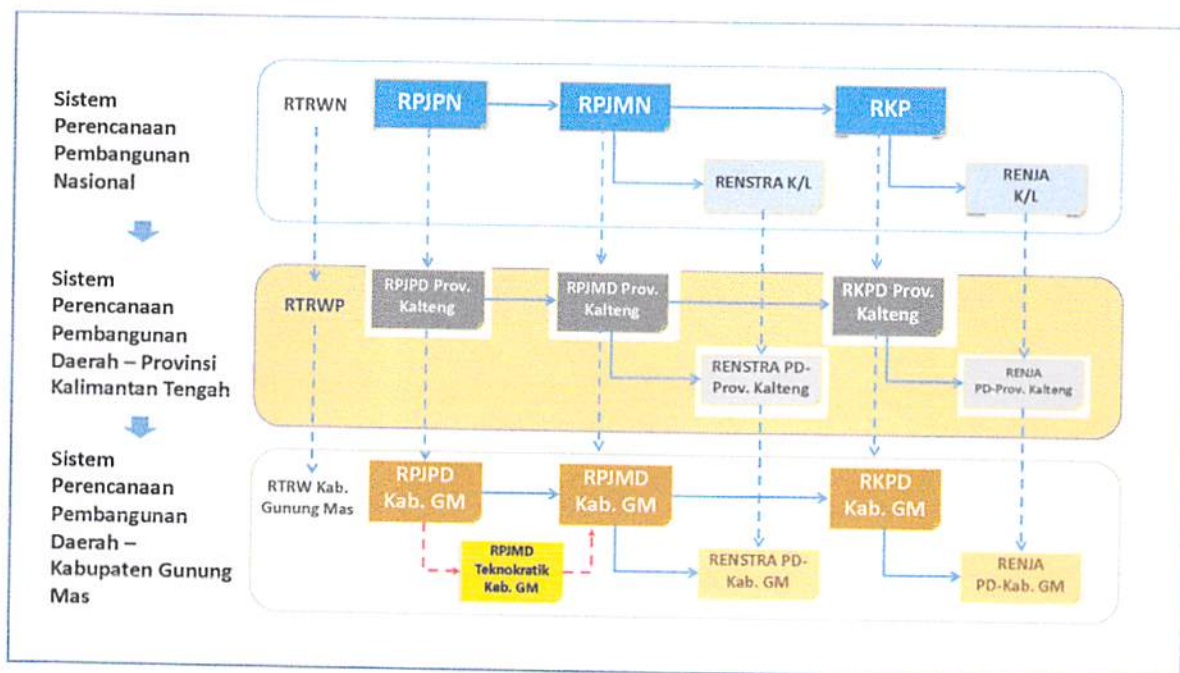




1.4. Hubungan Antar Dokumen

Pada dasarnya, RPJMD ini merupakan rancangan kebijakan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2019 untuk periode 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang Daerah (RPJPD), RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Pengintegrasian setiap dokumen perencanaan harus memiliki garis lurus berupa pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi dasar perumusan dokumen perencanaan struktur di bawahnya seperti RKPD maupun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran Daerah. Hal tersebut untuk mengefisiensikan kemampuan pendanaan Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.



Gambar 1. 1

Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Berdasarkan gambar 1.1, RPJMD ini merupakan bahan baku utama penyusunan RPJMD mengingat sebagian bab dari RPJMD dapat disusun mendahului pelantikan Bupati terpilih, namun tetap harus diperbaharui dengan data kinerja dan informasi relevan lain terbaru.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika utama penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Gunung Mas secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing Daerah.

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan Daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Daerah.

BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

g



BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan Daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi sertaseluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

A. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Gunung Mas

Gambaran umum kondisi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan hasil kinerja pembangunan di Kabupaten Gunung Mas oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Gunung Mas yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

ph.



2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

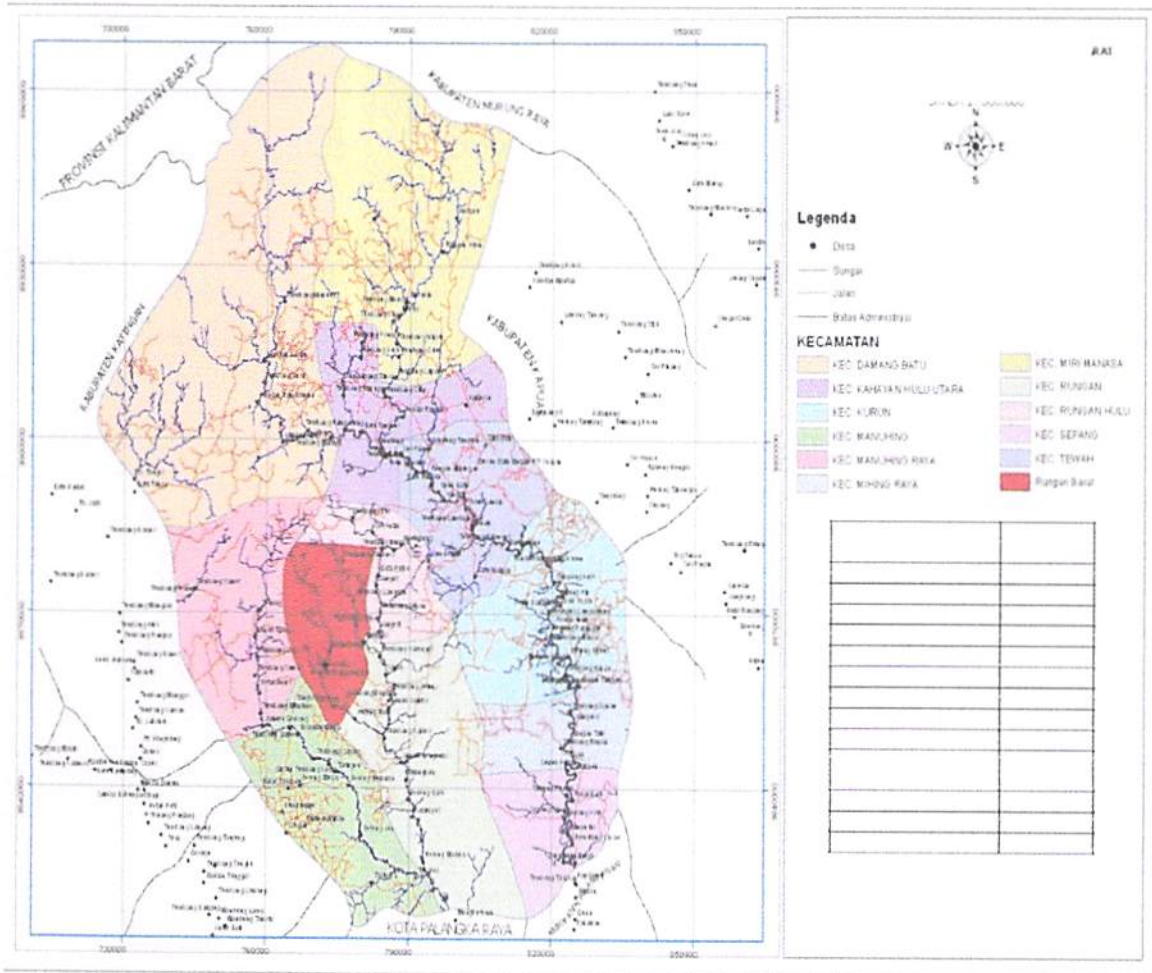
Ibukota Kabupaten Gunung Mas adalah Kuala Kurun dengan luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² atau 1.080.400 Ha. Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ±10.804 km², terbagi dalam 12 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 115 Desa.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
Manuhing	Tumbag Talaken	1.113	1	11
Manuhing Raya	Tehang	601	1	5
Rungan	Jakatan raya	710	1	13
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	738	1	8
Rungan Barat	Rabambang	391	1	10
Sepang	Sepang simin	397	1	6
Mihing Raya	Kampuri	343	1	5
Kurun	Kuala Kurun	876	2	13
Tewah	Tewah	1.079	1	15
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	1.589	1	11
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1.425	1	7
Miri Minasa	Tumbang Napoi	1.542	1	10
Gunung Mas		10.804	13	114

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Dari 11 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas, wilayah kecamatan yang terluas di Kabupaten Gunung Mas adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara yaitu 1.589 Km² atau 14,71 persen sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Mihing Raya yaitu 343 Km² atau 3,17 persen.



Sumber: RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2005-2015

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gunung Mas

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
3. Sebelah selatan dengan kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat.



b. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada koordinat 0° - 2° lintang selatan dan 113° - 114° bujur timur. Kabupaten Gunung Mas memiliki luas wilayah 10.804 Km² yang sebagian besar merupakan dataran tinggi yang sangat potensial untuk daerah perkebunan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara (1.589 Km²), sebaliknya Kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Mihing Raya (343 Km²).

Menurut keadaan wilayahnya Kabupaten Gunung Mas memiliki ketinggian wilayah terhadap permukaan laut yang bervariasi dimana wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari dataran rendah hingga daerah pegunungan. Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah dengan topografi paling rendah berkisar 50-100 meter di atas permukaan laut.

c. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Gunung Mas dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 8° - 15° . Di bagian selatan terdiri atas daratan rendah dan rawa. Adapun jenis tanahnya adalah podsolik merah kuning, alluvial, hydromorfik kelabu, alluvial hydromorfik, gley humus, dan kompleks regosol podsolik. Tanah podsolik merah kuning sangat dominan dan penyebarannya terletak di bagian utara dengan ketebalan ± 110 cm. Sedangkan jenis tanah alluvial hydromorfik kelabu berada di pinggir sungai Kahayan, Miri (anak sungai Kahayan), Rungan dan Manuhing (anak sungai Rungan).

4



d. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Gunung Mas dilintasi oleh beberapa sungai yaitu sungai Kahayan, Rungan, Manuhing, Miri serta anak-anak sungai lainnya yang berfungsi sebagai penunjang alternatif transportasi darat untuk angkutan barang maupun penumpang. Pentingnya peranan sungai ini disebabkan oleh terbatasnya atau terganggunya prasarana perhubungan darat, disamping itu sebagian besar pemukiman penduduk masih berada di daerah pinggir sungai.

Ada empat jalur sungai yang berada atau masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 1. Sungai Manuhing dengan panjang | ± | 28,75 Km |
| 2. Sungai Rungan dengan panjang | ± | 86,25 Km |
| 3. Sungai Kahayan dengan panjang | ± | 600,00 Km |
| 4. Sungai Miri dengan panjang | ± | 20,00 Km |

Secara umum pola sungai di Kabupaten Gunung Mas adalah pola dendritik, dimana salah satu sifat utamanya apabila terjadi hujan merata di seluruh Daerah Aliran Sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Muller Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Dari Sungai Kahayan ada 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Kahayan, Sungai Miri, Sungai Rungan dan Sungai Manuhing dan beberapa anak sungai seperti Sungai Hamputung, Sungai Habaon, Sungai Pasangon, Sungai Hamporoi, Sungai Pajangei, Sungai Manyangan, Sungai Kurun, Sungai Konjoi, Sungai Rawi, dan Sungai Simin. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (MCK), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman berkisar antara 1 sampai 7 meter.



e. Kondisi Geologi

Geologi Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peta Geologi Lembar Tumbang Hiran (U.Margono, Tsujitno, T. Santosa, 1995), Lembar Tewah (A.S.Sumartadipura & U. Margono, 1996), Lembar Muara Teweh (S.Supriatna, A. Sudradjat, H.Z, Abidin, 1993) dan Lembar Buntok (Sutrisno, S.Supriatna, E.Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan, 1994), bahwa geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari beberapa litologi yang terbentuk dengan urutan stratigrafi adalah :

- 1 Batuan Malihan;
- 2 Tonalit Sepauk;
- 3 Formasi Tanjung;
- 4 Formasi Haloq;
- 5 Formasi Mentomoi;
- 6 Formasi Montalat;
- 7 Batuan Gunung Api Malasan;
- 8 Batuan Terobosan Sintang;
- 9 Formasi Warukin;
- 10 Formasi Dahor; dan
- 11 Aluvium.

Umur batuan tertua diperkirakan berumur Trias. Struktur geologi Kabupaten Gunung Mas terdapat berupa lipatan, sesar dan kekar yang erat kaitannya dengan pembentukan logam dasar emas (Au), perak (Ag), besi (Fe), Seng (Zn) dan tembaga (Cu) yang umumnya terdapat pada daerah ini. Keadaan topografi Kabupaten Gunung Mas terbagi atas 2 bagian, yaitu pada bagian utara merupakan daerah perbukitan bergelombang kuat dengan ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng 8°-15°, perbukitan ini merupakan bagian dari rangkaian pengunungan Schwaner yang memanjang dengan arah timur laut-barat daya. Di bagian selatan dari daerah



Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah dataran rendah sampai dengan rawa-rawa.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

f. Klimatologi

Sepanjang tahun 2018, rata-rata suhu udara di Kabupaten Gunung Mas berkisar antara 26,90 °c sampai dengan 28,20 °c. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei 2018 sebesar 28,20 °c dan terendah pada Desember 2018 sebesar 26,90 °c. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 485,6 mm.



Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Kabupaten Gunung Mas, tahun 2018

Bulan	Rata-rata Suhu Udara	Rata-rata Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari	Curah Hujan
Januari	27,1	82,8	1.011,2	4,8	44,4	485,6
Februari	27,2	82,7	1013,2	4,5	48,6	262,2
Maret	27,2	83,0	1012,5	4,3	61,5	342,5
April	27,8	82,2	1.012,4	4,2	68,2	421,9
Mei	28,2	81,5	1.012,3	3,9	69,4	134,7
Juni	27,7	80,1	1.013,4	4,2	68,5	118,6
Juli	27,3	80,3	1.012,8	4,7	71,0	148,3
Agustus	27,4	77,4	1.013,6	5,0	77,9	73,1
September	27,5	76,8	1.013,7	4,5	67,1	28,8
Oktober	27,8	77,4	1.013,8	4,0	64,3	155,8
November	27,4	80,6	1.013,4	4,0	64,2	265,2
Desember	26,9	82,6	1.012,8	4,6	57,5	360,3

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

g. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Gunung Mas sebagian besar cocok untuk mengembangkan potensi perkebunan. Rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan RTRW Kabupaten Gunung Mas 2005 – 2015 yaitu:

Tabel 2.3
Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Alam	110.284,221	10,21
2.	Hutan Lahan Kering	552.849,251	51,17
3.	Kebun Campuran	4.804,871	0,44

4



4.	Perkebunan	9.946,905	0,92
5.	Permukiman	7.401,432	0,69
6.	Rawa	30.917,268	2,86
7.	Semak Belukar	350.216,157	32,42
8.	Tanah Terbuka	6.459,808	0,60
9.	Tegalan/Ladang	3.476,555	0,32
10.	Tubuh Air	4.044,383	0,37
Jumlah		1.080.400,85	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2005-2015

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034 tanggal 12 Agustus 2014, wilayah Kabupaten Gunung Mas terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. SWP 1 dengan pusat pengembangan di Kota Kuala Kurun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Tewah dan Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, disamping sebagai pusat pelayanan Kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan





skala Kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.

2. SWP 2 dengan pusat pengembangan di Kota Jakatan Raya. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Manuhing, Manuhing Hulu. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah Kabupaten bagian barat, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
3. SWP 3 dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Miri. Wilayah yang termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Wilayah ini relatif memiliki sumber daya alam yang sebagian diarahkan untuk menjadi fungsi lindung.

Adapun rincian pengembangan wilayah dan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan indikasi programnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik	□□Pendidikan	□□Pengembangan Jalan arteri primer
		Perekonomian jasa Kabupaten dan Regional	□□Kesehatan	□□Pengembangan prasarana lingkungan
		Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan jasa	□□Peribadahan	□□Pengembangan fasilitas perdagangan & jasa
		Pusat Jasa Pendukung Kegiatan Perekonomian (Pengolahan & Pemasaran)	□□Perdagangan/ Pemasaran	□□Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan
		Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tengah Kalimantan Tengah	□□Permukiman	□□Pengembangan kawasan pariwisata



Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
			☐ ☐ Pariwisata	☐ ☐ Optimalisasi Bandar Udara Kuala Kurun
			☐ ☐ Pertambangan	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Tewah	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota Hierarki I (PKW)	☐ ☐ Pelayanan Sosial	☐ ☐ Pengembangan jalan kolektor primer
		Pusat permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan	☐ ☐ Perumahan	☐ ☐ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah Pengembangan	☐ ☐ Pertanian	☐ ☐ Pengembangan fasilitas lingkungan
		Pusat pengumpul hasil bumi	☐ ☐ Perkebunan dan Kehutanan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	☐ ☐ Pertambangan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan
		Distributor barang dan jasa skala regional	☐ ☐ Industri	☐ ☐ Pengembangan industri
		Pusat permukiman		
	Tumbang Miri	permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan	☐ ☐ Pelayanan Sosial	☐ ☐ Pengembangan jalan kolektor primer
		Pusat pengumpul hasil bumi	☐ ☐ Perumahan	☐ ☐ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	☐ ☐ Pertanian	☐ ☐ Pengembangan fasilitas lingkungan
		Distributor barang dan jasa skala regional	☐ ☐ Perkebunan dan Kehutanan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			☐ ☐ Industri	☐ ☐ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan
			☐ ☐ Pertambangan	☐ ☐ Optimalisasi pelabuhan sungai
				☐ ☐ Pengembangan industri
	Sepang Simin	Pusat permukiman	☐ ☐ Pelayanan Sosial	☐ ☐ Pengembangan jalan kolektor primer
		permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan	☐ ☐ Perumahan	☐ ☐ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Pusat pengumpul hasil bumi	☐ ☐ Pertanian	☐ ☐ Pengembangan fasilitas lingkungan



Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	☐ ☐ Perkebunan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Distributor barang dan jasa skala regional	Kehutanan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan
			☐ ☐ Pertambangan	☐ ☐ Pengembangan industri
	Jakatan Raya	Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hierarki I (PKW)	☐ ☐ Pelayanan Sosial	☐ ☐ Pengembangan jalan arteri Primer
		Pusat permukiman perdesaan di seluruhKecamatan	☐ ☐ Perumahan	☐ ☐ Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	☐ ☐ Pertanian	☐ ☐ Pengembangan fasilitas lingkungan
		Pusat pengumpul hasil bumi	☐ ☐ Perkebunan dan Kehutanan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	☐ ☐ Industri	☐ ☐ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan
		Distributor barang dan jasa skala regional	☐ ☐ Pertambangan	☐ ☐ Pengembangan industri
				☐ ☐ Optimalisasi pelabuhan sungai
	Tumbang Talaken	Pusat permukiman perdesaan di seluruhKecamatan	☐ ☐ Pelayanan Sosial	☐ ☐ Pengembangan jalan arteri primer
		Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	☐ ☐ Perumahan	☐ ☐ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		Pusat pengumpul hasil bumi	☐ ☐ Pertanian	☐ ☐ Pengembangan fasilitas lingkungan
		Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	☐ ☐ Perkebunan dan Kehutanan	☐ ☐ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		Distributor barang dan jasa skala regional	☐ ☐ Industri	☐ ☐ Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan
				☐ ☐ Pengembangan industri
				☐ ☐ Optimalisasi pelabuhan sungai

Sumber: Laporan Akhir RTRWK Gunung Mas, 2014



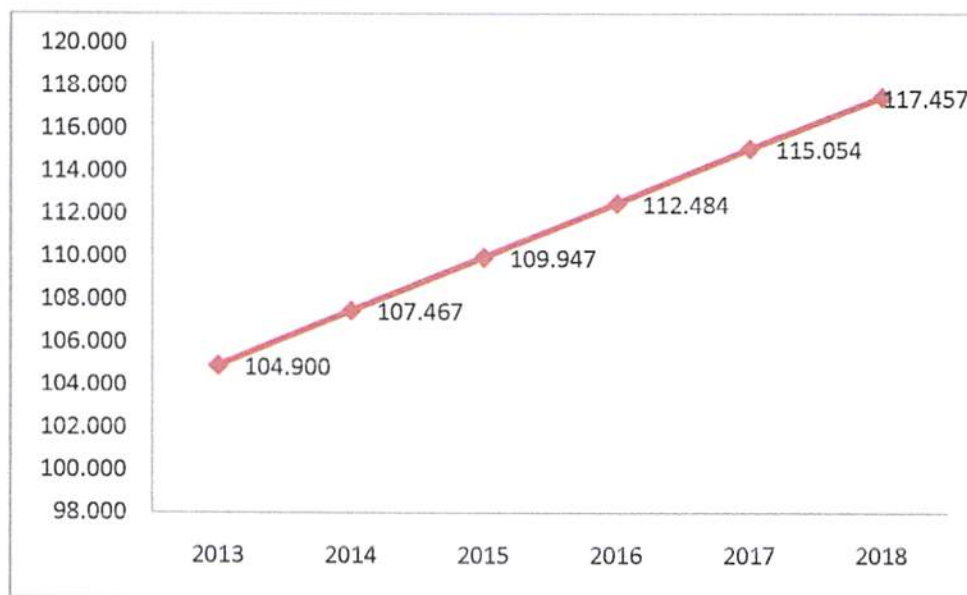
2.1.3. Demografi

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi perkembangan sosial yang berdampak pada pembangunan baik dari segi perencanaan maupun evaluasi. Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Gunung Mas mencapai 115.054 jiwa naik sejumlah 2.570 jiwa dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Kurun sebanyak 29.467 jiwa atau sebesar 25,61 persen dari total penduduk Kabupaten Gunung Mas. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gunung Mas tahun 2017 mencapai 11 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 12 (dua belas) kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kurun dengan kepadatan sebesar 35 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Damang Batu dan Miri Manasa sebesar 3 jiwa/km². Sementara itu jumlah rumah tangga pada tahun 2017 mencapai 27.234. Jumlah penduduk di kecamatan lainnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Manuhing	8.005	6,82%	7
2	Manuhing Raya	5.937	5,05%	10
3	Rungan	10.156	8,65%	14
4	Rungan Hulu	6.219	5,29%	8
5	Rungan Barat	5.936	5,05%	15
6	Sepang	7.085	6,03%	18
7	Mihing Raya	5.869	5,00%	17
8	Kurun	30.647	26,09%	35
9	Tewah	20.736	17,65%	19
10	Kahayan Hulu Utara	8.569	7,30%	5
11	Damang Batu	4.147	3,53%	3
12	Miri Minasa	4.151	3,3%	3

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019



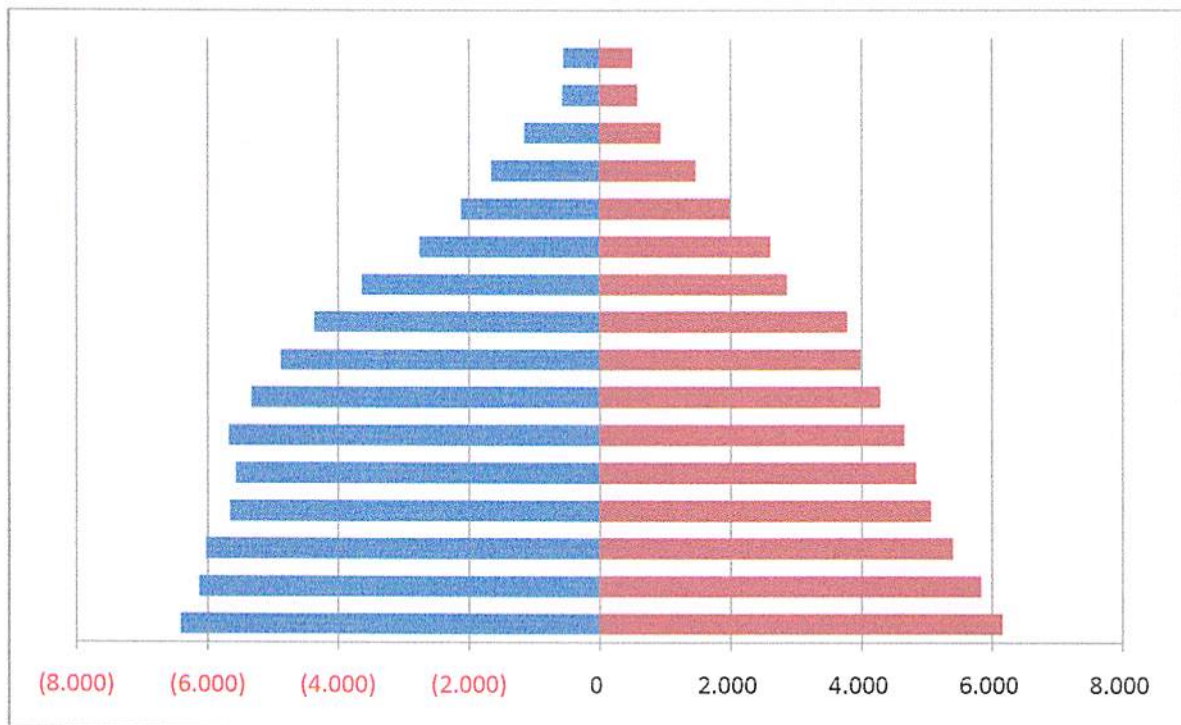
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk sebanyak 117.457 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,09 persen.

Analisis kependudukan salah satu nya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas, menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

4



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

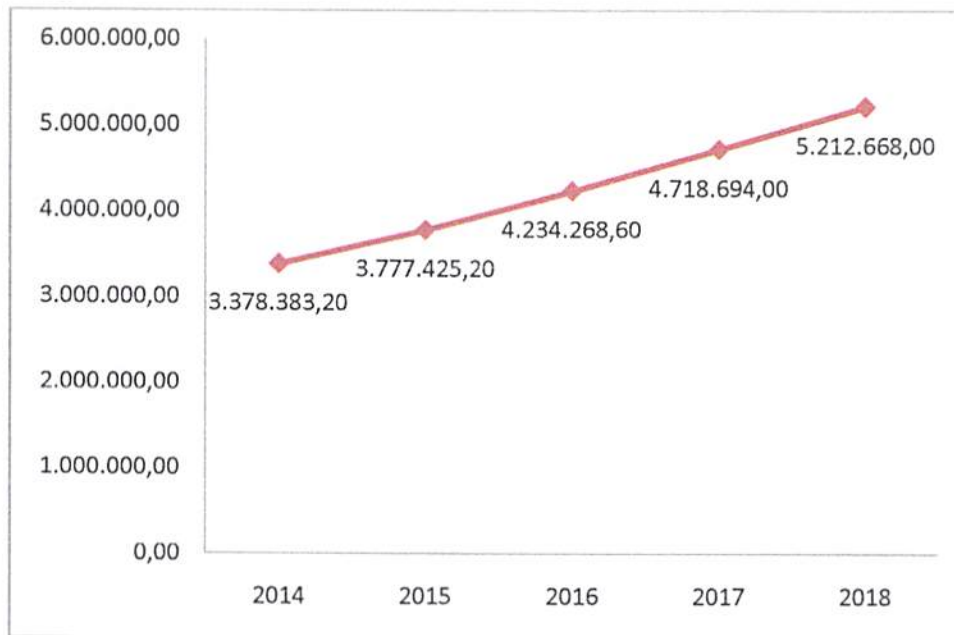
Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah yang mempunyai ketergantungan perekonomian pada sektor pertanian dengan subsektor perkebunan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gunung Mas mempunyai karakteristik wilayah yang sesuai untuk perkebunan. Kondisi perekonomian di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan indikator PDRB, terlihat semakin membaik.



Nilai PDRB terus mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Peningkatan nilai PDRB tersebut menunjukkan peningkatan sumberdaya ekonomi di Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas, 2014-2018 (juta Rupiah)

Dilihat dari grafik di atas, nilai PDRB pada tahun 2018 merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2018 mencapai 5.212.668 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4.718.694 juta rupiah di tahun 2017 atau naik sebesar 10,47 persen.



Tabel 2.6
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Gunung Mas (Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,68	33,31	32,31	31,97	30,43
B	Pertambangan dan Penggalian	13,52	12,35	12,29	12,25	11,62
C	Industri Pengolahan	8,83	8,88	9,04	8,85	8,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,75	11,56	11,83	12,12	12,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,49	8,87	9,08	9,23	10,05
H	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,68	1,67	1,71	1,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,71	1,78	1,76	1,79
J	Informasi dan Komunikasi	1,26	1,21	1,16	1,12	1,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,55	0,53	0,54
L	Real Estate	2,55	2,74	2,81	2,80	2,91
M	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,61	6,09	6,32	6,45	6,68
P	Jasa Pendidikan	7,20	7,49	7,56	7,57	7,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	3,12	3,19	3,20	3,34
R	Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32
S	Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32
T	Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32
U	Jasa Lainnya	0,30	0,31	0,31	0,31	0,32
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan walaupun persentasenya dalam lima tahun terakhir (2014-2018) cenderung menurun setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2014 sektor tersebut berada di poin tertinggi yaitu 34,68 yang



kemudian turun pada tahun 2018 yaitu sebesar 30,43. Sektor lainnya yang mendominasi adalah sektor Konstruksi yang mencapai 12,50 pada tahun 2018. Sektor pertambangan dan penggalian juga masih mendominasi sebesar 11,62 persen di tahun 2017 walaupun dalam lima tahun terakhir persentasenya terus menurun. Selain itu, sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pengadaan listrik dan gas menyumbang 0,02 persen dari PDRB.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,8	6,33	5,31	6,82	6,64
B	Pertambangan dan Penggalian	2,15	1,79	11,19	10,2	2,19
C	Industri Pengolahan	5,94	5,67	6,71	4,31	9,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,33	11,37	10,21	6,4	8,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,24	8,56	13,39	-5,26	6,28
F	Konstruksi	9,67	9,64	9,19	8,56	4,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,24	8,65	7,81	7,73	10,45
H	Transportasi dan Pergudangan	4,34	7,7	6,87	7,55	8,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,34	7,23	7,49	5,58	7,38
J	Informasi dan Komunikasi	6,48	2,69	2,56	2,63	7,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,24	2,06	2,7	3,38	5,82
L	Real Estate	7,28	8,22	7,19	5,05	8
M	Jasa Perusahaan	1,84	6,4	4,66	4,46	2,81
N	Jasa Perusahaan	1,84	6,4	4,66	4,46	2,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	12,51	8,8	6,99	7,61
P	Jasa Pendidikan	7,31	8,7	5,14	5,19	8,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	8,6	5,54	5,34	8,87

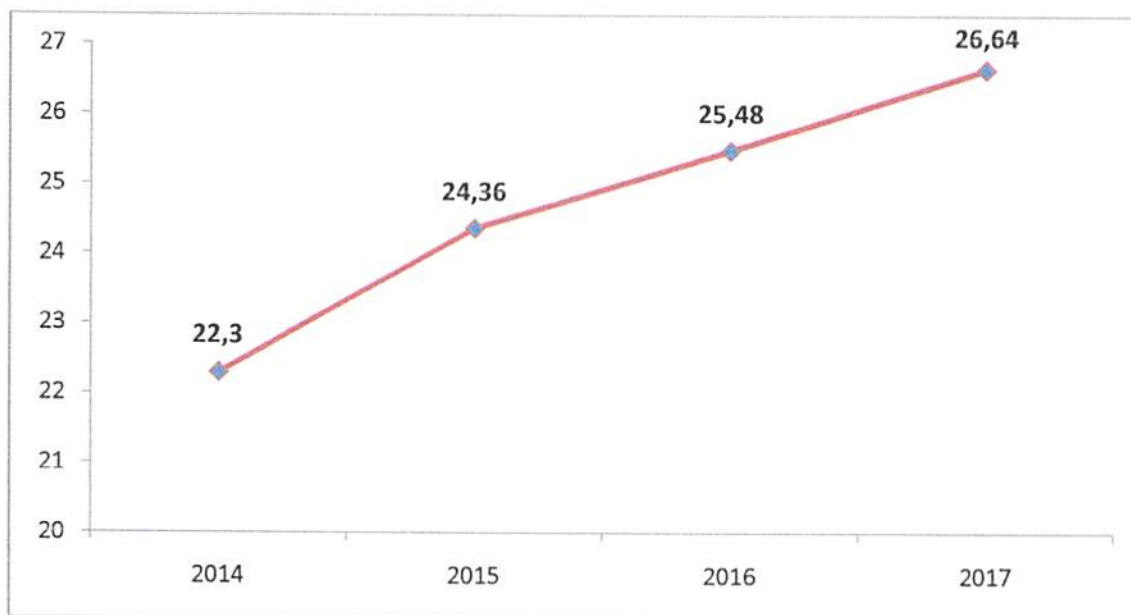


R	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77	7,38
S	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77	7,38
T	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77	7,38
U	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77	7,38
Produk Domestik Regional Bruto		6,41	6,96	7	6,93	6,91

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas sebesar 7 persen kemudian turun di tahun 2017 yaitu sebesar 6,93 persen kemudian turun lagi pada tahun 2018 sebesar 6,91 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan oleh Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan drastis hingga mencapai 2,19 persen di tahun 2018, dengan persentase sebelumnya sebesar 10,2 persen di tahun 2017.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan cukup signifikan dalam empat tahun terakhir Pada tahun 2014, PDRB per kapita sebesar Rp.22,3 juta dan meningkat dalam tiga tahun menjadi Rp.26,64 juta.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2014-2017 (Juta Rupiah)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan hasil analisis bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini akan melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas sejauh ini.

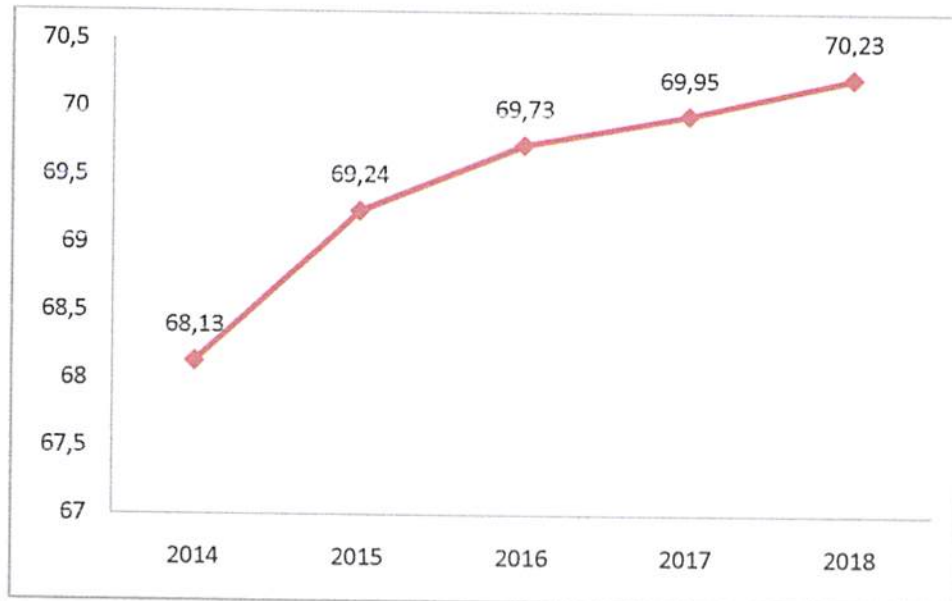
a. Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

4



Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018

Nilai IPM Kabupaten Gunung Mas yang terus meningkat diikuti dengan komponen penyusun IPM yang meningkat pula nilainya. Berikut komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia, yakni angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita dalam lima tahun terakhir.

q



Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya
Kabupaten Gunung Mas, 2014-2018

Unsur Pembentuk IPM	satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,74	8,93	8,94	8,96	8,97
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	10,82	11,44	11,74	11,75	11,76
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,59	69,89	70,02	70,15	70,24
Paritas daya beli	Rp	9.965	10.044	10.155	10.276	10.504
IPM	%	68,13	69,24	69,73	69,95	70,23

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

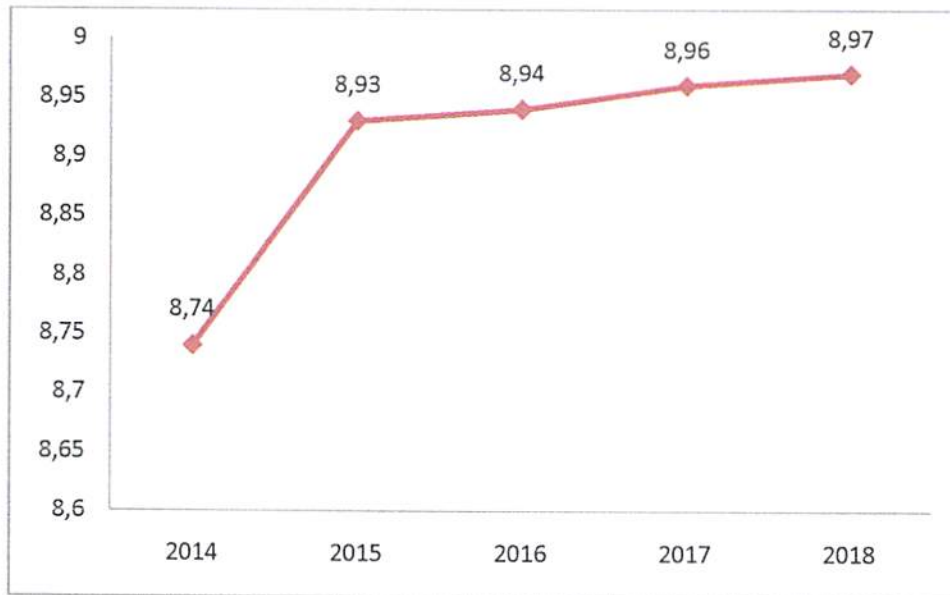
b. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.



Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 RLS Kabupaten Gunung Mas mencapai 8,97 yang meningkat dari tahun sebelumnya 8,96 di tahun 2017. Angka ini berarti bahwa penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 8,97 tahun atau Kelas 2 SMP semester dua, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

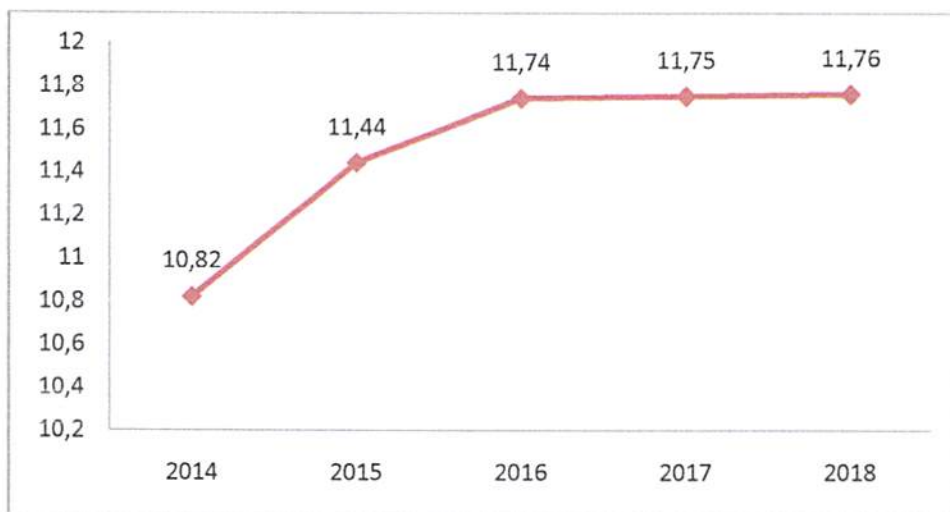
Gambar 2.7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan



akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan Pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan gambar di bawah, terlihat bahwa nilai HLS Kabupaten Gunung Mas tahun 2018 mencapai 11,76 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 11-12 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan SMA/SMK. Tingginya harapan lama sekolah ini harus diikuti dengan meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.8 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018

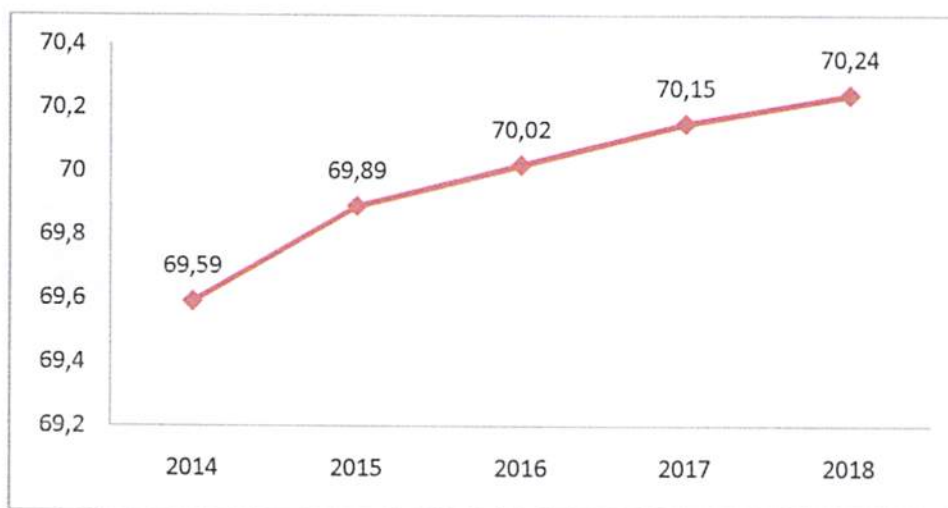
4



c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 72 tahun yang berarti setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2016 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 72 tahun. Perkembangan nilai AHH dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.9 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Aspek pelayanan umum ini mencakup fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan.

2.3.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Gunung Mas, sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membangun jalan kabupaten sepanjang 738,992 km. Dari panjang jalan tersebut, 737,935 km yang dapat dilalui oleh mobil.



Selain jalan, indikator lain yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	-	0,122	0,146	0,176	0,565	
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	87,00	87	21,5	300	20	
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	15,90	7,412	7,114	7,436	7,450	
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	13,478	15,375	14,768	20,096	24,510	25,04
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal (%)	40	45,50	48	56,60	78	
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	22	29	39	39	39	
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk (%)	2,81	9,98	10,10	19,76	10,63	
Persentase penanganan sampah (%)	66,00	5,04	4,51	12,21	12,21	
Rasio Rumah Layak Huni	13,123	18,037	17,345	25,855	23,328	
Pemukiman Layak Huni (Ha)	815,90	4,906	6,856	6,856	6,909	
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	
Persentase RT yang memiliki akses air minum bersih			54,79	51,65	65,06	62,07
Persentase RT yang memiliki akses air minum layak			24,72	21,46	43,81	22,35

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

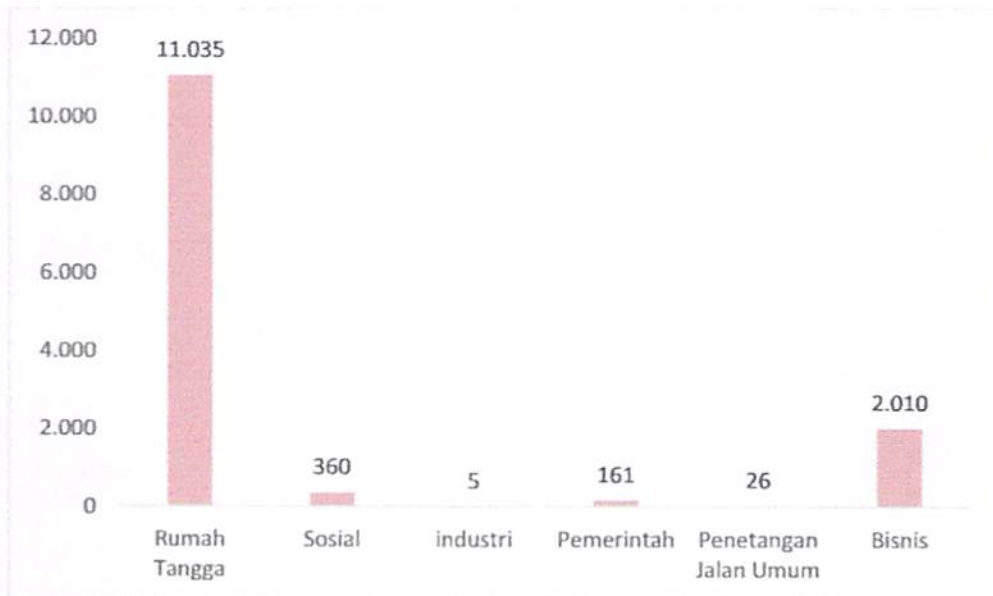
b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Listrik merupakan kebutuhan bukan hanya sebagai sumber penerangan, namun juga sebagai sarana penunjang kehidupan sehari-hari. PLN cabang Kuala Kurun sebagai pemasok kebutuhan listrik di Kabupaten Gunung Mas mempunyai jumlah pelanggan yang beragam, mulai dari rumah





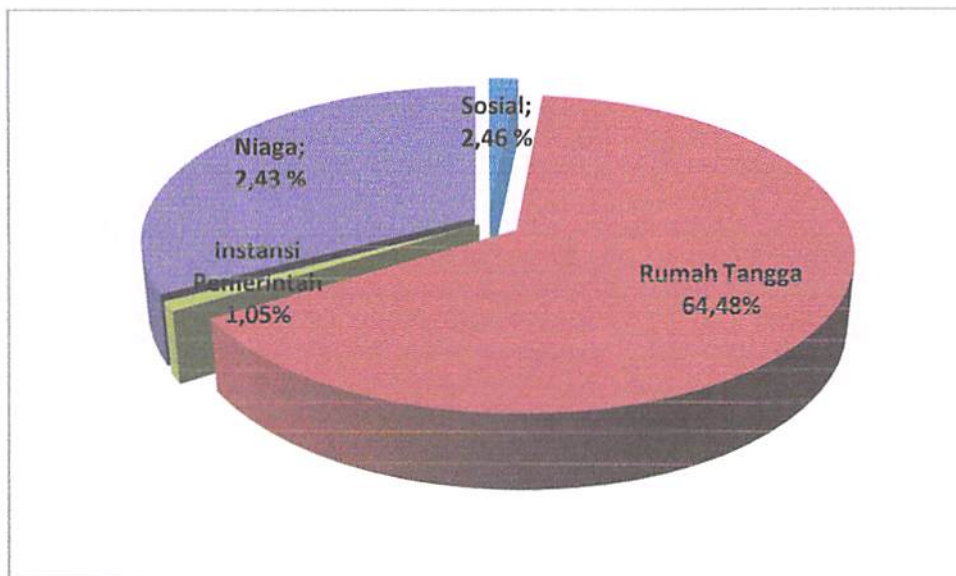
tangga, sosial, industri, pemerintah sampai bisnis. Jumlah pelanggan tertinggi adalah rumah tangga yaitu sebanyak 11.035 pelanggan di tahun 2018.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.10 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Cabang Gunung Mas Tahun 2018

Selain listrik, fasilitas perumahan yang wajib dimiliki masyarakat adalah air. Berdasarkan persentase air yang disalurkan, pada tahun 2018, sebagian besar didistribusikan untuk kebutuhan rumah tangga yaitu sebanyak 64,48 persen atau 816.264 m³. Sedangkan pada urutan kedua, susut/hilang sebesar 32,80 persen atau 415.268 m³. Persentase air yang disalurkan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.11 Persentase Air Yang Disalurkan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018

Selain jalan, indikator lain yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja urusan pemukiman antara lain:

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Urusan Pemukiman
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013-2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	10.704	3,149	3,397	3,721	14,844	
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	22%	29%	39%	39%	39%	
Rumah Layak Huni (unit)	18.229	23,504	23,659	35,267	26,241	
Jumlah RT belum berlistrik						21.650
Jumlah Jumlah RT berlistrik						6.927
Rasio elektrifikasi PLN						59,08
Rasio elektrifikasi Non PLN						17,09
Rasio elektrifikasi	56,36					76,17
Rasio desa berlistrik						85,04

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

4



c. Urusan Sosial

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Gunung Mas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini masih wajar karena kenaikan biaya hidup atau juga menyangkut kesejahteraan dan pendapatan masyarakat bertambah. Pada tahun 2017 garis kemiskinan mencapai 388.415 sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 6.670 atau 5,83 persen dari total penduduk Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.11
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Gunung Mas 2013-2018

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Ribu)	Persentase
2013	317.979	7,30	6,9
2014	341.141	7,24	6,7
2015	356.886	6,75	6,17
2016	365.198	6,55	5,85
2017	388.415	6,67	5,83
2018	388.964	5,96	5,10

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

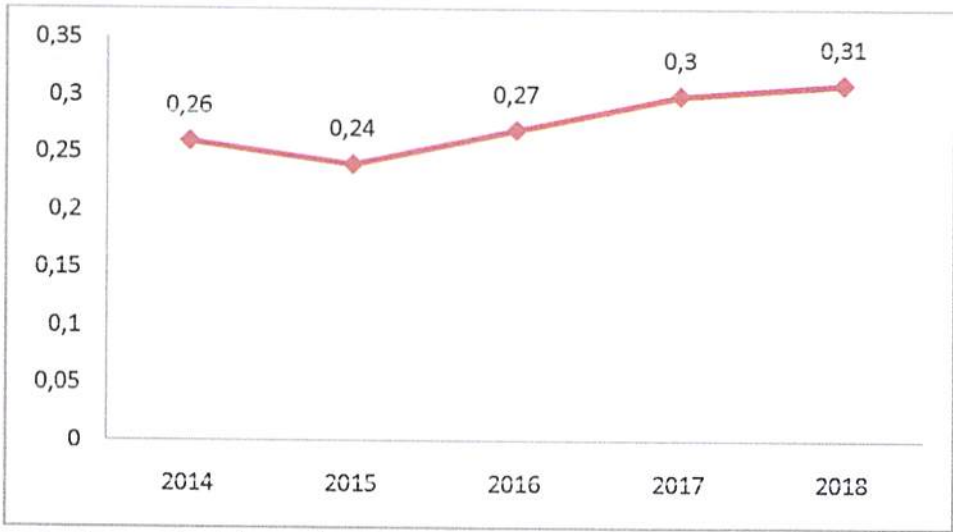
Pembangunan Daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh seluruh

4



lapisan masyarakat sehingga kesenjangan penghidupan antar individu semakin terasa, salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Kabupaten Gunung Mas memiliki gini ratio yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam kategori tingkat pemerataan rendah, karena terletak di bawah 0,4, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong rendah. Namun hal ini perlu diwaspadai dikarenakan nilai indeks tiap tahunnya, seperti yang terlihat pada gambar di bawah indeks gini kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 sebesar 0,296 dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,27 di tahun 2016.



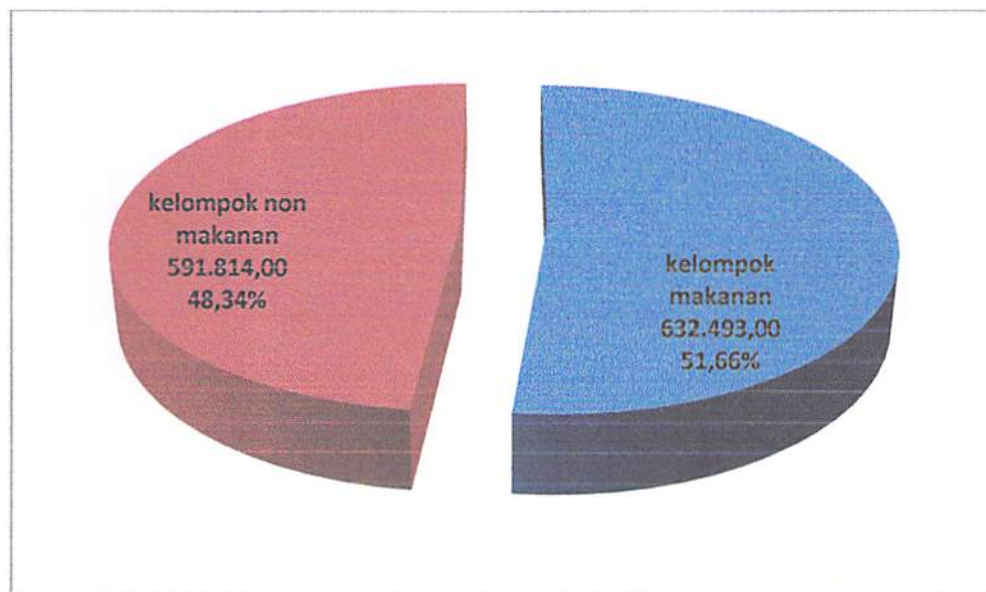
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.12 Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 sebanyak Rp 1.181.810,00 per



bulan. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang mencapai 60,99 persen atau Rp.720.729,00. Sedangkan sisanya digunakan untuk pengeluaran konsumsi nonpangan yang mencapai Rp.461.081,00 atau 39,01 persen.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

**Gambar 2.13 Pengeluaran Konsumsi Perkapita
Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018**

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

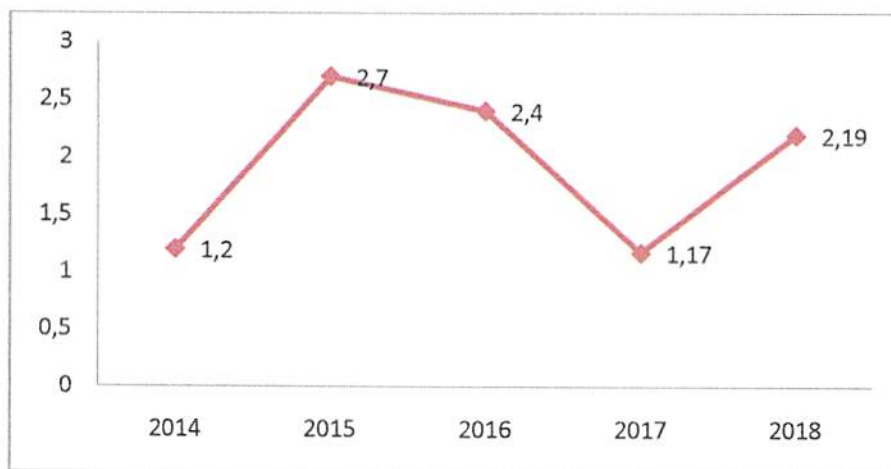
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.



a. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi terbuka Kabupaten Gunung Mas mencapai 3 persen kemudian turun di tahun 2014 sebesar 1,2 persen. Namun di tahun 2015 Tingkat pengangguran terbuka naik kembali hingga 2,7 persen kemudian turun hingga mencapai angka 1,17 di tahun 2017 kemudian di tahun 2018 naik kembali menjadi 2,19 persen.



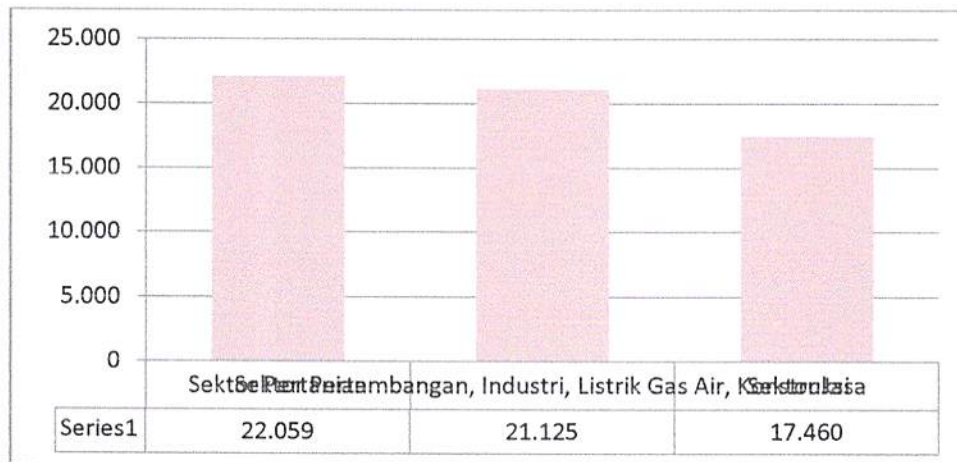
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017

Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Gunung Mas sebesar 2,19 persen berupa penduduk di atas 15 tahun yang tidak bekerja. Mayoritas



penduduk Gunung Mas bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 22.059 penduduk berusia 15 tahun ke atas dan sektor pertambangan galian, industri dan konstruksi sebesar 21.125 penduduk.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2019

Gambar 2.15 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender. Kesenjangan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender atau (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Gunung Mas merupakan kota yang padat penduduknya, sehingga Pemerintah Daerah belum maksimal dalam bekerja



sama dengan masyarakat untuk melakukan pengendalian kebersihan dan keindahan kota. Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Gunung Mas dikarenakan belum ada Tempat Pembuangan Sampah (TPA) resmi dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menampung sampah dari masyarakat.

Status pencemaran status mutu air merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas lingkungan yang menjadi salah satu komponen pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator lainnya yang digunakan adalah status pencemaran udara dan Luas tutupan lahan. Dilihat dari persentase pencemaran status mutu air di Kabupaten Gunung Mas yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam menjaga mutu air sungai tidaklah cukup, perlu adanya peran masyarakat dalam menjaga sungai sebagai sumber kehidupan.

Tabel 2.12
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013-2018

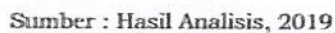
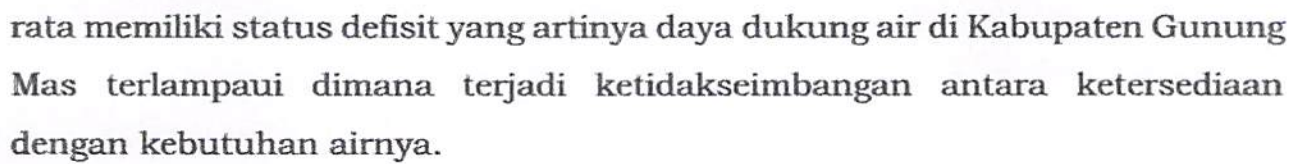
Komponen IKLH	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pencemaran status mutu air	-	44%	38%	50%	50%	49,17%
Persentase Standar Baku Mutu Udara				76,79	88,61	82,84
Luas Tutupan Lahan (ha)						
IKLH						

Sumber:

Untuk menganalisis kemampuan lingkungan hidup Kabupaten Gunung Mas yang dikuantifikasikan, digunakan ambang batas jasa ekosistem sebagai penyedia (provisioning) sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

Sumber air baku Kabupaten Gunung Mas berasal dari Sungai Kahayan. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, Kabupaten Gunung Mas rata-

4

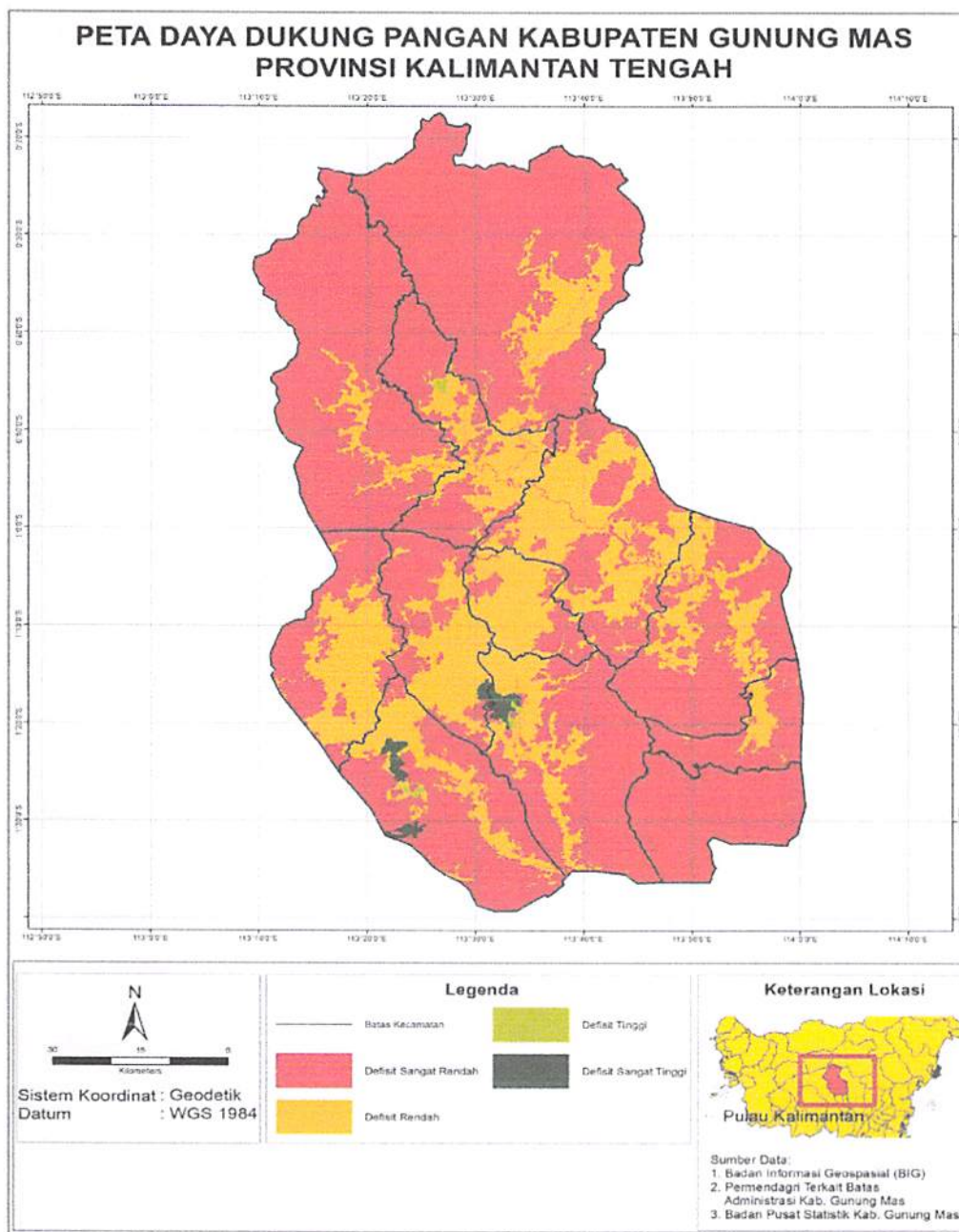


Gambar 2.16 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Gunung Mas

4



Kebutuhan Pangan Kabupaten Gunung Mas dihitung berdasarkan jumlah penduduk di tiap kecamatannya. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki kebutuhan pangan yang tinggi yaitu Kecamatan Kurun, Rungan, dan Tewah. Daya dukung pangan dianalisis dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan hasil analisis daya dukung pangan, Kabupaten Gunung Mas seluruhnya berstatus defisit. Dari hasil tersebut maka dibuat peta daya dukung pangan dengan klasifikasi defisit sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Gunung Mas tersebut.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 2.17 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gunung Mas

g



d. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa potensi perekonomian Kabupaten Gunung Mas yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemodal asing dan jumlah pemodal dalam negeri yang cukup banyak. Pemodal tersebut sebagian besar berinvestasi di sektor pertambangan. Jumlah pemodal asing lebih besar daripada pemodal dalam negeri yaitu 25 pemodal asing dan 19 pemodal dalam negeri.

Tabel 2.13
Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2017

Jenis Penanaman Modal	Tahun	
	2016	2017
Penanaman Modal Asing	25	25
Penanaman Modal Dalam Negeri	19	19

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

e. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kota yang menjunjung seni dan budaya. Hal ini terlihat dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Mas yang berbasis kebudayaan. Situs-situs kebudayaan yang menjadi objek pariwisata antara lain Betang Singa Kenting, Betang Jaga Kamis, Betang Damang Batu, Betang Toyoi, dan Kaleka Betang Siwung Tahunjung.

Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas yang dibuktikan dengan jumlah benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2017 ini terdapat 25 benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2016 sebanyak 12 buah. Grup kesenian yang difokuskan pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan jumlahnya cukup banyak yaitu 25 grup. Diharapkan jumlah gedung kesenian yang hanya berjumlah 1 unit bisa diperbanyak oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai sarana bagi grup kesenian.

4



Tabel 2.14
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017

Indikator Kebudayaan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	3	1	1	1	1
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	0	0	1	1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	4	1	9	12	25
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	1	26	26	26	26
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	0	0	1	1

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Mas.

a. Urusan Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu:

- a. objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes;
- b. objek wisata alam Sungai Hamputung;



- c. objek wisata alam air terjun Batu Mahasur;
- d. objek wisata alam Bukit Amai Rawang;
- e. objek wisata budaya Betang Tumbang Korik;
- f. objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi; dan
- g. objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui.

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

Pariwisata Kabupaten Gunung Masbelum banyak berkembang. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan domestik di tahun 2018 sebanyak 24.948 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 32 orang. Diharapkan perlu adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta promosi yang memadai sehingga mendongkrak jumlah wisatawan di Kabupaten Gunung Mas. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang potensial bagi penerimaan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	3.961	1.100	1.250	1.600	9.457	24.948
2	PAD sektor pariwisata	Rp						



b. Urusan Pertanian

Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian merupakan basis perekonomian Kabupaten Gunung Mas. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Kabupaten Gunung Mas, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Angka Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2017 menunjukkan angka tertinggi dibandingkan empat tahun terakhir.

Tabel 2.16
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	34,68	33,31	32,31	31,97	30,43
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	6,8	6,33	5,31	6,82	6,64

2.3.4. Urusan Penunjang

a. Penyelenggaraan Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tersebut, disusun suatu laporan yang disebut



LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Hasil dari nilai pelaporan LAKIP Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 menunjukkan predikat “C”.

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja Pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2017, Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Gunung Mas sudah mencapai level 2 sehingga masuk kategori berkembang. Level 2 diartikan bahwa praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya. Hasil dari nilai pelaporan LAKIP Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019 menunjukkan predikat “B”.

b. Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Gunung Mas memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Tabel 2.17

**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Opini Publik
1.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	2015	Wajar Dengan Pengecualiaan
3.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
4.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
5.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian



c. Pelayanan Publik

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan baik pelayanan yang berupa barang publik maupun jasa publik. Hasil dari pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang pada tahun 2017 mencapai nilai 79,06 atau termasuk dalam kategori “Baik”.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

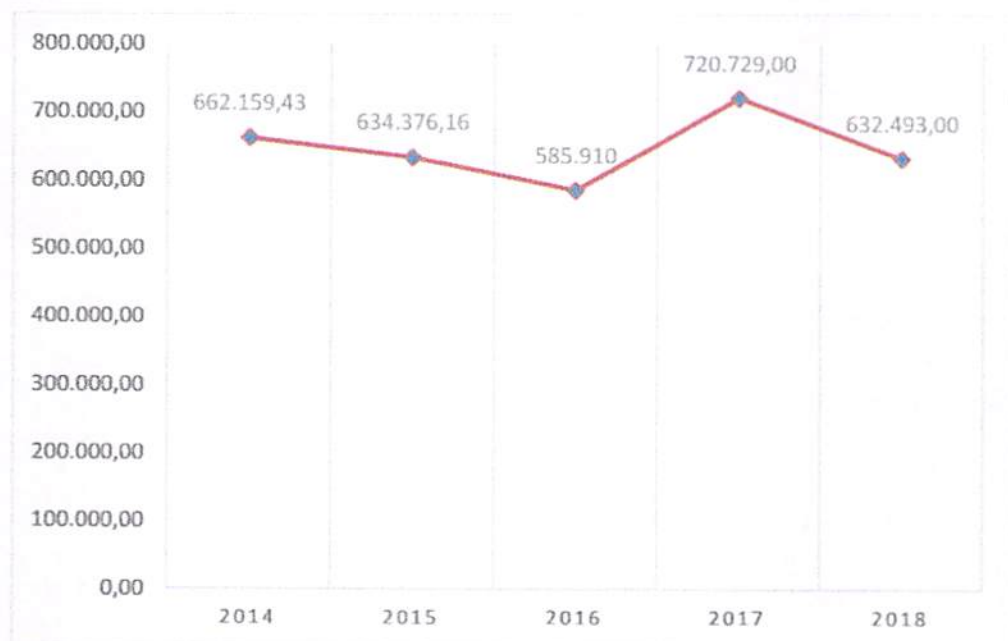
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren positif di setiap tahunnya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata telah memiliki pendapatan di atas 500.000 rupiah. Semakin besar pendapatan seseorang semakin besar pula konsumsi baik makanan maupun non makanan dan porsi konsumsi non makanan semakin meningkat sedangkan porsi konsumsi makanan menurun.

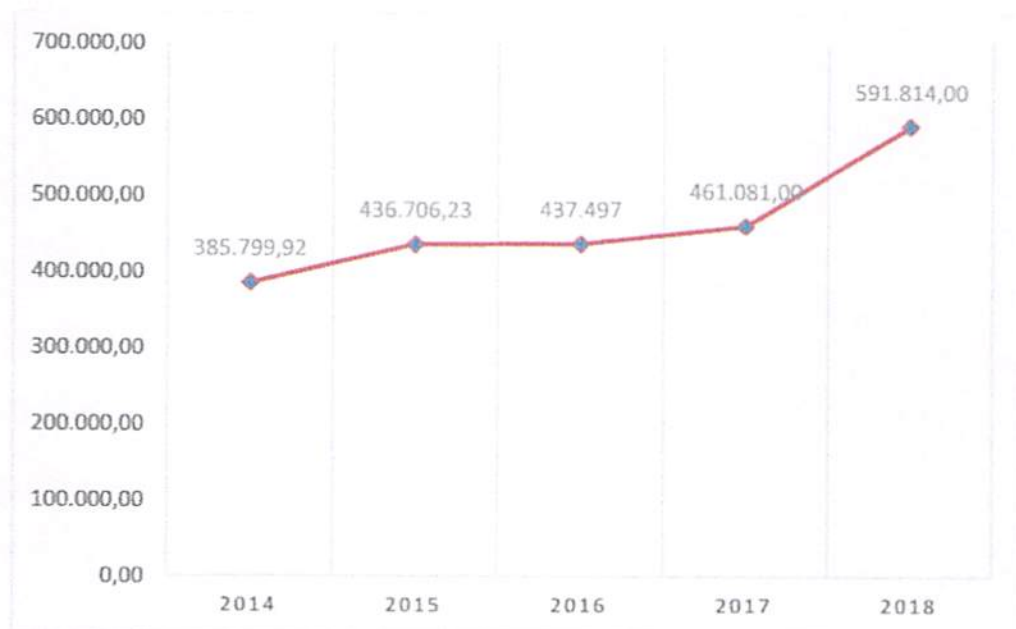
Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa pengeluaran konsumsi perkapita pada kelompok makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai 2017, begitu juga dengan pengeluaran konsumsi perkapita menurut kelompok non makanan. Namun jumlah kelompok makanan masih di atas jumlah kelompok non makanan.

f



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 2.18 Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2018



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 2.19 Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2018



2.4.2. Fokus Investasi

Kabupaten Gunung Mas memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah khususnya pada hasil pertambangan. Komoditas sektor pertambangan yang potensial adalah emas dan batubara, sehingga banyak investor dan perusahaan yang ingin menggali potensi tersebut. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2018 naik menjadi Rp.111.335.484.996,51 sedangkan di tahun sebelumnya di tahun 2017 hanya sebesar Rp.100.864,45. Sektor perkebunan mendominasi dalam penanaman modal dalam negeri yaitu sebesar Rp 3.8 triliun. Sektor perkebunan sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mensubstitusi sektor pertambangan secara perlahan. Proses perijinan investasi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2014 hingga 2017 stagnan sebanyak 10 hari. Diharapkan proses perijinan investasi dapat dipercepat dan dipermudah sehingga banyak investor dan perusahaan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.

2.4.3. Fokus Infrastruktur

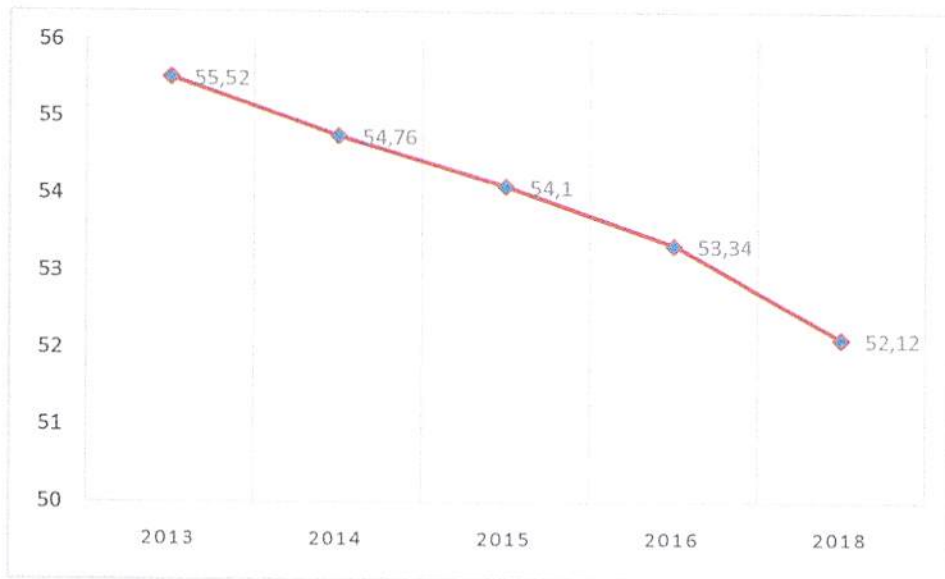
Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Meningkatnya pembangunan infrastruktur belum bisa dilaksanakan secara merata, masih terdapat daerah terpencil Kabupaten Gunung Mas. Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas sebesar 10.804 km², sedangkan wilayah produktifnya sebesar 585 km². Hal ini menandakan bahwa hanya 5,4 persen dari total wilayah yang termasuk wilayah produktif.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia mengindikasikan bahwa daya saing daerah bisa dilihat dari segi pembangunan manusia. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut) dengan jumlah penduduk



usia produktif. Penduduk Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh penduduk muda yang masih produktif yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun. Angka beban tanggungan per 100 orang di Kabupaten GunungMas mencapai 53,34 yang artinya tiap 100 orang pada kelompok usia produktif menanggung sekitar 54 orang pada kelompok usia non-produktif.



Gambar 2.20 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018

B. Indikator Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Berikut indikator pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan potret keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan Daerah.



Tabel 2.18
Indikator Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	ASPEK KESEJAHTERAAN							
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosisl, Serta Budaya dan Olahraga							
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	6,75	6,41	6,96	7	6,93	6,91
2	Laju Inflasi	(%)	8,4					
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah		3.378.383,20	3.777.425,20	4.234.268. 60	4.718.694,00	5.212.668 ,0
4	Angka Kemiskinan	(%)	6,9	6,7	6,17	5,85	5,83	5,10
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	8,00	1,20	2,70		1,17	2,19
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	67,75	68,13	69,24	69,73	69,95	70,23
7	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	9.823	9.965	10.044	10.155	10.276	10.504
8	Jumlah PDRB Perkapita/Tahun	Juta Rp		22,3	24,36	25,48	26,64	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf (%)	(%)	99,69	99,73	99,53	99,95	99,8	
1.2	Angka Partisipasi Kasar							
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	39,18		71,89	36,94	79,65	
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	108,31	110,9	123,39	124,56	111,39	114,87
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	90,87	89,8	103,18	79,06	84,97	85,40



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	(%)	68,22	61,5	67,06	76,52	77,34	81,97
1.3	Angka Pendidikan yang ditamatkan							
1.4	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	95,5	98,95	100	100	100,00	99,42
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	83,73	80,14	77	76,38	79,08	80,31
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	(%)	60,17	51,85	50,59	55,99	54,45	53,09
1.5	SD/MI							
1.5.1	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts		12	13	10	11	10	11
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	100	99,63	110,59	110,41	110,67	
1.5.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:22		14:09	0:00	133	
1.6	SMP/MTs							
1.6.1	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		9,51	15	10	12	11	12
1.6.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	98		96,44	97,41	102,54	
1.6.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:27		2:52	0:00	92,3	
1.7	Pendidikan Menengah							
1.7.1	Rasio siswa terhadap guru		12,92	11	13	16		15
1.7.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	82		55,07	41,44		
1.7.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:36		3:21	0:00		
1.8	Fasilitas Pendidikan							

4-



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.8.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	39,64		22,87	23,61	20,13	
1.8.2	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	31,82		15,06	17,58	25,48	
1.8.3	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	97,5		24,32	30,4	30,49	
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah		10,65	10,82	11,44	11,74	11,75	11,76
1.10	Rata-rata Lama Sekolah		8,73	8,74	8,93	8,94	8,96	8,97
1.11.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,01	21	69	89	0,73	
1.11.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA		0,3		33,7	47		
1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
1.12.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	33,62		66,42	77,23	80,31	
1.12.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	72,2		76,08	82,98	92,17	
1.12.3	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	82,87		76,82	98,62		
1.13	Angka Kelulusan							
1.13.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	100		97,32	97,69	98,06	
1.13.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	100		96,63	97,79	96,81	
1.13.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(%)	100		99,54	97,95		
1.13.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	100		93,16	95,43	88,08	
1.13.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(%)	99		85,69	84,35		

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kelangsungan hidup Bayi		90	90	86,86	92	93,79	
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	69,5	69,59	69,89	70,02	70,15	70,24
2.3	Angka Gizi Buruk (%)	(%)	10	4	3	3	3	
2.4	Angka kematian ibu	per 100 KLH	157	247	159	223	103	
2.5	Angka Kematian Bayi	per 100 KLH	7	9	10	7	8	
2.6	Angka Kesakitan							
2.7	Rasio Posyandu per satuan balita	per satuan balita	140 : 9.140	141 : 9.140	141 : 9.188	142 : 10.619	140 : 9.975	
2.8	Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes per satuan penduduk	per satuan penduduk	80: 154.084	96 : 107.500	96 : 109.949	89 : 112.484	97 : 115.054	79 : 117.457
2.9	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per satuan penduduk	1: 154.084	1: 107.500	1 : 109.949	1: 112.484	1 : 115.054	1 : 117.457
2.10	Rasio Dokter per satuan penduduk	per satuan penduduk	26: 154.084	28: 107.500	30 : 109.949	35: 112.484	29 : 115.054	38 : 117.457
2.11	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	per satuan penduduk	462: 154.084	508: 107.500	864 : 109.949	592 : 112.484	668 : 115.054	565: 117.457
2.12	Cakupan Puskesmas	(%)	1,33	100	100	100	100	
2.13	Cakupan Pembantu Puskesmas	(%)	0,63	100	100	100	0,69	
2.14	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	(%)	91,09	91,09	89,11	90,57	90	
2.15	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	(%)	54,19	45,82	36,94	33,16	60,95	

Handwritten signature



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	91,51	87,67	86,86	86,86	86,73	
2.17	Cakupan Ibu Nifas	(%)	91,36	87,87	87,56	88,8	90,03	
2.18	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	(%)	50,34	39,88	31,02	16,88	52,23	
2.19	Cakupan Kunjungan Bayi	(%)	86,53	88,91	87,04	78,17	93,79	
2.20	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	65	107	109	83	102	
2.21	Cakupan pelayanan anak balita	(%)	67,42	78,14	63,55	65,33	80,26	
2.22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	(%)	99,45	38,5	90,82	24,7	100	
2.23	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	32,76	
2.24	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	(%)	95,07	95,25	85,49	95,68	82,76	
2.25	Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	(%)	59,42	66,5	66,18	79,93	82	
2.26	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	per satuan penduduk	2/100	0	0	0		
2.27	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	(%)	90	21	0	1,22	0	
2.28	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	(%)	18,87	20,28	33,01	55	77	
2.29	Penderita DBD yang ditangani	orang	84	92	95,31	100	100	157
2.30	Penemuan Penderita Diare	orang	89,71	42,17	46,67	12,16	100	1.318
2.31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	37,76	47,72	15,66	55,18	44,32	



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	0,28	0,45	0,34	6,26	5,43	
2.33	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	31,43	88,24	71,42	100	100	
2.34	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	dokter	0	3	3	6	7	7
2.35	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	0	70	70	75	80	
2.36	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	0	90,47	89,47	75	98	
2.37	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		D	D	D	D	D	
2.38	Cakupan Desa Siaga Aktif		47	17	17	17	17	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	-	0,122	0,146	0,176	0,565	
3.2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	87	87	21,5	300	20	
3.3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	15,9	7,412	7,114	7,436	7,45	
3.4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	13,48	15,38	14,77	20,10	24,51	25,04
3.5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	40	45,50	48	56,60	78	
3.6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	22	29	39	39	39	
3.7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	2,81	9,98	10,10	19,76	10,63	
3.8	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	66,00	5,04	4,51	12,21	12,21	
3.9	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	13,12%	18,0	17,35	25,86	23,33	

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	815,9	4,906	6,856	6,856	6,909	
3.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
3.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)		-	-	-	24,51	25,04
3.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)		-	-	-	4,40	
3.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa		-	-	-	3	
3.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa		-	-	-	3	
3.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)		-	-	-	12,42	
4	Perumahan dan Pemukiman							
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	10.704	3.149	3.397	3.721	14.844	5.353
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	22	29	39	39	39	
4.3	Rumah Layak Huni (unit)	(%)	18.229	23,504	23,659	35,267	26,241	
4.4	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)		-	-	-	23,33	
4.5	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0,45	0,29	0,46	0,59	0,81	
4.6	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	-	0,04	0,98	0,98	0,98	
4.7	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)		-	-	-	15	

9



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum							
5.1	Rasio jumlah Polisi pamong praja per 10.000 penduduk	(%)	48					
5.2	Jumlah LINMAS per jumlah 10.000 penduduk (orang)	orang	564					
5.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	per desa	127					
5.4	Penegakan PERDA		7					
5.5	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan		3	2	1	2	
5.6	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan		2	2	2	1	
5.7	Jumlah Konflik yang Diselesaikan							
5.8	Persentase penyelesaian tindak pidana	%			77,27	79,50	93,00	88,00
5.9	Tingkat Pelanggaran Terhadap Perda							
5.10	Jumlah tindak pidana				110	164	94	69
6	Sosial							
6.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	6,39					
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)	0,86					
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar							
1	Ketenagakerjaan							
1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	76,90	72,24	77,44		74,87	75,76
1.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	8,00%	1,20	2,70		1,17	2,19



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.3	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.363	1.373	1.380	1.372	1.390	
1.4	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,50	98,70	98,13	98,70	98,92	
1.5	Jumlah Tenaga Kerja S2, S3							
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	11,03					
2.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)	16,56					
2.3	Rasio KDRT	kasus	0	2	1	2		
3	Ketahanan Pangan							
3.1	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)		1	1	1	1	1	1
3.2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	(%)	5,3	34,2	42,9	31,94	15,5	32,7
4	Pertanahan							
4.1	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Tahunan	sertifikat					9	
4.2	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Tahunan Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	sertifikat					0	
4.3	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	%					57,14	
4.4	Jumlah desa lokasi Prona	desa			12	14	15	41



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	-		2	2		
5.2	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	-		4	5	5	10
5.3	Pencemaran status mutu air	(%)	-	44	38	52	50	49,17
5.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	33,30	37	48	58	79	
5.5	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	-	100	100	100	100	
5.6	Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	(%)					73, 3	
5.7	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)					88,61	82,84
6	Kependudukan dan Catatan Sipil							
6.1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	40					
6.2	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten		Tersedia					
6.3	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	40					
6.4	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	26					
6.5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	(%)	48					

8



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	desa/kel	31	43	0	0	114	
7.2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	0	0	24	48	72	
7.3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1	1	1	1	1	
7.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	127	191	247	325	373	
7.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	0	1	4	8	4	
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
8.1	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,4	2,8	2,8	2,729	2,729	2,729
8.2	Rasio Akseptor KB (orang)	orang		75,03	80,54	80,24	74,67	76,23
8.3	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	orang		74,51	68,57	58,12	83,16	85,33
8.4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	12	9	9	11	18	18
8.5	Terpadunya program Kerja KB (program)	program	2	2	2	2	2	2
8.6	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	30	54	54	60	85	90
8.7	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	15	3	4	5	26	28
8.8	Keluarga Pra Sejahtera I	(%)	-	-	-	16,5		
8.9	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	13	26	29	135	55	49
8.10	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	26	30	38	67	55	60



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8.11	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	orang	-	2079	2143	-		
8.12	Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta (orang)	orang	-	724	-	-		
8.13	Jumlah KDRT (orang)	orang	-	2	1	2		
8.14	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	kasus	-	-	-	-		
8.15	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	-	-	3	9		
8.16	Jumlah balita ikut posyandu (anak)	anak	-	-	-	-		
8.17	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	10	15	25	68	18	22
8.18	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	0	0	0	1	-	1
8.19	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	0	0	0	2	1	2
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah Bandara (buah)	buah	1	-	-	-	-	
9.2	Jumlah penumpang / barang melalui bandara							
9.2.1	- jumlah penumpang (orang)	orang	100	455	276	-	93	16
9.2.2	- jumlah barang (kg)	KG	145	821	906	-	459	
9.3	Jumlah Dermaga Sungai (buah)	buah	6	2	1	-	-	
9.4	Jumlah penumpang / barang melalui dermaga							

1



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9.4.1	- jumlah penumpang (orang)	orang						
9.4.2	- jumlah barang (kg)	KG		-	-	-	33	
9.5	Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil	menit	45	45	45	45	30	30
9.6	Jumlah mobil penumpang/barang yang di Uji KIR	buah	7	162	342	518	605	637
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Website milik pemerintah daerah (buah)	buah	11	13	18	23	33	
10.2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	unit	32	42	44	47	54	
10.3	Jumlah Radio/TV lokal	unit	1	1	1	1	1	
10.4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	(%)	0,043	0,039	0,03	0,025	0	
10.5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6	6	6	6	6	
10.6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	3	3	3	5	2	
10.7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	5	6	6	6	9	
10.8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7	7	7	7	7	
10.9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14	14	14	14	14	
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	2	2	2	3	2	
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	527	624	624	624	624	
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	unit	0	2	0	0	0	



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	6	13	18	24	24	
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	0	0	0	2	2	
10.15	Jumlah Badan Publik PPID	badan	0	4	7	10	28	
10.16	Pameran / expo	pameran	1	1	1	1	1	
10.17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	79,87	80,12	79,8	79,78	85,8	
10.18	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	unit	1	0	0	1	14	
10.19	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	0	15	15	15	17	
10.20	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)					49,16%	
11	Koperasi dan UMKM							
11.1	Koperasi Aktif (%)	(%)	77,92	40%	45%	50%	52%	
11.2	Jumlah UMKM	unit	2.806	2.900	2.922	2.930	2.943	
11.3	Jumlah Industri	industri	219				257	
11.4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kelurahan	2				3	
11.5	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	(%)	24,72%	20%	21%	25%	27%	
11.6	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	(%)					63,40%	

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	116	116	118	120	42	
12.2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	-	75%	75%	75%	80%	
12.3	Lamanya hari proses perizinan	hari	-	10	10	10	10	
12.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	-	72	72	70,25	79,06	
12.5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	-	100%	100%	100%	100%	
12.6	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp					4,8 T	4,3 T
13	Pemuda dan Olahraga							
13.1	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	-	0	0	0	1	
13.2	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	1	0	0	0	1	1
13.3	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	4				1	86
13.4	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	1					1
13.5	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	-				1	1
13.6	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	7				1	234
13.7	Jumlah Pemuda Berprestasi	jiwa					70%	85%
13.8	Jumlah Mendali	buah					48	
14	Statistik							
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	Ada	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	Ada	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
15	Kebudayaan							
15.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	3	1	1	1	1	
15.2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	2	0	0	1	1	
15.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	4	1	9	12	25	
15.4	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	1	26	26	26	26	
15.5	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1	0	0	1	1	
16	Perpustakaan							
16.1	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1	1	1	1	1	
16.1.1	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40	40	40	40	40	
16.1.2	Jumlah perpustakaan sekolah :							
16.1.2.1	- . SD/MI	buah	166	166	166	166	166	
16.1.2.2	- . SMP/MTs	buah	56	56	56	56	56	
16.1.2.3	- . SMA/MA	buah	13	13	13	13	13	
16.1.3	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	46	21	49	49	50	
16.1.4	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	0	0	0	0	0	
16.1.5	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi	buah	0	0	0	0	0	
16.2	Jumlah anggota	buah	803	825	1.064	1.203	1.478	
16.3	Jumah pengunjung	buah	2700	1.669	2.850	3.040	4.028	
16.4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	22,941	19.423	21.015	24.015	30.130	



FOKUS KINERJA	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2								
2.1	17 Kearsipan							
	17.1 Pengelolaan arsip secara baku :							
2.2	17.1.1 a. Umum	buah	75	78	83	86	98	
2.2.1								
2.2.2	17.1.2 b. Pemerintahan	buah	50	52	55	55	100	
2.2.3	17.1.3 c. Politik	buah	20	20	23	25	60	
2.3	17.1.4 d. Keamanan dan ketertiban	buah	35	35	35	37	60	
2.3.1								
2.3.2	17.1.5 e. Kesejahteraan rakyat	buah	40	41	41	45	50	
2.3.3	17.1.6 f. Perekonomian	buah	50	50	51	51	73	
2.4	17.1.7 g. Pekerjaan umum	buah	60	60	60	62	86	
2.4.1								
2.4.2	17.1.8 h. Pengawasan	buah	35	35	36	36	89	
2.4.3	17.1.9 i. Kepegawaian	buah	75	75	75	76	92	
2.5								
2.5.1	17.1.10 j. Keuangan	buah	80	80	80	80	120	
2.5.2								
2.5.3	C Fokus Layanan Urusan Pilihan							
2.6	1 Pariwisata							
2.6.1	1.1 Kunjungan Wisata	jiwa	3.961	1.100	1.250	1.600	9.457	24.948
2.6.2	1.2 Jumlah objek wisata daerah	buah	0				26	27
2.6.3	1.3 PDRB Sektor Pariwisata	(%)					13%	25%
2.6.4								
2.6.5								



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Pertanian							
2.1	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)		34,68	33,31	32,31	31,97	30,43
2.2	Luas Tanam Tanaman Pangan							
2.2.1	Padi sawah (Ha)	HA	742					
2.2.2	Padi ladang (Ha)	HA	3.049					
2.2.3	Jagung (Ha)	HA	33					
2.3	Luas Panen Tanaman Pangan							
2.3.1	Padi sawah (Ha)	HA	668	613	542			
2.3.2	Padi ladang (Ha)	HA	2.950	2.919	4.262			
2.3.3	Jagung (Ha)	HA	18	11	120			
2.4	Produktivitas Tanaman Pangan							
2.4.1	Padi sawah (Kwintal/Ha)	Kw/Ha	32,5					
2.4.2	Padi ladang (Kwintal/Ha)	Kw/Ha	20,85					
2.4.3	Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	23,33					
2.5	Produksi Tanaman Pangan							
2.5.1	Padi sawah (Ton)	Ton	2.171					
2.5.2	Padi ladang (Ton)	Ton	6.152					
2.5.3	Jagung (Ton)	Ton	42					104
2.6	Populasi Ternak							
2.6.1	Kerbau (ekor)	ekor	87	191	141	152	165	184
2.6.2	Sapi (ekor)	ekor	3.217	3.865	4.034	4.100	4.330	4.560
2.6.3	Babi (ekor)	ekor	21.954	25.054	28.580	30.876	31.954	32.363
2.6.4	Ayam buras (ekor)	ekor	65.898	69.540	76.830	78.751	80.015	80.867
2.6.5	Ayam ras pedaging (ekor)	ekor	58.279	62.920	89.550	88.640	89.545	89.545

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.7	Produksi Ternak							
2.7.1	Kerbau (Ton)	Ton	1,5		4.550	5.749	5.372	4.465
2.7.2	Sapi (Ton)	Ton	81,4		84.500	88.793	91.512	91.850
2.7.3	Babi (Ton)	Ton	168		220.520	226.129	233.225	230.877
2.7.4	Ayam buras (Ton)	Ton	63,3		27.008	27.023	39.657	43.217
2.7.5	Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	365		390.290	395.814	405.423	400.801
2.8	Produksi Telur							
2.8.1	Ayam buras (Ton)	Ton	22,9		27.070	41.039	42.766	30.055
2.9	Pengembangan/perluasan area perkebunan							
2.9.1	Karet (Ha)	HA	75	68.100	68.281	118.772	68.367	68.372
2.9.2	Kelapa Sawit (Ha)	HA	554	977	36.777	127.623	72.760	72.760
2.10	Produksi Komoditi Perkebunan							
2.10.1	Karet (Ton)	Ton	48.551	45.351	17.570	20.405	20.382	20.285
2.10.2	Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	-	60	35.381	35.381	99.299	99.249
2.11	Produktivitas Komoditi Perkebunan							
2.11.1	Karet (ton/ha)	ton/ha	647,35	0,66	0,26	0,17	0,30	0,30
2.11.2	Kelapa Sawit	ton/ha	-	0,06	0,96	0,27	1,36	1,36
3	Kehutanan							
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	HA	28,477	26,477	24,570	20,000	18,270	
3.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	juta Rp	43,403,146,622	37,514,161,455	40,065,650,000	40,065,650,001	40,065,650,002	
3.3	Penataan kawasan KPHP (peruntukan kawasan KPHP) (Km)	KM	0	0	75	75	75	



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.4	Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	HA	14,000	1,000	1,000	1,000	2,000	
3.5	Pembangunan KPHP (unit)	unit	1	1	0	2	-	
3.6	Pembangunan TAHURA	unit	0	0	1	0	0	
3.7	Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	0	0	5	0	0	
3.8	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	0	0	6	1	1	
3.9	Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	0	0	0	0	12	
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Luas wilayah yang ditertibkan (Ha)	HA	485,26					
4.2	Kontribusi sektor pertambangan dari PNPB dan PAD (Rp)	Rp	2.200.000.000 dan 2.051.000.000					
4.3	Rasio ketersediaan daya listrik	MW	4,87					
4.4	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	56,36					
4.5	Jumlah Desa berlistrik	Desa	74					
5	Perdagangan							
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	12,3	8,83	8,88	9,08	9,23	10,05



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Perindustrian							
6.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	2,07	9,49	8,87	9,04	8,85	8,97
6.2	Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri (%)	(%)	39,86%					
6.3	Pertumbuhan Industri (jumlah)	unit	89	1	4	46	35	
6.4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	219	219	223	269	304	348
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	1.004,00	1.430,00	1.978,00	3.363,06	3.701,82	4.311,35
7.2	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	Ton	212,9	200,2	535,1	351,4	260,6	286,5
7.3	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	29	27	36	37	39	
7.4	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	65	89,2	118	240	207,88	
7.5	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	12,91	7,7	6,27	103,97	27,84	29,73
7.6	Persentase PDRB Sub Sektor Perikanan	(%)						
8	Transmigrasi							
8.1	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	82,4	76,41	81,56	86,71	93,22	



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	Penanggulangan Bencana							
9.1	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	0	1	5		4	
9.2	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	6	5	10	10	0	
9.3	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100	100%	12%	12%	100%	
D	Urusan Penunjang							
1	Perencanaan Pembangunan							
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada		
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada		
1.5	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD		-	100%	100%	100%		
1.6	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	-					
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK			WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Reformasi Birokrasi							
3.4	Level Kapabilitas						Level 2	
3.5	Level Maturitas						Level 2	

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
C	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp		1.047.959,35	1.071.082,39	1.023.407,00	1.181.810,00	1.224.307
1.2	Nilai Tukar Petani							
1.3	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp		385.799,92	436.706,23	437.497,00	461.081,00	591.814
2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	HA						
2.2	Luas wilayah produktif	HA		122.000	146.000	176.000	565.000	
3	Fokus Iklim berinvestasi							
3.3	lama proses perijinan	hari		10	10	10	10	
3.4	jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Rp	14.170.044.501,00	16.743.719.751,25	8.725.413.557,20	10.762.544.136,80	12.432.039.400,00	
4	Fokus Sumber Daya Manusia							
4.2	Rasio ketergantungan	(%)	55,52	54,76	54,1	53,34		52,12

h



B. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktupencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
 - b. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar,
- yang semuanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.



Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2013 – 2018

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD/MI				100	100
		SMP/MTs				42,75	42,75
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	SD				95,93	95,20
		MI				100,00	100,00
		SMP				79,66	81,03
		MTs				100,00	100,00
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	SMP/MTs				67,79	68,97
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	SD/MI				67,37	67,37
		SMP/MTs				63,36	63,36



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD				79,10	79,10
		MI				50,00	50,00
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	SMP/MTs				50,86	50,86
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD				88,98	88,98
		MI				50,00	50,00
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP				66,29	66,29
		MTs				75,00	75,00
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn	SMP				55,17	55,17
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD				68,79	68,79
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SMP				69,83	69,83

4



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD/MI				81,54	81,54
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	SD/MI				50	50
		SMP/MTs				50	50
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD/MI				96,61	96,61
		SMP/MTs				94,83	94,83
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD/MI				80,57	80,57
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SMP/MTs				82,63	82,63
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	SD				93,22	93,22



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	SD/MI				93,22	93,22
		SMP/MTs				77,59	77,59
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	SD				97,31	97,31
		MI				97,31	97,31
		SMP/MTs				86,21	86,21
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu	SD/MI dan SMP/MTs				100	100
		SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD/MI dan SMP/MTs				100	100
		SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs				100	100
		SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs				100	100
		SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kementerian Agama Kab/ kota pada setiap akhir semester	SD/MI dan SMP/MTs				100	100
		SD/MI				100	100
		SMP/MTs				100	100
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memiliki Laporan tahunan				100	100
		Memiliki rencana kerja tahunan				100	100
		Memiliki Komite Sekolah				100	100



Tabel 2.20
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2013 – 2018

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
URUSAN KESEHATAN							
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	91,09	89,11	90,58	90,0	90,12
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	87,67	86,86	88,87	86,72	85,57
3	Persentase bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	88,91	87,04	78,17	93,78	97,93
4	Persentase anak usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	78.14	63,55	65,33	82,72	84,64
5	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	92,03	94,44	95,68	92,31	92,89
6	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	49,30	51,51	51,91	54,04	4,49



NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Satuan	Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	9,23	41,95	57,63	31,88	24,32
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	19,72	20,10	19,54	6,73	27,79
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	18,21	20,18	10,11	3,40	19,92
10	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100,89
11	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Persen	100	100	100	100	64,43
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	101,4	28,36



Tabel 2.21
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial

No	Uraian SPM	Indikator	2016	2017	2018
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	10,30%	14,38%	25,85%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	20,95%	21,65%	25,85%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	21,65%	22,25%	23,75%
4	Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten / Kota	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah menerima Bantuan Sosial	31,05%	35,85%	44,95%
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial skala Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kab/kota	23,65%	25,65%	85,50%

1



Tabel 2.22
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal	Realiasi 2018
			Indikator	
1	Air Minum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	40%
2	Sanitasi	Penyediaan pelayanan pengelola air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	39%
3	Perumahan Rakyat	Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	60%



Tabel 2.23
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana
Tahun 2013 - 2018

INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen		>5%	10%	15%	20%	25%
Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	Persen						
Persentase jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	Persen	>3%	5%				
Persentase jumlah masyarakat / relawan yang mendapat pelatihan	Persen						
Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat pelatihan	Persen						
Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan pusdalop dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen						
Persentase penilaian dan pendataan kerusakan akibat bencana	Persen	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Persentase jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	Persen	0,5%	1%	1%	1%	1%	1%
Persentase jumlah korban yang dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	0,5%	1%	1%	1%	1%	1%



Tabel 2.24
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Persen						
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	kali/hari						
3	Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat	orang/lingkungan/dusun						

Tabel 2.25
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran								
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%							
	b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk	%							
2	Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM								
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%							



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan Daerah. Sistem pembiayaan Daerah dalam konteks Otonomi Daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal Daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan Daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu Daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan Daerah sangat krusial dalam memulai roda Pemerintahan Daerah dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan Daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan Daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan Pemerintahan Daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan Daerah diukur melalui kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Kesiambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan Daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2016-2018, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2018(Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2016	36.835	1.028.229	4%
2	2017	36.613	1.060.434	3%
3	2018	38.613	1.170.839	3%
	Rata-Rata	37.354	1.086.501	3%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Gunung Mas rata-rata tiga tahun terakhir adalah 3 persen. Hal ini mengindikasikan belum mandiriya pembiayaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Apabila terjadi gejolak terhadap perekonomian nasional secara langsung akan berpengaruh pada kondisi keuangan Kabupaten Gunung Mas, karena lebih dari 50 persen pendapatan Kabupaten Gunung Mas masih tergantung dari dana perimbangan.

Pada bagian kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kinerja masa lalu tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1) Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
- c. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.



Tabel 3. 2
Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah)
Kabupaten Gunung Mas 2016-2018 (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
	Pendapatan Daerah	993.435	1.102.561	1.170.839	6%
1.	Pendapatan Asli Daerah	36.835	38.614	38.614	2%
1.1	Pajak Daerah	6.253	5.834	5.803	-2%
1.2	Retribusi Daerah	3.008	2.493	2.326	-8%
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.526	6.034	6.434	5%
1.4	Lain-lain PAD yang sah	22.048	24.253	24.051	3%
2	Dana Perimbangan	862.435	924.493	984.862	5%
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	92.792	104.776	99.391	2%
2.2	DAU	564.028	559.899	600.000	2%
2.3	DAK	139.710	178.565	197.616	12%
2.4	DAK non Fisik	65.905	81.253	87.855	10%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	94.165	139.454	147.363	16%
3.1	Pendapatan hibah	-	19.291	18.675	-2%
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	22.731	29.515	22.731	0%
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	17.250	-
3.4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	1.500	-
3.5	Penerimaan dana desa	71.434	90.648	87.207	7%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah



Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata pendapatan Kabupaten Gunung Mas terjadi peningkatan 4 persen dari tahun 2016-2018. Kontribusi pendapatan Kabupaten Gunung Mas masih didominasi oleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sekitar 80 persen. Perlunya kerja keras oleh semua pihak untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar jarak (*gap*) pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan tidak semakin membesar.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan. Urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja Daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah.



Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. analisis proporsi realisasi belanja Daerah dibanding anggaran;
- b. analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- c. analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- d. analisis proyeksi belanja Daerah.

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2016– 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.

4



Tabel 3. 3
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	514.863	544.415	544.719	1,9%
1	Belanja Pegawai	356.784	359.654	355.028	-0,2%
2	Belanja Hibah	17.520	25.588	29.474	18,9%
3	Belanja Bantuan Sosial	766	582	1.596	27,7%
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	139.363	158.091	158.121	4,3%
5	Belanja Tidak Terduga	430	500	500	5,2%
II	BELANJA LANGSUNG	518.064	594.847	630.220	6,8%
1	Belanja Pegawai	36.923	43.659	53.107	12,9%
2	Belanja Barang dan Jasa	179.279	216.011	211.975	5,7%
3	Belanja Modal	301.862	335.177	365.138	6,5%
III	TOTAL BELANJA	1.032.927	1.139.262	1.174.939	4,4%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah



Rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2018 sebesar 4,4 persen, selalu terjadi peningkatan belanja tiap tahun dari tahun 2016 sampai 2018. Persentase belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja relatif berimbang. Tetapi tiap tahun cenderung belanja langsung meningkat sedikit demi sedikit persentasenya terhadap total belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa keperpihkan Pemerintah terhadap pembangunan Daerah cukup tinggi.

Persentase belanja pegawai terhadap total belanja rata-rata tahun 2016-2018 sekitar 30 persen. Tetapi tiap tahun persentase belanja pegawai terhadap total belanja menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja di Kabupaten Gunung Mas cukup baik. Keperpihkan pemerintah terhadap masyarakat cukup tinggi dalam hal pembangunan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja Daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- c. analisis proyeksi belanja Daerah.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis



lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.



Tabel 3.4
Realisasi Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2018 (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	514.863	544.415	544.719	1,9%
1	Belanja Pegawai	356.784	359.654	355.028	-0,2%
2	Belanja Hibah	17.520	25.588	29.474	18,9%
3	Belanja Bantuan Sosial	766	582	1.596	27,7%
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	139.363	158.091	158.121	4,3%
5	Belanja Tidak Terduga	430	500	500	5,2%
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.912	6.050	6.050	-45,8%
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	37.912	6.050	6.050	-45,8%
III	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	552.775	550.465	550.769	-0,1%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah



Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang penganggaranya diutamakan sebelum dialokasikan ke lainnya, karena menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Rata-rata belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2018 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas lebih pada pengalokasikan belanja langsung kepada masyarakat.

3.2.1 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang Daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran pada tabel berikut:

Adapun penutup defisit riil anggaran Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

h.



Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2018 (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN DAERAH	115.316	48.800	16.200	-48%
1.	Penerimaan Pembiayaan	77.404	42.750	10.150	-49%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.254	42.600	10.000	-49%
1.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	150	150	150	0%
2	Pengeluaran Pembiayaan	37.912	6.050	6.050	-46%
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	37.912	6.050	6.050	-46%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah

4



SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan Daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya.

Rata-rata pembiayaan Daerah di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2018 mengalami penurunan sebesar 46 persen. Penerimaan pembiayaan dari segi SiLPA bisa berdampak positif dan negatif. Apabila SiLPA berasal dari penghematan pembiayaan terjadi efisiensi penggunaan anggaran, tetapi apabila SiLPA berasal dari tidak terserapnya/tidak di jalankannya program dan kegiatan mengindikasikan terjadinya kegagalan perencanaan penganggaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan. Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta Proyeksi belanja wajib dan mengikat.

1. Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan Daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan Daerah, antara lain:

- a. angka rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah masa lalu;
- b. asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);
- c. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah; dan
- d. kebijakan di bidang keuangan negara.



Tabel 3.6
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Daerah	1.074.057,0	1.092.331,3	1.110.971,1	1.129.983,6	1.149.376,5
1.	Pendapatan Asli Daerah	59.766,9	60.962,2	62.181,5	63.425,1	64.693,6
1.1	Pajak Daerah	24.373,9	24.861,4	25.358,6	25.865,8	26.383,1
1.2	Retribusi Daerah	2.441,9	2.490,7	2.540,5	2.591,3	2.643,2
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	7.470,5	7.619,9	7.772,3	7.927,7	8.086,3
1.4	Lain-lain PAD yang sah	25.480,6	25.990,2	26.510,0	27.040,2	27.581,0
2	Dana Perimbangan	848.519,7	862.283,2	876.322,1	890.641,7	905.247,7
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	100.715,8	102.730,1	104.784,7	106.880,4	109.018,0
2.2	DAU	587.461,9	599.211,1	611.195,3	623.419,2	635.887,6
2.3	DAK	160.342,0	160.342,0	160.342,0	160.342,0	160.342,0
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	165.770,4	169.085,8	172.467,5	175.916,9	179.435,2
3.1	Pendapatan hibah	20.578,5	20.990,1	21.409,9	21.838,1	22.274,8
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	30.418,4	31.026,8	31.647,3	32.280,3	32.925,9
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	11.264,9	11.490,2	11.720,0	11.954,4	12.193,5
3.4	Pendapatan lainnya	103.508,6	105.578,8	107.690,3	109.844,1	112.041,0
4.	Penerimaan Pembiayaan	4.539,0	4.629,8	4.722,4	4.816,8	4.913,2
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.386,0	4.473,7	4.563,2	4.654,5	4.747,5
4.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	153,0	156,1	159,2	162,4	165,6
TOTAL PENERIMAAN PEMBANGUNAN		1.078.596,0	1.096.961,1	1.115.693,4	1.134.800,5	1.154.289,6

Handwritten signature



Jika dilihat dari tabel di atas, proyeksi penerimaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh komponen dana perimbangan khususnya dana bagis hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta peningkatan DAU. Adapun peningkatan PAD masih cenderung relatif kecil. Meskipun begitu tiap tahun Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus melakukan akselerasi dan terobosan untuk lebih meningkatkan kemandirian fiskal melalui pendayagunaan sumber daya potensial untuk dapat melampaui target PAD yang ada.

Berdasarkan perhitungan proyeksi tersebut didapat proyeksi penerimaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 hingga 2024 yang berkisar antara Rp.1,078 triliun di tahun 2020 hingga Rp.1,154 triliun di tahun 2024.

2. Proyeksi Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	583.477	595.136	607.029	619.160	631.533
1	Belanja Pegawai	394.399	402.287	410.333	418.540	426.911
2	Belanja Bunga	765	780	796	812	828
3	Belanja Hibah	12.895	13.153	13.416	13.684	13.958
4	Belanja Bantuan Sosial	1.597	1.629	1.662	1.695	1.729
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	173.321	176.787	180.322	183.929	187.607
6	Belanja Tidak Terduga	500	500	500	500	500
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Pembayaran Pokok utang					
III	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	584.977	596.636	608.529	620.660	633.033

h.



Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang merupakan salah satu unsur penting yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum anggaran didistribusikan kepada Perangkat daerah, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Belanja wajib dan mengikat ini yang paling utama adalah gaji dan tunjangan serta pokok utang pada pihak ketiga. Gaji dan tunjangan dan pokok hutang wajib diprioritaskan paling utama karena penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bisa lumpuh jika ada penundanaan gaji dan tunjangan.

Adapun besaran proyeksi belanja wajib dan mengikat Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 hingga tahun 2024 berkisar Rp.584,977 miliar di tahun 2020 hingga Rp.633.033 miliar di tahun 2024.

3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Hasil perhitungan kapasitas riil Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.078.596,0	1.096.961,1	1.115.693,4	1.134.800,5	1.154.289,6
1.1	Pendapatan	1.074.057,0	1.092.331,3	1.110.971,1	1.129.983,6	1.149.376,5
1.2	Penerimaan Pembiayaan	4.539,0	4.629,8	4.722,4	4.816,8	4.913,2
	dikurangi:					
2	Pengeluaran Wajib dan Mengikat	584.977,0	596.636,0	608.529,0	620.660,0	633.033,0
	KAPASITAS RIIL	493.619,0	500.325,1	507.164,4	514.140,5	521.256,6

[Handwritten signature]



Dengan kapasitas riil yang tersedia, sebagaimana tabel di atas, maka pendanaan pembangunan dapat dikasifikasi sebagai berikut:

- a. prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. prioritas II, digunakan untuk dialokasikan membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati; dan
- c. prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pembagian anggaran pendanaan untuk program masing-masing prioritas secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Kapasitas Riil
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prioritas I	162.777	164.988	167.244	169.544	171.891
2	Prioritas II	237.080	240.301	243.586	246.936	250.354
3	Prioritas III	93.762	95.036	96.335	97.660	99.012
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH		493.619,0	500.325,1	507.164,4	514.140,5	521.256,6





BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis Daerah. Analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh Daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan Daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, Provinsi, Nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan Daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan Daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi Daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas”**.

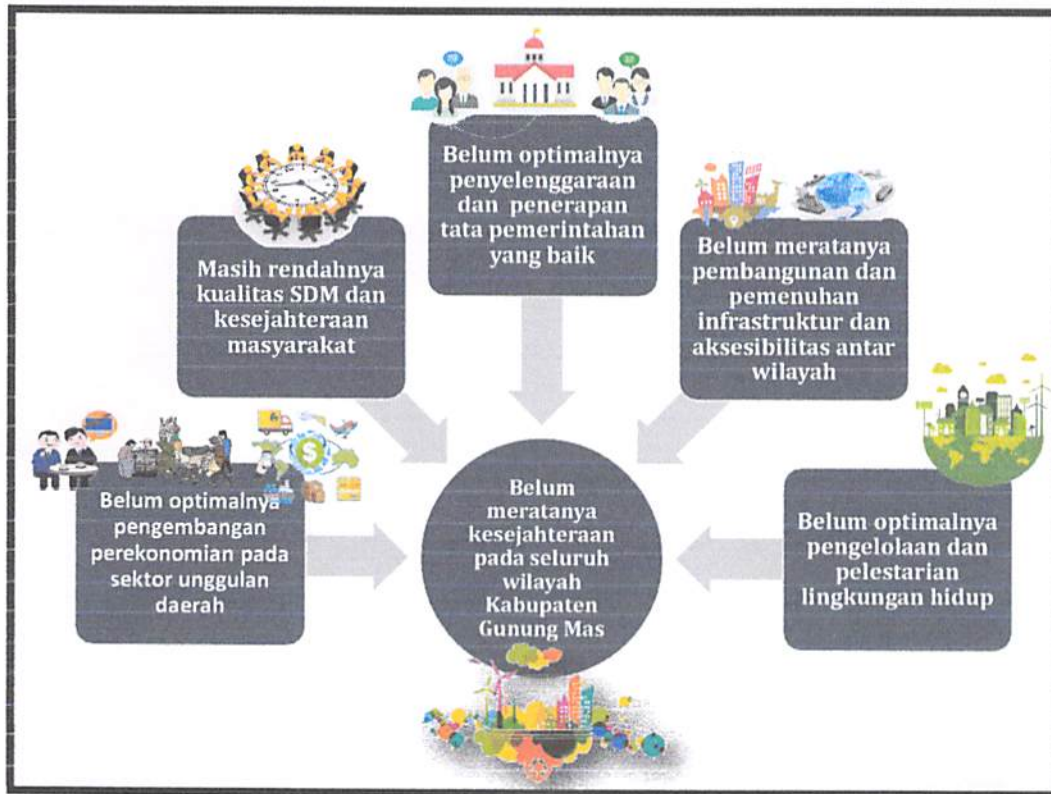
q-



Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;
- b. belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;
- c. masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat;
- d. belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata pemerintahan yang baik; dan
- e. belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan potensi sumber daya Daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan Daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas:



Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas

Permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar 4.1 diatas akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan Daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Gunung Mas sedang dalam progres untuk dikerjakan. Dengan hal ini kedepannya Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

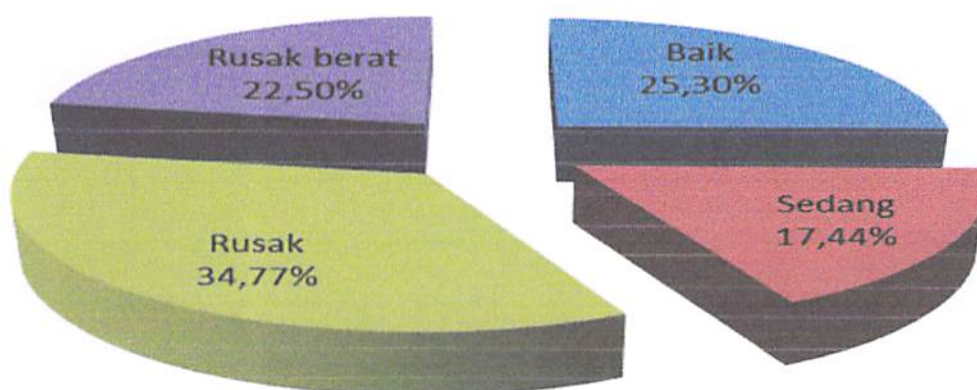


a. Belum terpenuhinya layanan transportasi yang berkualitas

Pembangunan Daerah dapat lebih cepat dilaksanakan jika didukung dengan akses kendaraan yang lancar, nyaman dan tersedia segala kebutuhan dalam pergerakan arus barang dan manusia. Jika dilihat pada data lalu lintas, dengan trayek bus antar kota/kecamatan pada tahun 2016 berjumlah 22 unit kendaraan dengan jenis kendaraan mini bus dan daya angkut 8 orang sarana ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan arus barang dan manusia yang cenderung meningkat pergerakannya. Dengan transportasi yang masih sangat kurang mengakibatkan lambannya pembangunan Daerah. Segala aktivitas sangat dipengaruhi oleh arus transportasi untuk mendukung pergerakan pembangunan di segala sektor. Hal ini harus segera diatasi oleh Pemerintah agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

b. Belum meratanya pembangunan dan Layanan infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah membangun jalan sepanjang 738.992 km pada tahun 2017. Kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas, hanya sebanyak 25,3 persen atau 186,93 km jalan yang memiliki kondisi baik, sedangkan sebanyak 17,44 persen berada pada kondisi sedang, 34,77 persen berada pada kondisi rusak dan sisanya mengalami kerusakan berat sebesar 22,50 persen. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

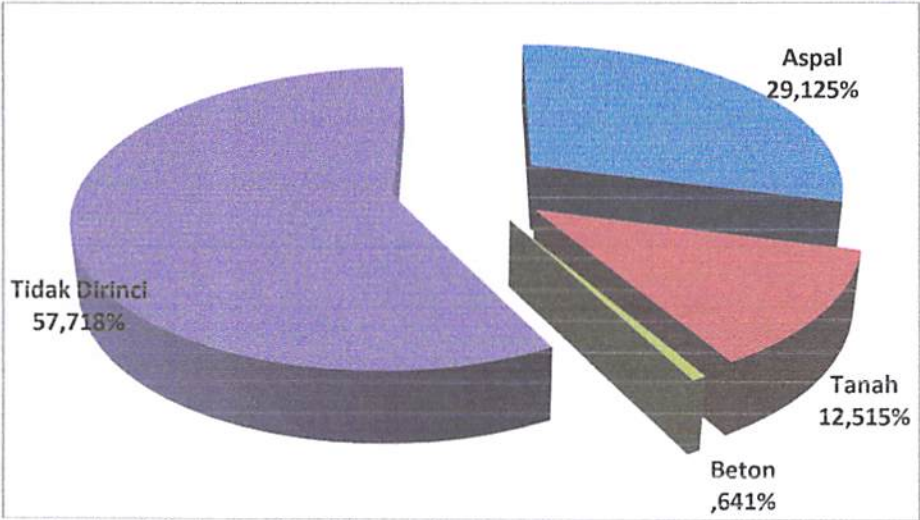


Sumber: Kab. Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.2 Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2017



Dari keseluruhan jalan sepanjang 738.992 km Namun hanya 29 persen atau 215 km sudah melalui tahap pengaspalan, sedangkan sisanya masih berupa tanah dan kerikil. Perlu adanya upaya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan kualitas jalan untuk memudahkan aksesibilitas antar wilayah sebagai salah satu motor penggerak pemerataan pembangunan dapat menjadi lebih mudah.



Sumber: Kab. Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.3 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Gunung Mas (km) tahun 2017

Menindaklanjuti hal tersebut, beberapa permasalahan dan akar masalah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Rumusan masalah dan Akar Masalah dari Permasalahan Pokok “Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah”

Permasalahan		Akar Masalah
1	Belum meratanya pembangunan dan layanan infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah	1. Kondisi jalan yang sebagian besar masih buruk 2. Masih minimnya jembatan yang menghubungkan antar desa 3. Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun 4. Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat 5. Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan 6. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi

Handwritten signature



		7. Masih minimnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik di daerah terpencil 8. Masih terbatasnya sumber air bersih dan air minum pedesaan
2	Belum terpenuhinya layanan transportasi yang berkualitas	1. Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah 2. Sarana komunikasi belum memadai di Daerah terpencil 3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan 4. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten

2. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan Daerah

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumber daya lokal Daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal Daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal Kabupaten Gunung Mas dikarenakan adanya keterbatasan dalam mengembangkan dan meningkatkan nilai jual produk unggulan Daerah, kemudian kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal Daerah.

a. Belum optimalnya pengembangan produk pertanian

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2017 merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 mencapai 4.709.762,0 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4.232.264,60 juta rupiah di tahun 2016 atau naik sebesar 11,28 persen.

h.



Berdasarkan pernyataan di atas dengan mulai melemahnya sektor pertanian, maka sektor ini membutuhkan perhatian khusus untuk diperbaiki dengan upaya-upaya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini cukup penting dikarenakan sektor pertanian arti luas ini merupakan tempat masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan produk mentah menjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal Daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarana prasarana pendukung aktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kendala dalam kegiatan petani/pekebun dan peternak untuk melakukan aktivitasnya. Pada umumnya petani, peternak dan pekebun berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga sumber daya manusia pertanian sebagaimana besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (setingkat SD/ sederajat). Dengan ini para petani, pekebun dan peternak mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan tanaman pangan. Mengetahui hal ini maka Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia petani dengan adanya penyuluhan-penyuluhan pada petani, pekebun dan peternak diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. Sehingga pengembangan produk lokal Daerah dalam sektor pertanian dapat dikembangkan dengan optimal.

b. Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata

Melihat potensi Daerah Kabupaten Gunung Mas sektor pariwisata di Kabupaten Gunung Mas cukup banyak. Namun Pemerintah Daerah belum mengembangkan sektor pariwisata sehingga objek-objek wisata berikut ini adalah potensi wisata di Gunung Mas. Berdasarkan informasi dan wawasan kondisi obyek pariwisata belum terkelola dengan optimal. Adapun Kabupaten Gunung Mas memiliki jumlah obyek wisata yang cukup banyak kurang lebih ada 26 spot obyek wisata.

4



Namun karena kurangnya pengelolaan yang representatif mengakibatkan daya tarik wisatawan dan investor kurang tertarik. Kemudian dengan terbatasnya akses menjadikan obyek-obyek wisata kurang diminati para wisatawan. Jika melihat data jumlah kunjungan wisatawan tahun 2013 sebanyak 3.961 tahun 2014 sebanyak 1100, tahun 2015 sebanyak 1250, tahun 2016 sebanyak 1600, dan tahun 2017 sebanyak 9457 pengunjung menunjukkan sektor pariwisata mulai berkembang cukup signifikan. Akan tetapi, kualitas sektor pariwisata dapat dilihat dengan lama tinggal pengunjung karena dengan lama tinggal dari wisatawan akan memberikan dampak yang besar bagi sektor lainnya, seperti perdagangan, perhotelan, industri kreatif, sektor jasa lainnya (travel). Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mengelola sektor pariwisata dengan sebaik mungkin sehingga tidak hanya pengunjung wisatawan namun investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gunung Mas.

c. Lambatnya pergerakan aktivitas perekonomian Daerah

Lambatnya pergerakan aktifitas perekonomian Daerah dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan untuk nilai tambah produk pertanian. Hal ini mengingat bahwa meningkatkan nilai tambah akan meningkatkan pendapatan secara signifikan, tidak hanya pendapatan Daerah yang bisa meningkat tetapi juga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Hal ini terlihat pada perkembangan pada nilai PDRB industri pengolahan cenderung menurun pada tahun 2016 sebesar 6,71 dan sebesar 4,09 pada tahun 2017.

Selain itu lambannya pergerakan ekonomi dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini terjadi karena pembangunan yang belum merata pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 4.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gunung Mas (Persen) Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,8	6,33	5,96	7,65
B	Pertambangan dan Penggalan	2,15	1,79	9,05	7,63
C	Industri Pengolahan	5,94	5,67	6,71	4,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,33	11,37	10,2	6,4

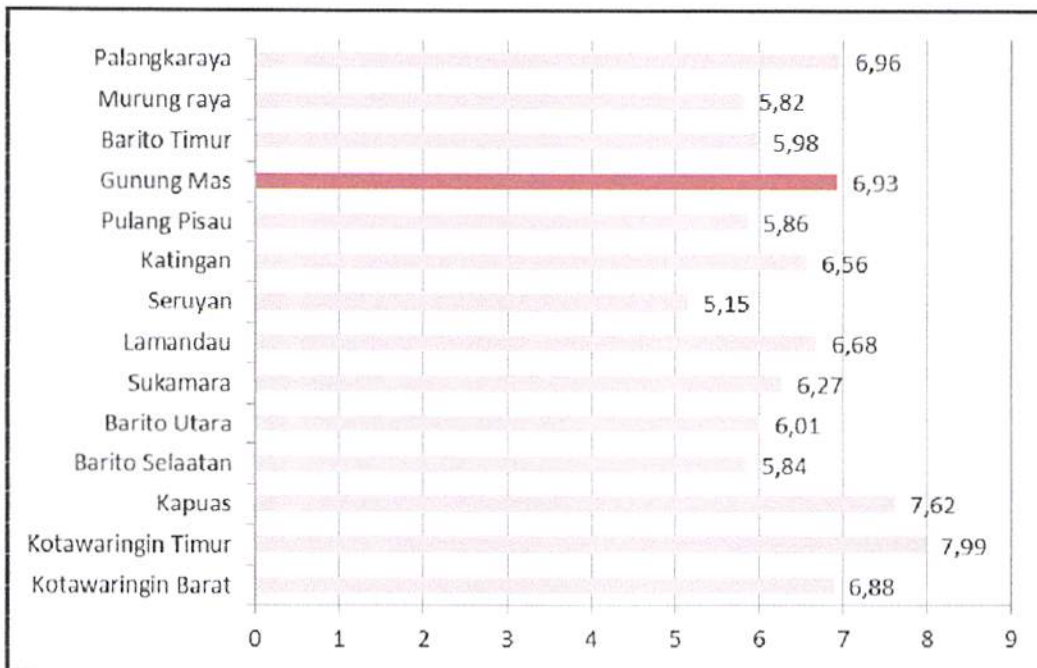




E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,24	8,56	13,39	-5,26
F	Konstruksi	9,67	9,64	9,19	8,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,24	8,65	7,81	8,11
H	Transportasi dan Pergudangan	4,34	7,7	6,87	6,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,34	7,23	7,49	5,58
J	Informasi dan Komunikasi	6,48	2,69	2,56	2,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,24	2,06	2,7	3,09
L	Real Estate	7,28	8,22	7,19	5,05
M	Jasa Perusahaan	1,84	6,4	4,66	4,46
N	Jasa Perusahaan	1,84	6,4	4,66	4,46
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76	12,51	8,8	6,99
P	Jasa Pendidikan	7,31	8,7	5,14	5,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	8,6	5,54	5,34
R	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77
S	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77
T	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77
U	Jasa Lainnya	5,6	7,52	6,3	3,77
Produk Domestik Regional Bruto		6,41	6,96	7	6,93

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gunung Mas berada pada urutan teratas ke 4 dari 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2017 dengan nilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93 persen. Kota pertama yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tertinggi adalah Kotawaringin Timur yaitu sebesar 7,99 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Seruyan yaitu sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 sebesar 6,96 persen.



Sumber: Kab. Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

Tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Secara umum, Pengeluaran konsumsi perkapita di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 sebesar 720.729 untuk kelompok makanan dan non makanan sebesar 461.081 juta rupiah.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.5 Pengeluaran Konsumsi Perkapita di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017



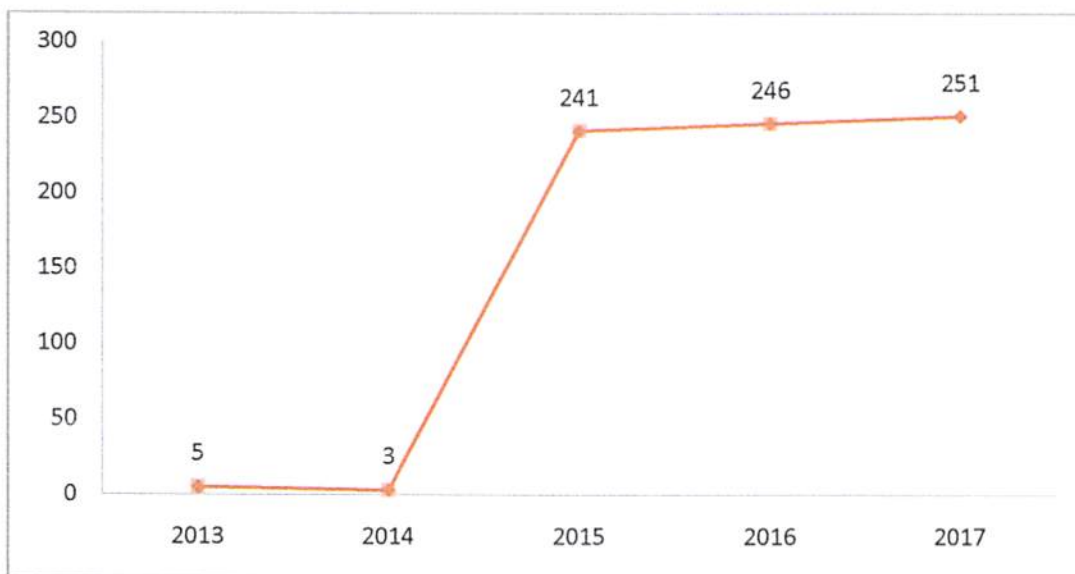
Salah satu pendukung perekonomian untuk mempercepat pengembangan ekonomi Daerah adalah melalui penanaman modal. Penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa potensi perekonomian kabupaten Gunung Mas yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemodal asing dan jumlah pemodal dalam negeri yang cukup banyak. Pemodal tersebut sebagian besar berinvestasi di sektor pertambangan. Jumlah pemodal asing lebih besar daripada pemodal dalam negeri yaitu 25 pemodal asing dan 19 pemodal dalam negeri.

Tabel 4.3.
Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2017

Jenis Penanaman Modal	Tahun	
	2016	2017
Penanaman Modal Asing	25	25
Penanaman Modal Dalam Negeri	19	19

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kabupaten Gunung Mas masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro Daerah. Pada tahun 2017, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Gunung Mas mencapai 251 unit dengan rincian seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.6 **Jumlah Koperasi di Kabupaten Gunung Mas**
Tahun 2013-2017



Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas jual beli terhadap konsumen menengah, kecil dan mikro. Berdasarkan bentuk perusahaan, jumlah perusahaan yang telah diterbitkan tanda daftar perusahaan pada tahun 2016, terbanyak adalah koperasi sebanyak 229 koperasi.

Tabel 4.4.
Jumlah Perusahaan Dagang di Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2013-2016

Type Badan Hukum	2013	2014	2015	2016
Perseroan Terbatas	4	12	12	12
CV/Firma	11	18	18	18
Koperasi	225	229	229	229
Perorangan	459	210	210	210
Lainnya	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Menindaklanjuti beberapa pernyataan permasalahan di atas, dipicu oleh beberapa akar masalah yang tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan dan akar masalah dari permasalahan pokok
“Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan Daerah”

Permasalahan		Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan produk pertanian	1. Masih rendahnya kapasitas kelompok tani 2. Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna 3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian 4. Masih rendahnya kapasitas para pelaku ekonomi kecil dan koperasi dalam mengakses perbankan dan pasar
2	Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata	1. Masih rendahnya kapasitas kelompok tani 2. Masih minimnya penggunaan teknologi tepat guna 3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian 4. Masih rendahnya kapasitas para pelaku ekonomi kecil dan koperasi dalam mengakses perbankan dan pasar 5. Objek pariwisata belum dikelola dengan baik 6. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana bagi wisatawan 7. Masih lemahnya daya saing investasi di bidang pariwisata

4



Permasalahan		Akar Masalah
3	Belum optimalnya pergerakan aktivitas perekonomian Daerah	1. Belum berkembangnya industri pengolahan produk unggulan Daerah 2. Kurang tertariknya investor untuk berinvestasi dibidang pertanian dan perkebunan 3. Masih rendahnya pendapatan masyarakat karena sebagian besar bekerja pada sektor yang berpenghasilan rendah 4. Belum optimalnya pengembangan pertanian menuju agroindustri dan agribisnis 5. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM 6. Masih lemahnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal Daerah 7. Terbatasnya kompetensi koperasi dan UMKMdalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal Daerah 8. Kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan Koperasi dan UMKM relatif rendah 9. Belum adanya regulasi yang tepat bagi PMDN/PMA 10. Rendahnya daya tarik investasi terutama berkaitan dengan birokrasi, pungutan liar, korupsi, efisiensi, dan manajemen pembangunan yang baik (<i>good governance</i>) 11. Kurangnya ketersediaan sumberdaya lahan dan infrastruktur yang memadai bagi calon investor 12. Masih rendahnya daya dukung Daerah dalam menciptakan peluang investasi 13. Masih adanya potensi gangguan terhadap stabilitas keamanan sosial 14. Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal potensi komoditi andalan.

f



3. Masih rendahnya kualitas daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan pembangunan Daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Gunung Mas berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian Daerah. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

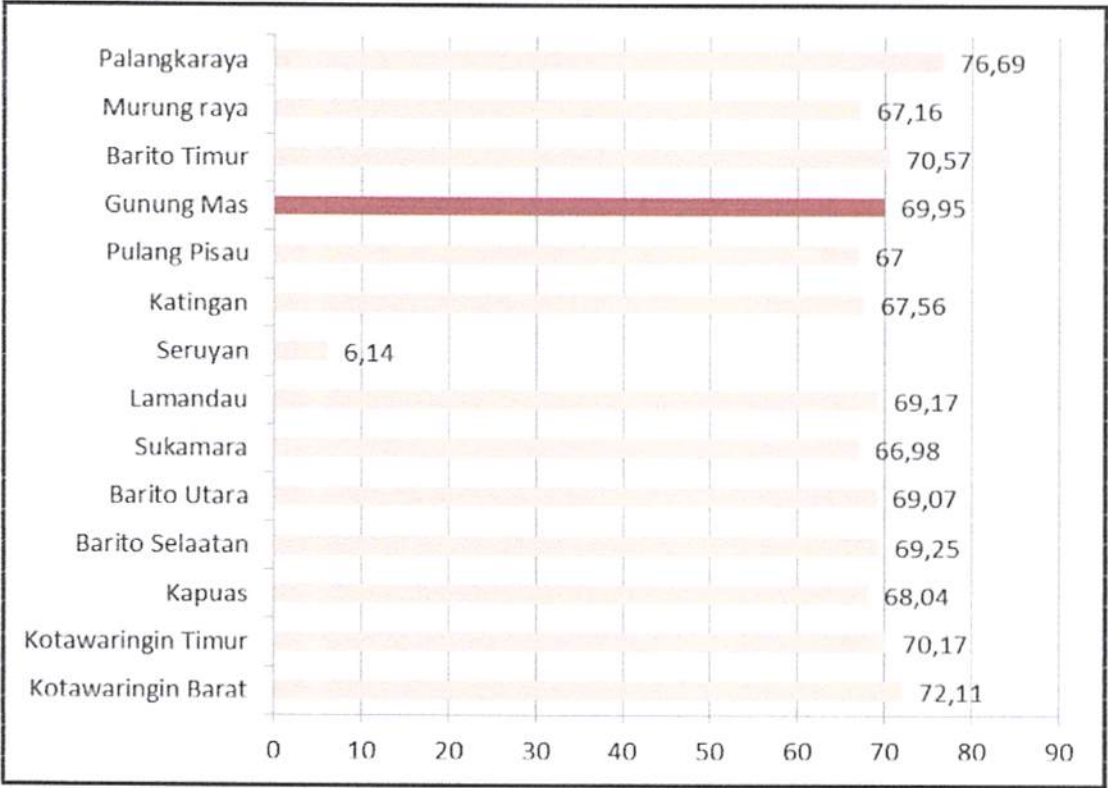
a. Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada Kabupaten Gunung Mas kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak sumber daya manusia di Daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk menempuh pendidikan adalah dikarenakan masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan, hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Gunung Mas.



Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa indikator makro yang mampu menunjukkan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah. Merujuk hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunung Mas dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 69,95 pada tahun 2017. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunung Mas di posisi ke 5 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, Kota Palangkaraya menduduki posisi pertama dengan nilai IPM sebesar 76,69. Sedangkan kabupaten Seruyan mempunyai nilai IPM paling rendah di kabupaten/kota di Kalimantan tengah yaitu sebesar 6,14 pada tahun 2017. Tabel berikut memperlihatkan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2017.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.7 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017

4



Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mencapai 8,96 yang meningkat dari tahun sebelumnya 8,94 di tahun 2016. Angka ini berarti bahwa penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 8,96 tahun atau Kelas 2 sekolah menengah pertama di semester dua.

b. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, Selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu pendistribusian tenaga medis belum mampu merata pada seluruh lapisan wilayah Kabupaten Gunung Mas, mempengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2017 sama dengan tahun sebelumnya yakni mencapai 70,02. tahun yang berarti setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2016 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 70 tahun. Perkembangan nilai Angka Harapan Hidup dari tahun 2013 sampai dengan 2017.





Tabel 4.6.
Indeks Pembangunan Manusia beserta komponen penyusunnya
Kabupaten Gunung Mas, 2013-2017

Unsur Pembentuk IPM	satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,73	8,74	8,93	8,94	8,96
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	10,65	10,82	11,44	11,74	11,75
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,5	69,59	69,89	70,02	70,02
Paritas daya beli	Rp	9.823	9.965	10.044	10.155	10.276
IPM	%	67,75	68,13	69,24	69,73	69,95

Sumber: Kab. Gunung Mas dalam angka 2018

c. Belum maksimalnya kualitas pembangunan berbasis gender

Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan berbasis gender. Dengan hal ini perlu perhatian Pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu pemberdayaan akan kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai pembangunan Daerah. Berdasarkan data yang ada prioritas penduduk pekerja Kabupaten Gunung Mas adalah laki-laki, jika diperbandingkan nilainya mempunyai jarak yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan gender yang relatif cukup kuat. Sehingga perempuan-perempuan Kabupaten Gunung Mas tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal peningkatan produktivitas diri. Melihat hal ini prioritas Pemerintah adalah melakukan penanganan dan pencegahan serta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional konflik kekerasan menjadi saat ini.

f.



Tabel 4.7.
Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut jenis kelamin dan status pekerjaan utama di Kabupaten Gunung Mas (%)

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	5.234	7.030	12.264
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	7.682	2.205	9.887
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.332	75	4.407
Buruh/Karyawan/Pegawai	14.883	4.982	19.865
Pekerja bebas	2.762	193	2.995
Pekerja keluarga/tidak dibayar	2.240	7.262	9.502

Dengan melihat tabel diatas perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perempuan yang bekerja mempunyai produktifitas yang relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak, rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak, minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan. Dengan ini diperlukan fasilitasi yang lebih dari Pemerintah Daerah untuk mengajak dan memberdayakan perempuan agar lebih memiliki kegiatan produktif. Sehingga dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan akan memberikan sumbangsih dalam mencetak generasi-generasi penerus yang berkualitas.

Pembangunan yang merata keseluruh Daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan Pemerintah Daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera. Permasalahan pokok ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah 27.700 orang,

4.



sedangkan yang terendah adalah Kota Sukamara dengan 1.990. Kemiskinan menjadi permasalahan semua Daerah, sehingga diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan pembaharuan sosial ekonomi untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.8 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (Ribuan)

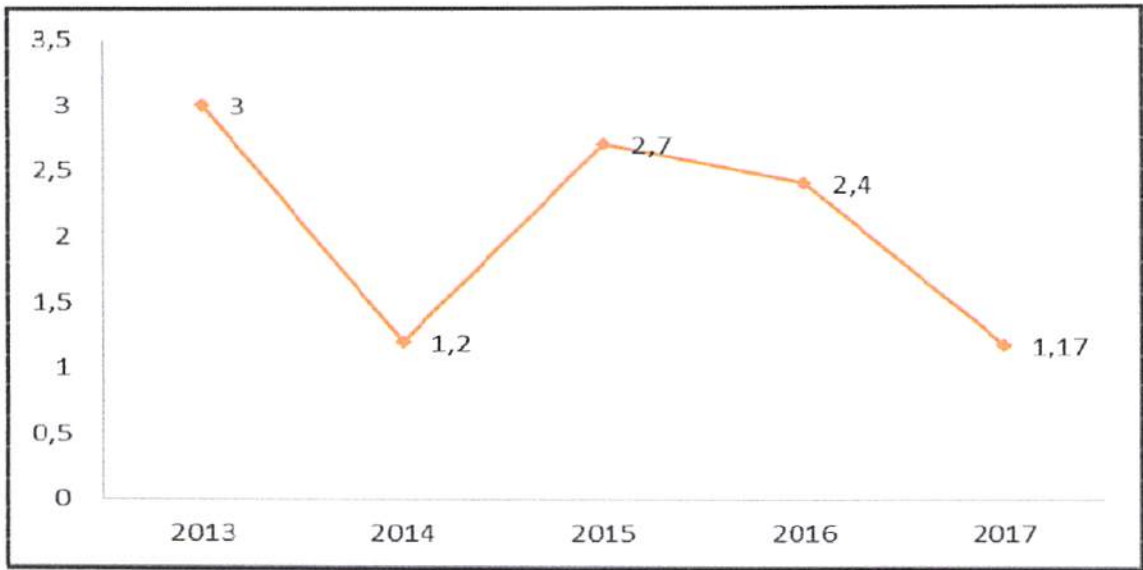
b. Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja

Salah satu faktor yang cukup kuat dalam memengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tentang pekerjaan. Kualitas daya saing tenaga kerja sangat mempengaruhi bagaimana, macam dan jenis pekerjaan masyarakat yang kemudian akan memberi dampak pada penghasilan masyarakat dan kesejahteraannya. Melihat hal tersebut maka kualitas daya saing tenaga kerja merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh Pemerintah bersama masyarakat agar masyarakat Kabupaten Gunung Mas dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi terbuka Kabupaten Gunung Mas mencapai 3 persen kemudian turun di tahun 2014 sebesar 1,2 persen.

Handwritten signature



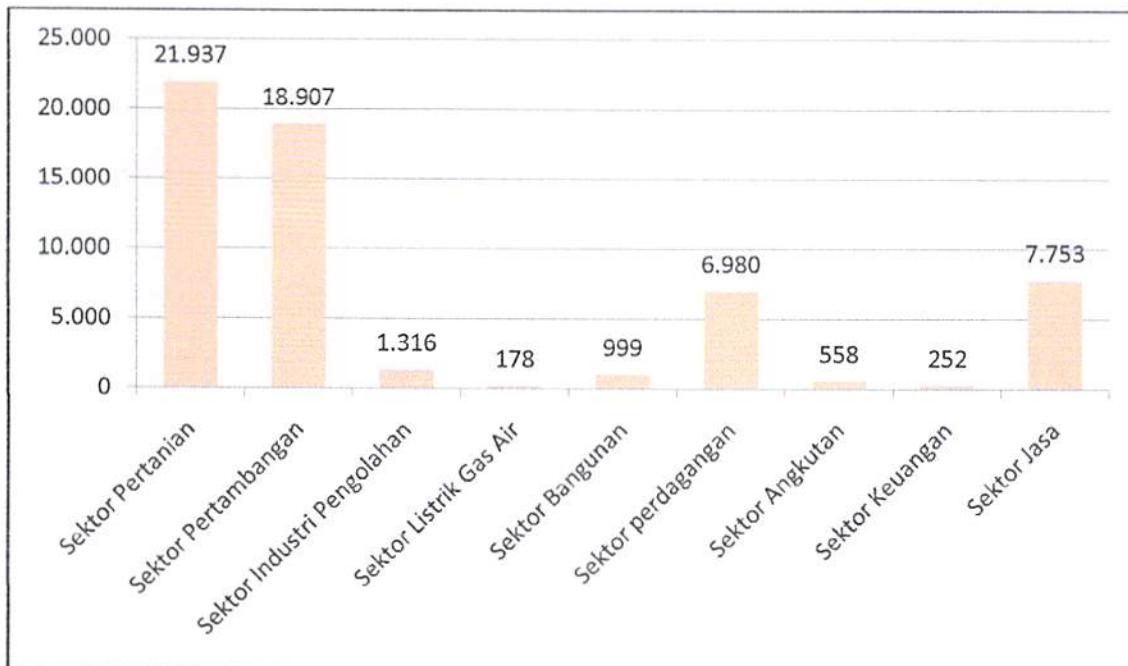
Namun di tahun 2015 Tingkat pengangguran terbuka naik kembali hingga 2,7 persen kemudian turun hingga mencapai angka 1,17 di tahun 2017.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

**Gambar 4.9 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2017**

Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Gunung Mas masuk kategori rendah karena hanya 1,17 persen penduduk di atas 15 tahun yang tidak bekerja. Mayoritas penduduk Gunung Mas bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu sebesar 21.937 penduduk berusia 15 tahun ke atas dan sektor pertambangan galian sebesar 18.907 penduduk. Sedangkan sektor listrik, air, dan gas mempunyai jumlah yang paling rendah sebesar 178 penduduk.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2018

Gambar 4.10 Jumlah Penduduk Bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2017

Dengan berbagai penjabaran permasalahan diatas, beberapa akar masalah yang memicu adanya permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Rumusan Permasalahan
“Masih rendahnya kualitas daya saing SDM dan Kesejahteraan Masyarakat”

Permasalahan		Akar Masalah
1	Masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Terbatasnya pendidikan keterampilan berbasis keunggulan lokal 2. Masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan, dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah 3. Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan 4. Masih belum meratanya penyebaran guru antar kecamatan 5. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta 6. Rendahnya kualitas manajemen pendidikan pada tiap sekolah 7. Masih rendahnya partisipasi sekolah pada anak usia dini (PAUD).





Permasalahan		Akar Masalah
		8. Rendahnya minat baca masyarakat karena belum tertanamnya budaya gemar membaca 9. Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan	1. Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan 2. Masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 3. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat berpendapatan rendah 4. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah 5. Cakupan Layanan asuransi/ jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal 6. Kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 7. Distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata 8. Kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit 9. Belum optimalnya promosi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
3	Belum maksimalnya pembangunan berbasis gender	1. Masih rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak 2. Rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak 3. Minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan 4. Rendahnya komitmen terhadap Kota Layak Anak 5. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai peserta keluarga berencana
4	Belum optimalnya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan	1. Belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS 2. Relatif tingginya masyarakat penyandang masalah sosial 3. Bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin belum optimal dan tepat sasaran



Permasalahan		Akar Masalah
5	Masih rendahnya kualitas daya saing tenagakerja	1. Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil 2. Terbatasnya lapangan pekerjaan belum mampu menampung jumlah pencari kerja 3. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja 4. Masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru 5. Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam memasuki dunia usaha 6. Masih tingginya ketergantungan usia produktif

4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: akuntabilitas, transparansi, prediktibilitas, dan partisipasi. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel, pelayanan publik yang belum berkualitas, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur Pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peranserta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur Pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat.

4



Dari masalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu:

a. Masih Rendahnya kualitas layanan publik

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Gunung Mas adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur Daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah serta masih sangat rendahnya skil dan kemampuan Aparatur Sipil Negara di bidang tertentu serta belum terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, pelayanan publik masih sangat kurang terutama yang berhubungan kesehatan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana dan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Hal ini terlihat dengan jumlah kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gunung Mas meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, terdapat 48 persen penduduk yang sudah memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Kemudian masih terbatasnya implementasi pelaksanaan elektronik pemerintahan (*E-Government*) dan penerapan penggunaan sarana dan prasarana informatika di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini menjadi salah satu pemicu lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga masih lemah.

b. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan kinerja aparatur Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun ke depan.



Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur Pemerintah Daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan Perda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Gunung Mas yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Perangkat Daerah. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumber daya aparatur Daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian belum optimalnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan.

Terkait dengan kinerja sumber daya manusia aparatur, melihat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekarang ini belum bekerja dengan maksimal. Selain itu distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan belum sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Daerah secara bertahap memperbaiki kondisi sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, loka karya (*workshop*), dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur Daerah yang belum optimal. Di samping itu, penataan administrasi aset Daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih profesional.



c. Belum optimalnya pengelolaan keuangan Daerah

Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan Daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Gunung Mas belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Gunung Mas belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Gunung Mas beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan adalah pengelolaan aset yang masih belum optimal dan sistem penatausahaan keuangan Daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang handal diharapkan Kabupaten Gunung Mas mampu memanfaatkan sebaik-baiknya segala aset Daerah untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas, maka akar masalah pemicu dari permasalahan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik”

Permasalahan		Akar Masalah
1	Masih Rendahnya kualitas layanan publik	1. Belum adanya standar, pedoman yang jelas dalam layanan publik 2. Masih terbatasnya kemampuan profesional dan etos kerja aparatur di Daerah 3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 4. Manajemen, penataan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang kurang optimal 5. Masih terbatasnya implementasi pelaksanaan elektronik pemerintahan (<i>E- Government</i>) di lingkungan Pemerintah Daerah 6. Masih rendahnya sarana dan prasarana informatika



Permasalahan		Akar Masalah
2	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan belum optimal 2. Masih belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagaimana yang diharapkan 3. Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 4. Distribusi dan penataan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan 5. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga/instansi Pemerintah
3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan Daerah	1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif 2. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa 3. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4. Belum optimalnya pemahaman aparatur Desa terhadap ketentuan peraturan perundangan mengenai desa

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali selain itu masih tingginya kawasan hutan berstatus akses terbuka (*open access*) juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Namun, disisi lain muncul permasalahan baru, yakni masih terjadi penebangan kayu dan pembakaran untuk dijadikan lahan pertanian dan peruntukan lainnya.



Belum ditetapkan zonasi untuk pemanfaatan hutan menyebabkan terjadinya pembalakan liar yang merusak hutan sehingga hutan tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dan menyebabkan banjir. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan masalah persampahan, khususnya berkaitan dengan cara-cara penanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum ada. Permasalahan lainnya mencakup upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumber daya dan rehabilitasi tambang-tambang rakyat, sumber daya air, konservasi biodiversitas secara terpadu. Di samping itu, terdapat tantangan yang dihadapi saat ini yakni terkait dengan upaya mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi yang dikaji dan dianalisa, maka akar permasalahan dari permasalahan Daerah “Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup” di Kabupaten Gunung Mas dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup”

Permasalahan		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	1	Kualitas penanganan sampah dan sanitasi masih rendah
		2	volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir mengakibatkan pencemaran aliran sungai
		3	Adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan
		4	Belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup
		5	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup





Permasalahan		Akar Masalah	
		6	Lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan
		7	Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
		8	Belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu
		9	Masih tingginya tingkat pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		10	Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur untuk menjaga hutan
		11	Perambahan liar untuk tujuan pembukaan lahan pertanian/ perkebunan
		12	Rendahnya pengetahuan teknologi ramah lingkungan
		13	Rendahnya kesadaran masyarakat dan perusahaan tambang

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.



4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarukan yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Gunung Mas antara lain pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), ancaman krisis ekonomi global, globalisasi ekonomi dunia,antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, demokratisasi, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

a. **Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*)**

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk mensejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14



indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 23. Rumusan SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 23 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;



9. membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Gunung Mas, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).





b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena “*Brexit*” atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Gunung Mas yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia tidak bisa lagi mengelak bahwa sebagai bagian dari dunia internasional mau tidak mau harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salahsatu anggotanya. Kebijakan-kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara-negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah



kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ke tingkat Daerah termasuk di Kabupaten Gunung Mas, maka ketika merumuskan isu strategis Kabupaten Gunung Mas itulah patut memperhatikan dan memperhitungkannya sehingga masyarakat ke depannya akan siap beradaptasi.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari Pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi perubahan iklim global (*global warming*). Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek perubahan iklim global (*global warming*) dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan hasil yang signifikan.



Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat atau produsen sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terrealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

f. Demokratisasi

Demokratisasi saat ini sudah menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Proses demokratisasi harus diikuti oleh regulasi dan tatanan yang dapat melindungi semua orang, karena dampak demokratisasi tidak selalu baik jika tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Namun demikian prosesnya harus dilakukan secara baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang justru tidak sesuai dengan makna demokratisasi itu sendiri. Penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil di Indonesia menjadi contoh banyak negara berkembang untuk menerapkan pola dan cara-cara Indonesia menjalankan proses demokratisasi.

Indonesia sampai saat ini terhitung sebagai negara yang sukses dalam melakukan proses demokratisasi sehingga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pencapaian itu terjadi karena prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai di level nasional, regional maupun pada tingkat lokal melalui kebijakan otonomi Daerah.





g. **Hak Asasi Manusia (HAM)**

Secara alamiah sebenarnya setiap manusia begitu terlahir di dunia telah memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Delapan belas anggota PBB kemudian membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Pada tanggal 1 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris keluarlah *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 3 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penerapan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2.2. Isu Atau Kebijakan Nasional

a. **Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam masa penyusunan Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024 memiliki tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Tema ini mengarah pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap terakhir yakni tahapan keempat “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing”.



Dalam perwujudan Indonesia pada tahun 2045, maka dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia

a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pada pelayanan dasar dan perlindungan sosial memiliki arah kebijakan:

- 1) memperluas pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah;
- 2) memperkuat intervensi spesifik dan penurunan permasalahan gizi (*stunting*) yang terintegrasi pada lokus prioritas;
- 3) memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif;
- 4) mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan memberikan prioritas pada anak dari keluarga kurang mampu dan penanganan anak tidak sekolah;
- 5) memperkuat penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan abad-21 (*higher-order thinking skills*);
- 6) memperkuat sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk menuntaskan akses universal dan pencapaian akses aman;
- 7) memperbaiki skema pendanaan, pelaksanaan, dan kelembagaan SJSN; dan
- 8) meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

b. Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pada sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/ industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana);
- 2) memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi;





- 3) meningkatkan akses dan keterampilan kaum muda dalam berwirausaha;
- 4) memperluas akses dan skema pembiayaan bagi wirausaha;
- 5) mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial;
- 6) meningkatkan kemudahan berusaha (perijinan, investasi, insentif, dan lain-lain) melalui OSS (*Online Single Submission*);
- 7) memperkuat ketahanan budaya melalui pengembangan seni, nilai tradisi, pendidikan karakter, bahasa, dan perfilman;
- 8) memperkuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi sebagai pengungkit produktivitas melalui pengembangan bidang riset strategis, penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan *technopreneur*;
- 9) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade;
- 10) menyediakan fasilitas dan regulasi kerja yang ramah perempuan; dan
- 11) meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal.

2. Pembangunan Ekonomi

a. Pangan dan Pertanian

Pada pangan dan pertanian ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- 2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan perikanan;
- 3) mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktivitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan;
- 4) meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya ikan;
- 6) penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen;



- 7) optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi;
- 8) penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi; dan
- 9) pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.

b. Energi, Mineral dan Pertambangan

Pada energi, mineral dan pertambangan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan produksi, cadangan minyak dan gas serta batu bara;
- 2) akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- 3) pemanfaatan batu bara dalam negeri yang stagnan di bawah 30 persen dari total produksi;
- 4) penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
- 5) optimalisasi distribusi dan pemanfaatan minyak dan gas dalam negeri;
- 6) Peningkatan efisiensi dan konservasi energi;
- 7) akselerasi peningkatan nilai tambah migas, batu bara dan mineral dalam negeri;
- 8) pertambangan berkelanjutan;
- 9) meningkatkan kapasitas kilang dan pembangkit listrik; dan
- 10) peningkatan dan pengembangan listrik.

c. Kelautan dan Kemaritiman

Pada kelautan dan kemaritiman ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) penyelarasan tata ruang darat dan laut;
- 2) pengembangan klaster industri perikanan;
- 3) pemantapan sarana prasarana perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin;
- 4) Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 lokasi;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan produk kelautan, seperti bioteknologi (*marine bioproduct*);





- 6) pengembangan konektivitas laut;
- 7) pengembangan *sustainable fisheries*;
- 8) pengembangan kawasan konservasi perairan; dan
- 9) penanggulangan pencemaran dan sampah laut.

d. Pariwisata

Pada pariwisata, arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara;
- 2) percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi unggulan;
- 3) peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan;
- 4) peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya lokal;
- 5) peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi;
- 6) penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran; dan
- 7) *meeting, incentives, conference, exhibition (MICE)*, wisata minat khusus (*adventure, cruise, heritage, halal*), dan *cross border tourism*.

e. Ekonomi Kreatif dan Digital

Pada ekonomi kreatif dan digital ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan bakat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kreatif khususnya pada generasi muda, yang didukung penguatan seni dan budaya, serta kreativitas konten sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif;
- 2) pengembangan infrastruktur dan ruang kreatif yang didukung kemudahan berusaha dan penyediaan insentif bagi inovasi dan pendidikan dan pelatihan vokasi;
- 3) peningkatan akses pembiayaan dan investasi yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;





- 4) peningkatan dukungan riset dan akses informasi melalui kerjasama *triple helix* (Pemerintah, akademisi, dan swasta) yang didukung peningkatan penerapan HKI;
 - 5) peningkatan kualitas tata kelola usaha kreatif;
 - 6) perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri;
 - 7) pengarusutamaan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi di berbagai sektor layanan publik; dan
 - 8) penguatan industri film, animasi, *games*, dan musik, yang didukung peningkatan daya saing kuliner, fashion dan kriya.
- f. Industri Manufaktur
- Pada industri manufaktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia dan tata kelola usaha;
 - 2) inovasi melalui kerja sama *triple helix*;
 - 3) investasi yang berorientasi GPN, teknologi dan ekspor;
 - 4) peningkatan produktivitas dan kualitas produksi sektor primer;
 - 5) ketersediaan infrastruktur, energi dan logistik;
 - 6) peningkatan manfaat *Free Trade Agreement* (FTA) dan promosi ekspor;
 - 7) peningkatan manufaktur dan industri daur ulang;
 - 8) pemanfaatan pengungkit keunggulan Kompetitif seperti industri 4.0, ekonomi kreatif dan digital;
 - 9) Optimasi Permintaan seperti pasar domestik, industri halal, *healthy and leisure lifestyle*;
 - 10) perkuatan industri hulu, terutama di sub sektor kimia dan logam; dan
 - 11) Peningkatan ekspor subsektor unggulan, seperti:
 - a) Sub-sektor berbasis teknologi seperti otomotif, mesin dan peralatan elektronik;
 - b) Sub-sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki;
 - c) Sub-sektor berbasis sumber daya alam seperti makanan minuman, pengolahan ikan; dan
 - d) CPO dan turunannya.

g



3. Pembangunan Infrastruktur

Pada pembangunan infrastruktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak;
- 2) optimalisasi tampungan terbangun untuk akselerasi penyediaan air baku dan air minum;
- 3) peningkatan akses sanitasi aman;
- 4) penanganan terpadu keselamatan transportasi;
- 5) pengelolaan banjir terpadu di lokasi pusat pertumbuhan ekonomi;
- 6) integrasi pelabuhan dan kawasan industri (termasuk *logistic centre*);
- 7) konektivitas laut melalui integrasi pengelolaan pelabuhan, efisiensi jaringan pelayaran, dan pengembangan platform e-logistik;
- 8) konektivitas transportasi multimoda pada *hinterland* pelabuhan;
- 9) pengembangan konektivitas transportasi udara;
- 10) peningkatan peran transportasi massal;
- 11) pengelolaan air baku, air tanah, air minum, dan sanitasi terpadu;
- 12) penataan kota berkelanjutan;
- 13) pemanfaatan TIK dalam pengembangan infrastruktur perkotaan;
- 14) Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK;
- 15) pemanfaatan TIK untuk layanan publik (bantuan sosial, kesehatan [*telemedicine*], pendidikan [*e-learning*], pertanian dan perikanan);
- 16) pemanfaatan TIK untuk sektor industri dan perdagangan; dan
- 17) penerapan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat TIK untuk mendukung industri manufaktur lokal.

4. Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan

Pada pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) penguatan implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi keluar, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA);
- 2) penguatan kepemimpinan pada forum internasional dan regional;
- 3) mengoptimalkan peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB;
- 4) penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam;

4



- 5) memperkuat aktualisasi ideologi negara;
- 6) penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antarnegara;
- 7) penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi;
- 8) penguatan peran serta *stakeholders* dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip *No One Left Behind*), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas aparatur sipil negara;
- 9) penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan *restorative justice*; dan
- 10) penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

5. Pembangunan Kewilayahan

Pada pembangunan kewilayahan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
- 2) peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya;
- 3) peningkatan konektivitas antar-wilayah;
- 4) optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN);
- 5) peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia aparatur);
- 6) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal terutama di daerah tertinggal;
- 7) peningkatan inovasi pemerintahan daerah;
- 8) peningkatan kemudahan perizinan;
- 9) pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 10) penataan pola hubungan Pusat dan Daerah;
- 11) peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan; dan
- 12) penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.



Pada Rancangan Teknokrat RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat arah kebijakan kewilayahan Kalimantan 2020-2024. Pada perencanaan pembangunan wilayah Kalimantan. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah berusaha meningkatkan performa dan efisiensi kinerja dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024 terdapat *exercise* strategi tata kelola pemerintahan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. mendorong kerja sama antar daerah dan terbentuk serta beroperasinya kelembagaan regional pada kawasan metropolitan (Banjarbakula), KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Landak, KI Batulicin dan KI Jorong;
- b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan prioritas anggaran pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan (gizi buruk dan pelayanan kesehatan bayi);
- c. meningkatkan kualitas belanja dengan meningkatkan belanja langsung dan mengurangi belanja pegawai;
- d. meningkatkan proporsi belanja pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan) minimal 30 persen terhadap total belanja daerah tanpa belanja pegawai;
- e. meningkatkan kualitas aparatur sipil negara terutama kompetensi sesuai bidang pertambangan dan industri manufaktur;
- f. memperbaiki distribusi aparatur sipil negara bidang pelayanan dasar kesehatan (tenaga medis) dan Pendidikan (tenaga guru dan pendidik);
- g. mendorong kolaborasi multipihak (Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas), antara lain melalui kewirausahaan, dan keterkaitan aktivitas ekonomi terutama di perdesaan non tertinggal;
- h. meningkatkan iklim investasi melalui pengurangan Perda (aturan) yang berimplikasi pada ekonomi berbiaya tinggi serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan *Online Single Submission* (OSS);



- i. meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di level pemerintahan Daerah (Opini keuangan BPK, Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
- j. meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran; dan
- k. mendorong tercipta dan dilaksanakannya inovasi daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

Tabel 4.11.
Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2019-2024

Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Kalimantan					
Indikator			Sasaran 2020	Perkiraan 2019	Capaian 2018*
Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun)			4,08	4,10	3,45
Persentase Penduduk Miskin (persen)			4,06	5,51	5,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)			4,49	5,10	4,83

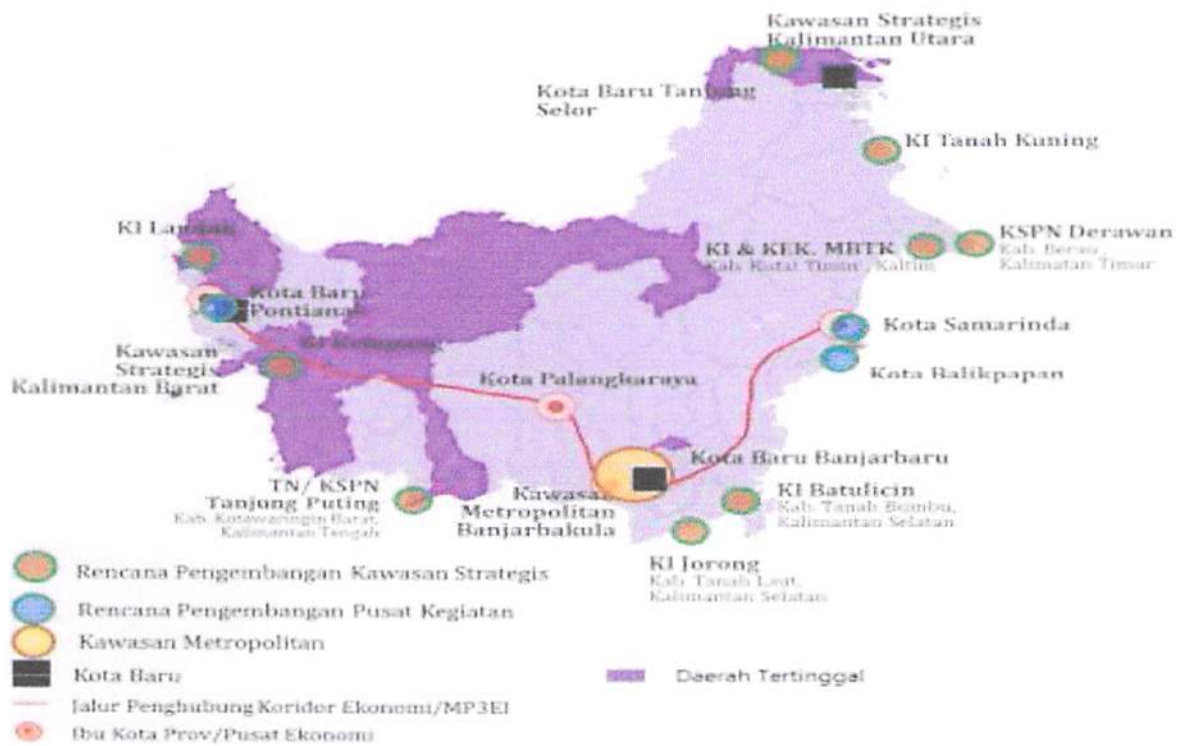
*) capaian rata-rata sampai triwulan II untuk LPE 2018
Sumber: BPS

Secara rata-rata setiap 1 (satu) persen pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan selama 2008-2017* mengurangi:

- a. tingkat kemiskinan sebesar 1,20 persen per tahun;
- b. tingkat kemiskinan 0,10 poin pertahun; atau
- c. jumlah penduduk miskin sebesar 8 ribu pertahun.

No	Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan
1.	Hilirisasi perkebunan sawit, serta pertambangan nikel dan batu bara
2.	Pembangunan jalur rel kereta api Kalimantan
3.	Pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan kijing
4.	Pengembangan kawasan perbatasan
5.	Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan pariwisata





Gambar 4.11 Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan

Pertimbangan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan ekonomi wilayah ini menjadi penompang utama kinerja perekonomian nasional;
- b. perputaran kegiatan ekonomi daerah akan memperluas kesempatan kerja;
- c. ekonomi daerah yang bergerak dan terus tumbuh akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin;
- d. perputaran kegiatan ekonomi di daerah akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah, dan koperasi; dan
- e. daerah dengan ekonomi maju, berkembang dan berdaya saing, serta masyarakat yang produktif akan menjadi fondasi yang solid untuk pengembangan ekonomi daerah.

4.



4.2.3. Isu Atau Kebijakan Daerah

Isu strategis daerah (Provinsi dan Kabupaten) merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis Daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Gunung Mas antara lain telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025.

a. Telaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (2016-2021)

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan-kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa diacu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki visi pembangunan **“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**. Untuk mencapai visi maka dilakukan upaya-upaya yang disebut misi. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (2016-2021) adalah sebagai berikut:

- a. pemantapan tata ruang wilayah Provinsi;
- b. pengelolaan infrastruktur;
- c. pengelolaan sumber daya air, pesisir, dan pantai;
- d. pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan
- e. pemantapan tata kelola Pemerintah Daerah;
- f. peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pariwisata;
- g. pengelolaan lingkungan hidup & sumber daya alam; dan
- h. pengelolaan pendapatan Daerah.



b. Telaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar Kabupaten Gunung Mas

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan daerah lainnya maka perlu dilihat kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah sekitar Kabupaten Gunung Mas. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas adalah Kabupaten Murung Raya, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan. Telaahan dokumen RPJMD daerah lainnya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Visi dan Misi RPJMD Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya

RPJMD	VISI	MISI	
RPJMD Kota Palangkaraya Tahun 2018-2023	“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”	1	Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
		2	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)
		3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
Kabupaten Katingan periode 2018-2023	KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum.
		2	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.
		3	Memantapkan pembangunan perdesaan.
		4	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender.



RPJMD	VISI	MISI	
		5	Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.
		6	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
		7	Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.
Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023	TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELLAUI PEMBANGUNANBERBASIS PERDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS TAHUN 2030	1	Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.
		2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.
		3	Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.



RPJMD	VISI	MISI
		4 Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah
		5 Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

c. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan yang ingin diwujudkan, serta kemutlakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

GUNUNG MAS YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN ADIL

Visi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi di atas dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Misi**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Daerah jangka panjang, yaitu:

4



1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), tingkat kesehatan yang semakin meningkat, semakin berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan Daerah.

2. Membuka isolasi Daerah

Pembukaan isolasi Daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar Daerah. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan, meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan Pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

3. Memperkuat Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian Daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar Daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar Daerah yang kokoh. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan,

f



sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar dalam mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan Daerah secara berkelanjutan, dan mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kabupaten Gunung Mas Yang Lestari

Melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragamanhayati sebagai modal dasar pembangunan.

5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan

Perwujudan dari misi ini adalah meningkatkan pembangunan Daerah dalam mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Kapasitas Pemerintah Daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah, kapasitas kelembagaan Pemerintah



Daerah, kapasitas keuangan Pemerintah Daerah, serta kapasitas lembaga legislatif Daerah.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut ditempuh berbagai prioritas dan arah pembangunan sebagai berikut:

➤ **Prioritas dan arah pembangunan RPJMD ke-4 (2018-2023)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari, terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat, serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas. Daya saing perekonomian Daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama Pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.



4.2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan Perda Nomor 8 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034. Penetapan Perda ini bertujuan untuk terbukanya isolasi Daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang maju berbasis pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Rumusan RTRW Kabupaten Gunung Mas memiliki berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas:

a. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

strategi kebijakan ini adalah:

1. membuka isolasi ke daerah yang belum terlayani sarana dan prasarana transportasi secara baik;
2. mengembangkan Lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
3. mengembangkan potensi sumber daya lahan;
4. mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan
5. mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis Pertanian dan pertambangan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.

b. Peningkatan peluang investasi.

Strategi kebijakan ini adalah:

1. memberikan insentif penanaman modal di kawasan potensial untuk investasi;
2. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan investasi; dan
3. memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha.



c. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Strategi kebijakan ini adalah:

1. membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
2. menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan;
3. mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi.

d. Menjaga keseimbangan lingkungan.

Strategi kebijakan ini adalah:

1. mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya;
2. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan;
3. melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung; dan
4. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi.

e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi kebijakan ini adalah:

1. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
4. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.



Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten. Sistem pusat pelayanan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL

Sistem perkotaan kabupaten Gunung Mas yaitu:

- b. PPK dan PPL yang ditetapkan Kabupaten, yaitu terdiri dari:

1. PPK meliputi:

- a) Kota Tewah;
- b) Kota Tumbang Talaken;
- c) Kota Sepang Simin;
- d) Kota Jakatan Raya;
- e) Kota Tumbang Rahuyan;
- f) Kota Tehang;
- g) Kota Kampuri; dan
- h) Kota Rabambang.

2. PPL meliputi:

- a) Tumbang Miri;
- b) Tumbang Marikoi; dan
- c) Tumbang Napoi.

Rencana Sistem jaringan prasarana utama Kabupaten meliputi:

- a. sistem jaringan prasarana transportasi, meliputi:
 1. sistem transportasi darat;
 2. sistem transportasi udara; dan
 3. sistem transportasi perkeretaapian.
- b. Sistem jaringan prasarana energi, meliputi:
 1. pembangkit tenaga listrik; dan
 2. jaringan prasarana energi.
- c. sistem jaringan prasarana telekomunikasi, meliputi:
 1. penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
 2. penyelenggaraan jaringan satelit.



- d. sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. wilayah sungai;
 - 2. danau/waduk;
 - 3. daerah irigasi;
 - 4. prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - 5. prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- e. sistem jaringan prasarana lingkungan, meliputi:
 - 1. sistem jaringan air limbah; dan
 - 2. sistem jaringan persampahan.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi:

- a. Rencana kawasan lindung.

Kawasan lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh Provinsi serta kawasan lindung sesuai perkembangan yang terdapat di wilayah Kabupaten. Kawasan lindung tersebut meliputi:

 - 1. kawasan hutan lindung;
 - 2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3. kawasan perlindungan setempat;
 - 4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - 5. kawasan rawan bencana alam.
- b. Rencana kawasan budidaya.

Kawasan Budidaya tersebut terdiri atas:

 - 1. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2. kawasan peruntukan pertanian;
 - 3. kawasan peruntukan pertambangan;
 - 4. kawasan peruntukan permukiman;
 - 5. kawasan peruntukan industri;
 - 6. kawasan peruntukan wisata; dan
 - 7. kawasan peruntukan lainnya.



Rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Gunung Mas meliputi:

- a. Kawasan Strategis Provinsi, meliputi:
 1. rumah adat betang di Tumbang Anoi; dan
 2. kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten, meliputi:
 1. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
 2. kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 3. kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, memuat:

- a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
- b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten.



Tabel 4.13
Sandingan/Keselarasan Program RTRW dan Program RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJMD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
	Perwujudan Rencana Struktur Ruang						
I	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman						
1	Peningkatan fungsi PKL Kuala Kurun	Penyusunan tata ruang yang rinci Kota Kuala Kurun	Kota Kuala Kurun	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Penataan perkantoran pemerintahan		Program Perencanaan Tata Ruang			
		Peningkatan Bandar Udara Kuala Kurun		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan Dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Peningkatan fasilitas terminal tipe B		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Peningkatan kapasitas PDAM		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum *)			
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
		Pengembangan RSUD		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			
		Pembangunan Gedung OR dan kesenian		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			
		Pembangunan Pasar Kuala Kurun		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan Etalase Hasil SDA Kabupaten		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan Centra Indutrsi rumah tangga		Program pengembangan industri kecil dan menengah			
		Pembangunan Pusat Budaya					
		Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba		Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah *)			
		P'engembangan jalan bantaran sungai Kahayan		Program pembangunan jalan dan jembatan			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/			



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
				puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pengembangan pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan Industri pertanian		Program penataan struktur industri			
2	Peningkatan Fungsi PPK Tumbang Telaken	Penyusunan RDTR	Tumbang Telaken	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan Permukiman terintegrasi rencana KTM Bereng Belawan		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pengembangan Dermaga Takaras		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transmigrasi		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan Industri pertanian		Program penataan struktur industri			
		Pembangunan sekolah pertanian					
3	Peningkatan Fungsi PPK Tewah	Penyusunan RDTR	Tewah	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Peningkatan Dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Penataan kawasan perikanan budidaya		Program pengembangan budidaya perikanan			
		Pengembangan sekolah menengah					
		Pembangunan Industri Pengolahan ikan		Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			
		Peningkatan pusat		Program peningkatan efisiensi			

4



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		perdagangan		perdagangan dalam negeri			
		Peningkatan Puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Perbaikan Daerah irigasi		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Pembangunan Prasarana Persampahan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
4	Peningkatan Fungsi PPK Sepang Simin	Penyusunan RDTR	Sepang Simin	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan/pengembangan pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan perumahan rakyat		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan jalan akses ke jalan poros		Program pembangunan jalan dan jembatan			
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas rawat inap		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
5	Peningkatan Fungsi PPK Jakatan Raya	Penyusunan RDTR	Jakatan Raya	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan puskesmas		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transmigrasi		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
6	Peningkatan Fungsi PPK Kampuri	Penyusunan RDTR	Kampuri	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			

9



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan terminal		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan industri pengolahan pertanian		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
7	Peningkatan Fungsi PPK Tumbang Rahuyan	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Rahuyan	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan sekolah menengah atas					
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
8	Peningkatan Fungsi PPK Tehang	Penyusunan RDTR	Kota Tehang	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan Sekolah Menengah Atas					
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
9	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Miri	Penyusunan RDTR	Tumbang Miri	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan terminal Tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			





No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
10	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Marikoi	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Marikoi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
11	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Napoi	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Napoi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
12	Peningkatan Fungsi PPL Rabambang	Penyusunan RDTR	Kota Rabambang	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan/Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			

q



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Transportasi Darat	Kab Gumas				
	A. Peningkatan Jalan	Pengembangan Ruas Jalan Tumbang Telaken – Jakatan Raya – Tumbang Rahuyan – Kuala Kurun – Perbatasan Kab. Kapuas dan ruas rabambang perbatasan Kab.Katingan		Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
		Pengembangan jalan Ruas Ruas Kuala Kurun – Kecamatan Sepang		Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	B. Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Ruas antar kecamatan yang belum terhubung : Ruas Tehang – Tb Marikoi, Ruas Tb Marikoi – Tb Miri, Ruas Sepang Simin – Jakatan Raya, Ruas Tb Telaken – Tehang, Ruas Tb Marikoi – Desa Tb Mahoroi, Ruas Kuala Kurun – Desa Linau – Jakatan Raya, Ruas Sepang Simin – Takaras Ruas Sepang Simin – Kuala Kurun dan lain lain		Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	C. Perbaikan Jalan	Antar IKK Kecamatan		Program pembangunan jalan dan jembatan			
	D. Pembangunan Jalan	Antar IKK Kecamatan		Program pembangunan jalan dan jembatan			
	E. Peningkatan Terminal	Terminal C ke terminal B	Kuala Kurun	Program pembangunan jalan dan jembatan			
	F. Pembangunan Terminal	Terminal C	IKK lainnya	Program pembangunan jalan dan jembatan			
	Pengembangan Dermaga	Fasilitas penunjang bongkar muat dermaga	Kab Gunung Mas	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
III	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air						
	A. Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi hulu Sungai Kahayan	Damang batu dan Miri Manasa	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
	B. Irigasi	Optimalisasi irigasi	Tewah, Kurun, Rungan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
	C. Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum *)			
	D. Pengendalian Banjir	Rehabilitasi area tangkapan air	Damang Batu dan Miri Manasa	Program Sistem Penyediaan Air Minum *)			



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
IV	Sistem Jaringan Prasarana Energi						
	A. Peningkatan	Optimalisasi pemanfaatan PLTD	Kurun, Tewah, Tumbang Miri, Sepang Simin, Tumbang Miwan, Tumbang Tambira				
		Perluasan layanan listrik	Kuala Kurun, Tewah, Sepang Simin				
	B. Pembangunan	Pembangunan PLTU	Tumbang Tariak (Kecamatan Kurun)				
		Pembangunan Listrik energi baru terbarukan	Kecamatan yang belum ada pembangkit				
V	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi						
	A. Peningkatan	Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh wilayah permukiman dan pusat pemanfaatan SDA	Program kerjasama informasi dengan mas media			
		Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kab. Gunung Mas	Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika *)			
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kab. Gunung Mas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)			

9



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
VI	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman						
	A. Peningkatan	Perbaikan perumahan menjadi rumah sehat	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan	Program Pengembangan Perumahan			
	B. Pembangunan	Pembangunan perumahan perkotaan	Kuala Kurun, Tewah	Program Pengembangan Perumahan			
		Pembangunan TPA	Kuala Kurun	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)			
		Pembangunan IPAL	Kuala Kurun, Tewah(Limbah perumahan)	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)			
		Pembangunan drainase	Kuala Kurun, dan Kota PKL	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	PPK/PPL dan desa-desa berkembang	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
	Perwujudan Rencana Pola Ruang						
1	Perwujudan Kawasan Lindung						
	A. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung :		Program Pengelolaan Tahura *)			
		a. Penguatan manajemen kawasan dan penantapan blok lindung pada kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya					

4



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		b. Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu					
		c. Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi kawasan hutan					
	B. Perwujudan Fungsi Koridor Satwa dan dataran Tinggi	Penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40 % sebagai kawasan lindung		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif		Program Pengelolaan Tahura *)			
	C. Perwujudan Kawasan Resapan Air	Pemantapan tata batas kawasan		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis)		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah		Program Pembinaan Kader Konservasi *)			
		Penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan prean Suaka Alam (rencana aski bersama)		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Pelaksanaan program rehabilitasi		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian Hutan		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			
		Pemantauan dan evaluasi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
	D. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat	Pembuatan perda sempadan sungai, danau dan mata air		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
		Identifikasi sempadan sungai yang kritis		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Rehabilitasi sempadan sungai, danau dan mata air		Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah			



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
				Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah *)			
	D. Perwujudan Mitigasi Bencana	Mitigasi bencana longsor adalah :					
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang bantaran sungai dan sisi jalan raya	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
		Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Peraturan daerah yang mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Mitigasi bencana banjir adalah :					
		Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Identifikasi faktor penyebab bahaya banjir		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			

9



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pelaksanaan program mitigasi yang telah dirumuskan, yaitu :					
		1. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS		Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah *)			
		2. Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak (potensi terdampak)		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		3. Menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dari ekosistem tanah basah		Program Perencanaan Tata Ruang			
2	Perwujudan Kawasan Budidaya						
	A. Perwujudan HPT	Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan fasilitas wisata alam		Program Pengembangan Ekowisata Tahura *)			
	B. Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Seluruh kecamatan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, terminal agribisnis		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4 ton/ha		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			





No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
	C. Perwujudan Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Seluruh kecamatan	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalan		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
	D. Perwujudan Kawasan Perkebunan	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		a. Subsistem Hulu (Up Stream) sarana produksi pertanian (industri pembibitan, pupuk dan bahan kimia lainnya, alat pertanian)					
		b. Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer					
		c. Subsistem Hilir (Down Stream) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan					
		d. Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan					
	E. Perwujudan Kawasan Peternakan	Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau), sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana serta sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) serta susu sapi dan kerbau (yoghurt)	Seluruh kecamatan terutama Tewah, Kurun dan Mihing Raya Rencana KTM Bereng Belawan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
		Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (Babi dan Kambing), perlu dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi serta produksi ternak Babi dan kambing	Seluruh kecamatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
		Pengembangan sentra peternakan unggas	Seluruh kecamatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			

f



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
	F. Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Seluruh kecamatan				
		Kepastian dari hasil Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B dan C serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi tenaga air, untuk listrik perdesaan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi		Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *)			
		Pengembangan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik energi alternatif					
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi baru terbarukan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			

4



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
	G. Perwujudan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Kuala Kurun				
		Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu	Seluruh wilayah pariwisata				
		Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah		Program Sarana Promosi Parawisata*)			
		Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan		Program Sarana Promosi Parawisata*)			
	H. Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan					
		Pemetakan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memerhatikan	Kuala Kurun dan IKK Lainnya	Program Perencanaan Tata Ruang			
		a. Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 %					
		b. Peningkatan pembangunan perumahan pegawai eselon 3 kebawah					
		c. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (pusat keagamaan, Stadion Olah Raga)					
		d. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa					





No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031:					
		a. Jalan lingkungan					
		b. Sistem jaringan prasarana air minum					
		c. Sistem jaringan prasarana listrik					
		d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi					
		e. Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA)					
		f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah					
		Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang beradapada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi	Kuala Kurun,	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana*)			
		Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru		Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana		Program Pengembangan Perumahan			
		Permukiman Perdesaan					
		Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya	Kawasan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan	Program Pengembangan Perumahan			
		Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana*)			

4



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana*)			
		Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah					
	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis						
1	Perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi	Penetapan Kawasan strategis ekonomi melalui perda	Seluruh kawasan yang telah teridentifikasi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan sebagaimana kegiatan yang diprogram pada arahan pemanfaatan ruang tentang pertanian dan perkebunan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian*)			
		Perwujudan rencana KTM Bereng Belawan					
2	Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Kultural	Pemantapan batas kawasan	Kuala Kurun dan Tumbang Anoi	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Pengembangan jasa perhotelan dan restoran dan travel					
		Pembangunan Infrastruktur pendukung		Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
		Pembangunan Museum					
		Pengembangan kw. Betang Tumbang Anoi					
3	Perwujudan Kawasan Strategis Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi	Penetapan batas kawasan Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi	Tumbang Tariak	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Penyusunan rencana rinci kawasan Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			



No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pembangunan PLTU					
		Inventarisasi Sumber pemasokan Energi untuk PLTU					
		Penyiapan masyarakat					
		Pembangunan infrastruktur pendukung					
		Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan					
		Pemantauan (Amdal) dan pengembangan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
4	Perwujudan Kawasan Strategis Hamkam	Menganalisis dampak pembangunan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan infrastruktur Strategis Hankam terutama dalam membantu pergerakan pasukan		Program Pembangunan Sarana Prasarana Tahura *)			
		Melestarikan hutan tempat latih militer dan sebagainya		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			



4.2.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Gunung Mas

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Begitu pula Kabupaten Gunung Mas yang berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan, juga berupaya mengimplementasikan KLHS ini di dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Diharapkan dengan adanya implementasi dokumen KLHS pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas maka akan ada sinkronisasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan. Salah satu inti dari KLHS adalah melihat capaian indikator dan pengkajian pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya akan dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah. Dalam salah satu poin penting dalam kajian KLHS RPJMD Gunung Mas terdapat rumusan alternatif dan rekomendasi berdasarkan sasaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas sebagai penyempurnaan kebijakan rencana program dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang dijabarkan sebagai berikut:

Rekomendasi perbaikan RPJMD yang sudah didasarkan pilar-pilar tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola kelembagaan. Rekomendasi ini berupa arahan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran dari setiap misi pada RPJMD (Rancangan Teknokratis) Kabupaten Gunung Mas.

4.



1. Pilar Sosial

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar sosial berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- a. sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 1. pengembangan sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan kepribadian berakhlak mulia;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan baik dari segi sistem dan fasilitasnya; dan
 3. peningkatan kesadaran dan peran serta orang tua dan tenaga pengajar dalam memberikan pendidikan keagamaan.
- b. sasaran 1 pada tujuan ke-2 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 1. peningkatan sikap toleransi, gotong-royong, menghargai, membantu antar pemeluk agama; dan
 2. penghapusan praktik/isu yang menggunakan atribut ajaran agama.
- c. sasaran 1 pada tujuan ke-2 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 1. upaya peningkatan akses layanan kesehatan secara merata termasuk pada akses obat-obatan dan vaksinasi;
 2. upaya peningkatan akses dan informasi terkait layanan kesehatan seksual dan reproduksi;
 3. upaya peningkatan layanan kefarmasian dan perbekalan secara inklusif dan merata; dan
 4. peningkatan pengawasan obat-makanan, keamanan pangan, dan bahan berbahaya.

f



- d. sasaran 1 pada tujuan ke-3 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. upaya peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga pengajar yang berkualitas;
 2. pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan merata;
 3. peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar nasional;
 4. perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah serta penyediaan bantuan operasional sekolah dan/ atau madrasah; dan
 5. peningkatan kualitas Program Wajib belajar pendidikan dasar (Dikdas) sembilan tahun.
- e. sasaran 2 pada tujuan ke-3 di Misi ke1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. pengembangan dan integrasi nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan;
 2. peningkatan promosi budaya dan produk lokal berbasis masyarakat; dan
 3. pengembangan nilai kebudayaan lokal dalam kegiatan masyarakat.
- f. sasaran 3 pada tujuan ke-3 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai peningkatan keterampilan olahraga bagi pemuda serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- g. sasaran 1 pada tujuan ke-4 di Misi ke1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. Peningkatan pelayanan kesehatan dan program keluarga bencana secara merata untuk semua kalangan masyarakat;
 2. Peningkatan akses informasi serta edukasi dan sosialisasi mengenai program keluarga berencana; dan
 3. peningkatan upaya meminimalisir jumlah penduduk yang bermigrasi ke Kabupaten Gunung Mas.



- h. sasaran 2 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. peningkatan sistem dan perlindungan sosial bagi kaum perempuan dan anak-anak dari tindakan bahaya dan kekerasan fisik dan psikologis;
 2. peniadaan disparitas gender dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam segala sektor;
 3. peningkatan penjaminan bagi kaum perempuan untuk mengakses pelayanan dasar dalam segala sektor;
 4. peningkatan jaminan dalam hal partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; dan
 5. pemberdayaan kaum perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
- i. sasaran 3 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. peningkatan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan secara inklusif dan merata;
 2. peningkatan ketahanan masyarakat rentan terhadap bencana dengan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam;
 3. peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja; dan
 4. peningkatan akses terhadap jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

4



- j. sasaran 4 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskriminasi;
 - 2. peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kelembagaan serta perlindungan hak tenaga kerja; dan
 - 3. upaya pemberdayaan dan peningkatan layanan bagi masyarakat miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- k. sasaran 5 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. peningkatan kualitas komunikasi dan demokrasi dalam keluarga secara berkelanjutan; dan
 - 2. peningkatan kerjasama dan saling apresiasi antar anggota keluarga.
- l. sasaran 6 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. peningkatan upaya pencegahan dini, kesiagaan, serta layanan perlindungan terhadap gangguan ketertiban keamanan dan perlindungan masyarakat;
 - 2. penegakkan hukum yang adil dan merata bagi pelaku kejahatan dan kekerasan; dan
 - 3. upaya penyuluhan terkait ketertiban, keamanan, dan taat aturan lalu lintas.

4



2. Pilar Ekonomi

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar ekonomi berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- a. sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 1. peningkatan jumlah UMKM dalam mencapai target ideal dan mempermudah akses jasa keuangan; dan
 2. peningkatan daya jual dan daya saing produk unggulan lokal semua wilayah Kecamatan di Gunung Mas dalam pasar regional/nasional/global.
- b. sasaran 2 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 1. pengembangan dan peningkatan daya saing dan kualitas ekonomi kreatif; dan
 2. peningkatan kemudahan perjanjian usaha/investasi dan jaminan keamanan sosial dan lingkungan serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan usaha.
- c. sasaran 3 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 1. pembuatan kebijakan pengendalian harga dan pemerataan pendapatan; dan
 2. peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.
- d. sasaran 4 tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai pengembangan dan peningkatan daya saing dan kualitas ekonomi kreatif.

4



- e. sasaran 5 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. pengembangan dan peningkatan potensi sektor pariwisata yang memenuhi standar nasional maupun internasional; dan
 - 2. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha sektor pariwisata.
- f. sasaran 6 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 2. peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas pangan sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah; dan
 - 3. peningkatan produk pangan yang memenuhi standar halal dan aman.
- g. sasaran 7 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. peningkatan pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan antar sektor untuk pembangunan berkelanjutan; dan
 - 2. peningkatan kerjasama antara pihak pemerintah-swasta dan masyarakat sipil.

3. Pilar Lingkungan

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar lingkungan berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- a. sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau untuk semua kalangan terutama kelompok masyarakat rentan; dan
 - 2. pembangunan infrastruktur kota dan permukiman yang ramah lingkungan dan tahan bencana sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030*.



- b. sasaran 2 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. penyusunan Rencana Detai Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Gunung Mas dengan mengintegrasikan ketahanan bencana alam; dan
 - 2. penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau untuk semua kalangan terutama kelompok masyarakat rentan.
- c. sasaran 3 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. pembuatan dokumen rencana pengurangan risiko bencana sebagai acuan dalam mitigasi bencana;
 - 2. pembangunan infrastruktur dan perumahan tahan gempa dan peningkatan sarana penanggulangan bencana; dan
 - 3. peningkatan kesadaran masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana khususnya kelompok masyarakat rentan.
- d. sasaran 4 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai peningkatan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua kalangan masyarakat terutama kelompok masyarakat rentan.
- e. sasaran 5 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - 1. peningkatan akses dan layanan terhadap air minum aman dan terjangkau secara universal dan merata;
 - 2. peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan secara memadai dan merata bagi semua khususnya kelompok masyarakat rentan; dan
 - 3. optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sanitasi baik limbah dan sampah daerah dan antar daerah dengan benar dan ramah lingkungan.



- f. sasaran 6 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan difasilitasi dengan pelayanan dasar secara merata; dan
 2. upaya menata kembali kawasan pemukiman kumuh menjadi kawasan yang ramah lingkungan.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- a. sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-4 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
1. mewujudkan birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 2. partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.
- b. sasaran 2 pada tujuan ke-1 di Misi ke-4 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik yang terukur.
- c. sasaran 3 pada tujuan ke-1 di Misi ke-4 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya setiap Perangkat Daerah perlu memastikan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan baik, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- d. sasaran 1 pada tujuan ke-2 di Misi ke-4 RPJMD, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kajian terkait daya saing daerah dan inovasi Daerah baik dari instansi Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat.



Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memastikan termuatnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024, sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS. Oleh karena itu, isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun melalui proses pelaksanaan KLHS akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024, KLHS dilakukan terhadap dokumen utama Rencana Teknokratik Kabupaten Gunung Mas dengan dilengkapi analisa atas Visi, Misi dan Program Bupati Gunung Mas Terpilih 2019-2024 yang telah dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan.

Rekomendasi KLHS menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. Rekomendasi yang disetujui akan diinstruksikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diintegrasikan sebagai perbaikan terhadap rancangan dokumen perencanaan yang sudah ada. Secara khusus tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi yang sudah dirumuskan pada Bab 6 ini adalah sebagai berikut:

- a. Revisi dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam RPJMD berdasarkan rekomendasi KLHS yang telah dirumuskan. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan arahan kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran RPJMD memuat rekomendasi KLHS; dan



- b. Penjabaran RPJMD ke dalam KRP dengan berpedoman pada rekomendasi KLHS yang telah dirumuskan, oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan sasaran, kegiatan dan indikator kinerja memuat rekomendasi KLHS.

Penelaahan integrasi KLHS dan RPJMD, yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024 diintegrasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan menjadikannya pertimbangan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024. Adapun bagian yang diadaptasi dari KLHS meliputi:

- a. permasalahan di Kabupaten Gunung Mas yang sudah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD;
- b. rumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap atau kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD; dan
- c. gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024.



4.2.6. Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka **isu strategis Kabupaten Gunung Mas** adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing sumber daya manusia masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen Pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Kualitas sumber daya manusia menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki nilai (*values*) dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

2) Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar

d



wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara berkesinambungan sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3) Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan masalah utama. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tetapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas,

4



apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

4) Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

5) Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian Daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian

af



pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan Aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya Daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang.

6) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan ini maka diperlukan kemandirian dan keberdayaan masyarakat sebagai prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Memahami kondisi dan situasi saat ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pengembangan dan peningkatan serta pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini harus disikapi dengan adanya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup (kebakaran hutan, bencana alam, polusi air, polusi udara, limbah B3), pengelolaan sampah, rencana aksi nasional penurunan emisi sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hal ini perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Daerah agar mampu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan kehidupan yang lebih dinamis.



7) Implementasi Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal merupakan kebutuhan dasar warga negara, yakni kebutuhan fisiologis yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan warga negara hidup tidak layak. Pemerintah Pusat menyusun standar pelayanan minimal untuk melindungi hal konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi hal ini, implementasi standar pelayanan minimal ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam hal penyelenggaraannya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diharapkan sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh lapisan masyarakat.

8) Gerakan Masyarakat Hidup untuk Pencegahan Stunting

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat Germas merupakan upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat agar derajat kesehatan masyarakat meningkat setinggi-tingginya dapat terwujud. Ini dilatarbelakangi transisi epidemiologi perubahan pola penyakit terkait faktor perilaku. Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Penyebab terjadinya stunting karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama sejak konsepsi sampai anak usia dua tahun. Anak sering sakit, keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Ketersediaan pangan di rumah tangga yang kurang, pola asuh serta pola makan.

Dampak yang ditimbulkan akibat stunting antara lain terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit serta risiko tinggi muncul penyakit menular maupun tidak menular.

4



Adapun fokus Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan pencegahan, deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan edukasi hidup sehat peningkatan perilaku hidup sehat dan peningkatan pangan sehat serta percepatan perbaikan gizi yang berdampak pada penurunan angka stunting.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019–2024 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yakni **“Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri”**. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

Bermartabat adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negatif dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

g-



Maju adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

Berdaya saing adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan Daerah.

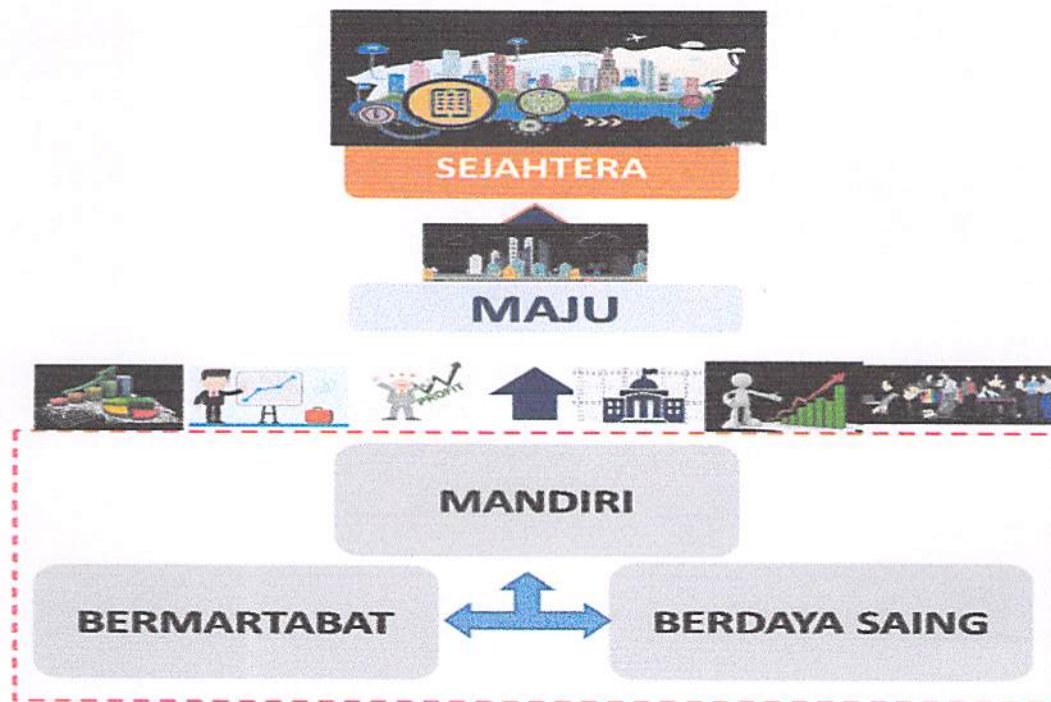
Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni: pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.



Berdasarkan pernyataan visi diatas dengan beberapa elemen pokok visi yang terkait maka dapat digambarkan hubungan antar elemen visi yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1
Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Misi pembangunan sebagai berikut:



1) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional

Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya Manusia (SDM)

Melalui misi ini, pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah dan kalangan swasta.

3) Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

Melalui misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan Daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

4) Mempercepat Reformasi Birokrasi

Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

5) Penegakan dan jaminan kepastian hukum (*Law Enforcement*)

Melalui misi ini diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.

6) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai Huma Betang dan falsafah belum Bahadat.



7) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Melalui misi ini kebijakan pembangunan Daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.

8) Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Misi ini diperuntukkan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan penjelasan misi diatas maka keterkaitan antara visi dan misi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

MISI 1

Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional

MISI 2

Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)

MISI 3

Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

MISI 4

Mempercepat Reformasi Birokrasi



MISI 5

Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)

MISI 6

Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

MISI 7

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

MISI 8

Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Gambar 5.2
Keterkaitan antara Visi dan Misi

Gambar di atas menunjukkan bahwa visi, misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas merupakan sebuah langkah baru dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

q



Dengan melihat perkembangan, kondisi Kabupaten Gunung Mas, potensi unggulan daerah, dan merujuk pada adanya konsep **SMART CITY** maka terdapat 3 konsep pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang akan dilakukan yaitu:

SMART AGRO

SMART AGRO merupakan pengembangan dalam bidang pertanian dari konvensional menjadi lebih modern. Dengan hadirnya teknologi dalam dunia pertanian, diharapkan pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat lebih produktif.

SMART HUMAN RESOURCES

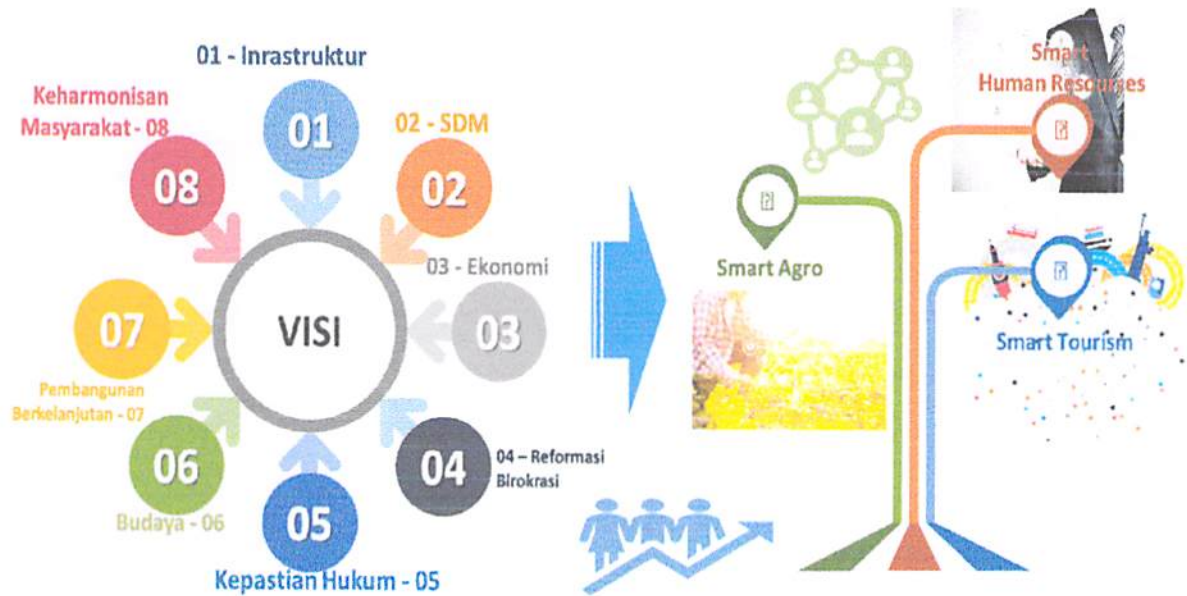
Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber daya (tenaga kerja) yang dikembangkan dalam sistem yang SMART. Dengan Smart Human Resources diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dengan Smart Human Resources diharapkan mampu mendesain sebuah Sistem Human Resources yang dapat diaplikasikan dalam industri-industri yang sedang berkembang.

SMART TOURISM

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat maka hal ini harus mampu dimanfaatkan juga dalam pengembangan potensi-potensi pariwisata Daerah. Dalam industri pariwisata telah menciptakan lingkungan baru dalam dunia pariwisata platform pariwisata ICT terintegrasi. Platform tersebut mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi dan layanan yang efisien untuk wisatawan.



Dengan ketiga konsep diatas harus mampu dikaitkan dengan capaian visi dan misi, sebagai bentuk implementasi secara riil akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka menengah. Keterkaitan ketiga konsep dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah dalam periode 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.3
Keterkaitan antara Visi, Misi, Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism

5.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

q



Tabel 5.1
Rumusan tujuan dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Misi/Tujuan	Indikator		
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional			
Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah	Persentase Luas Kawasan Kumuh	NA	17,5
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)			
Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat	IPM	69,95	74,89
	IPG	92,00 (2015	95
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah			
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Tingkat kemiskinan	5,83	3,8
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	LPE	6,93	8,2
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi			
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)			
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI			
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	66
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal			
Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan	Jumlah penghargaan kebudayaan	NA	5

g



Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)		Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Misi/Tujuan	Indikator		
FALSAFAH BELUM BAHADAT			
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)			
Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	75,75

Dilihat pada tabel di atas, Misi 4 yaitu mempercepat reformasi birokrasi, Misi 5 yaitu penegakan dan jaminan kepastian hukum (*law enforcement*), serta misi 8 yaitu memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tergabung dalam satu tujuan yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel dengan indikatornya indeks reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan ketiga misi tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Gunung Mas dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:



1. **Tujuan 1: Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah**

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk melengkapi dan mendukung aktivitas masyarakat, terutama mendukung untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa infrastruktur yang ingin ditekankan adalah dengan pembangunan seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, sanitasi, penyediaan air baku, perumahan dan pemukiman yang layak, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran sebagai berikut:**

- Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Cakupan aksesibilitas antar wilayah, Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase RT yang terakses air bersih, dan Rasio elektrifikasi.

2. **Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier efect* terhadap pembangunan perekonomian, untuk memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas. Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas, pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan lama sekolah, Angka harapan hidup, Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

3. **Tujuan 3: Meningkatkan perekonomian masyarakat**

Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana masyarakat memperoleh kebutuhan material, spiritual dan sosial secara baik. Sehingga, bisa hidup layak dan mampu untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara maksimal. Dengan begitu, fungsi sosial sebagai manusia dapat



terpenuhi. Penanaman modal atau investasi sudah diketahui bahwa memiliki peran penting bagi kemajuan daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan investasi daerah, dicapai **dengan sasaran sebagai berikut:**

- Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Pengeluaran perkapita, Indeks Gini.
- Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran, keberhasilan sasaran ini diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi.

4. Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran sebagai berikut:

Ekonomi merupakan salah satu pendukung yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Perekonomian Kabupaten Gunung Mas cukup mempunyai pergerakan yang baik, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat kecil. Kemudian kontribusi produk unggulan daerah juga memberikan sumbangsih dalam pendapatan daerah. Menindaklanjuti hal ini tujuan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator LPE Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



- Mengembangkan potensi pariwisata Daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (*ecotourism*), keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator LPE Sektor Pariwisata.

5. Tujuan 5: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel

Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan *public* untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang efektif dan efisien, sasaran ini dapat diukur dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja.
- Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel, pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan Opini BPK.
- Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator Nilai IKM (indeks kepuasan masyarakat).

6. Tujuan 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT

Mengembangkan sosial budaya masyarakat Kabupaten Gunung Mas khususnya terkait dengan pelestarian budaya Adat Dayak sebagai bagian kekayaan budaya Nasional dan sendi-sendi tatanan pergaulan hidup masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Selain itu diharapkan hal ini dapat memperkuat kelembagaan adat untuk terpeliharanya nilai-nilai lokal masyarakat adat serta memelihara situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah. Agar tujuan ini tercapai maka dilaksanakan melalui sasaran sebagai berikut:

q



Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah agenda (*event*) penyelenggaraan budaya Daerah.

7. Tujuan 7: Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan

Lingkungan menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia, yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pembangunan yang dilakukan saat ini harus diiringi dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar kelangsungan dan kelestarian alam dalam keseimbangan pembangunan dapat terjaga, sehingga pembangunan tidak hanya dapat dirasakan pada saat ini namun sampai masa yang akan datang. Agar tujuan ini tercapai maka dilaksanakan melalui sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator status pencemaran air sungai, status pencemaran udara, dan tutupan Lahan.

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.2

Keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)									
Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional									
Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah		Persentase Luas Kawasan Kumuh	NA	27,5	25	22,5	20	17,5	17,5
	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	NA	55	60	65	70	75	75
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	39	51	54	57	60	63	63
		Persentase RT yang terakses air bersih	NA	55	60	65	70	75	75
		Rasio elektrifikasi	56,36 (2013)	77,19	79,79	82,4	85	88	88



**Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri
(BERJUANG BERSAMA)**

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)									
Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumber daya masyarakat		IPM	69,95	72,56	73,16	73,76	74,36	74,89	74,89
		IPG	92,00 (2015)	94	94,33	94,67	95	95	95
	Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Gunung Mas	Rata-Rata Lama Sekolah	8,96	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406	10,406
		Harapan lama sekolah	11,75	12,41	12,57	12,72	12,87	13	13
		Angka harapan hidup	70,15	70,91	71,09	71,28	71,46	72,1746	72,1746
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	79,98 (2015)	83,33	83,88	84,44	85	85,85	85,85
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah									
Meningkatkan perekonomian masyarakat		Tingkat kemiskinan	5,83	4,78	4,52	4,26	4	3,8	3,8
	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Pengeluaran perkapita	1.181.810	1.649.347	1.766.231	1.883.116	2.000.000	2.200.000	2.200.000
		Indeks Gini	0,296	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
		Meningkatnya investasi daerah dalam	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,17	1,07	1,05	1,02	1	0,8

9



**Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri
(BERJUANG BERSAMA)**

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
	rangka mengurangi pengangguran	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	NA	15	20	25	30	35	35
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah		LPE	6,93	0,54	7,69	7,85	8	8,2	8,2
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah	PDRB sektor Pertanian (Milyar Rp)	1.526,09	1.982,68	2.100,80	2.218,92	2.337,04	2.570,74	2.570,74
	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	PDRB Sektor pariwisata (Milyar Rp)	NA	30	35	42,5	50	55	55

g.



**Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri
(BERJUANG BERSAMA)**

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi									
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)									
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI									
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	NA	62,5	63	64	65	66	66
	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	A	A	A	A
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)

df



Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)							
Misi /Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah	Data Awal	Target				Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal							
Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT	Jumlah penghargaan kebudayaan	NA	3	4	4	4	5
	Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah	NA	3	4	4	5	5
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)							
Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	73,24	73,82	74,41	75	75,75
Meningkatnya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	NA	65	66	67	68	69

4



**Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri
(BERJUANG BERSAMA)**

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
		Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	NA	93,25	93,5	94	94,5	95	95
		Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	NA	66,5	68	70	72,5	73,225	73,225

q.



Dalam rangka mendukung pembangunan dari Pusat, maka Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan adanya sinkronisasi kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Konsistensi antara visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Tabel 5.3
Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas terhadap
Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

No	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024
	Visi Kalimantan Tengah: Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)	Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)
1	Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 1 : Meningkatkan dan mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proposional.
2	Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur	Misi 1 : Meningkatkan dan mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proposional.
3	Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah
4	Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah

q



No	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024
5	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 4 : Mempercepat Reformasi Birokrasi Misi 5 : Pencegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (<i>law enforcement</i>) Misi 8 : Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Misi 6 : Mengembangkan nilai-nilai Budaya kearifan Loka.
7	Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 7 : Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)
8	Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah

gh.



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Gunung Mas mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan Daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.



Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019–2024, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024

Sasaran		Strategi	
1	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	1	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah
2	Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas	2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
		3	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
3	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	4	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan
		5	Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat
4	Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran	6	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan Daerah	7	Pengembangan Agribisnis
6	Mengembangkan potensi pariwisata Daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (<i>ecotourism</i>)	8	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata
7	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang efektif dan efisien	9	Percepatan Reformasi Birokrasi
8	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel		
9	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas		
10	Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah	10	Pelestarian kebudayaan Daerah
11	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	11	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup



Penjelasan masing-masing strategi pada perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1, Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah

Infrastruktur dasar merupakan sarana dan prasarana yang difasilitasi Pemerintah Daerah untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan aksesibilitas adalah suatu ukuran untuk mudahnya suatu tempat dicapai. Infrastruktur dasar terdiri atas air bersih, listrik, telekomunikasi, sampah, drainase, sanitasi, dan jalan. Sedangkan aksesibilitas terdiri atas sarana prasarana perhubungan. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang dibangun dengan merata akan berdampak pada taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Interkoneksi antara wilayah yang berperan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dilakukan melalui pengembangan jaringan jalan dan pembangunan sarana prasarana transportasi yang saling terintegrasi.

Pembangunan infrastruktur dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi dapat terpenuhi. Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perkembangan Daerah. Melalui infrastruktur yang memadai nantinya tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Semua produk dan hasil usaha masyarakat dapat didistribusikan ke daerah luar. Kondisi infrastruktur dasar dan aksesibilitas di Kabupaten Gunung Mas belum merata, masih banyak daerah terpencil yang belum mempunyai akses jalan yang memadai, kondisi lingkungan yang kumuh dan berbagai permasalahan terkait sarana prasarana dasar lainnya. Kabupaten Gunung Mas perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas terutama di wilayah-wilayah terpencil agar masyarakat semakin sejahtera.

2. Strategi 2, Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek sosial yang menjadi hak semua warga negara. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga merupakan subyek pendekatan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk memberikan penyuluhan mengenai perlunya

4



pendidikan bagi anak usia sekolah dan pentingnya memperhatikan kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan.

Pada aspek pendidikan, Kabupaten Gunung Mas berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara membangun sarana dan prasarana penunjang seperti gedung sekolah, perumahan guru dan lainnya. Selain itu juga, memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengajar khususnya di daerah terpencil. Dikarenakan akses yang sulit menuju daerah terpencil di Kabupaten Gunung Mas, sehingga fasilitas pendidikan menjadi hal pokok untuk terpenuhi.

Kabupaten Gunung Mas juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Pasalnya, hingga saat ini pelayanan kesehatan masih belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Belum semua kecamatan dapat terakses dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Di Kabupaten Gunung Mas masih terdapat satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat dan dirasa masih jauh dari kata cukup untuk memenuhi aspek kesehatan masyarakat.

3. Strategi 3, Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Perempuan mempunyai peran dalam pembangunan baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan. Dalam keluarga, kaum perempuan merupakan tiang keluarga, yang akan melahirkan dan mendidik generasi penerus. Kualitas generasi penerus bangsa ditentukan oleh kualitas kaum perempuan sehingga mau tidak mau kaum perempuan harus meningkatkan kualitas pribadi masing-masing. Tidak mungkin akan terbentuk keluarga yang berkualitas tanpa meningkatkan kualitas perempuan. Kualitas pendidikan perempuan juga merupakan aspek yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Kaum perempuan harus berusaha meraih jenjang pendidikan setinggi mungkin. Peningkatan derajat kesehatan perempuan juga seiring dengan upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan.

Masih banyak peran maupun profesi perempuan yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk melibatkan perempuan dalam setiap aspek pembangunan, sebagai upaya untuk meningkatkan derajat perempuan setara dengan laki-laki.



4. Strategi 4, Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi momok bagi setiap daerah karena kemiskinan mencakup aspek kesejahteraan yang lebih luas. kemiskinan bukan hanya tentang rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, melainkan juga rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, nutrisi dan beberapa aspek lain dalam konteks pembangunan manusia (*World Bank Report 2001*). Pengentasan kemiskinan merupakan strategi berbasis partisipasi masyarakat dengan menekankan bentuk pemberdayaan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat.

Pemerintah telah banyak menyalurkan program pengentasan kemiskinan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan. Upaya pengentasan kemiskinan Kabupaten Gunung Mas dapat dilakukan dengan memperhatikan ciri khas masing-masing kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, bentuk pemberdayaan yang diberikan bisa tepat sasaran.

5. Strategi 5, Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis potensi Daerah. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan kabupaten Gunung Mas untuk dikembangkan. Pengembangan sektor tanaman pangan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sumber kehidupan bagi masyarakat Gunung Mas.

Sektor lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi adalah sektor industri. Seperti diketahui, sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan karena kegiatan usaha yang menampung lapangan kerja yang cukup banyak. Selain itu pengembangan IKM dapat menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan, kecamatan, Kabupaten sesuai dengan kultur dan potensi wilayah. Pengembangan sentra-sentra produk unggulan dapat mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan yang penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.



6. Strategi 6, Peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan Pemerintah, tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian (World Bank, 2010; OECD, 2015; APO, 2015). Dunia kerja saat ini menuntut perusahaan untuk mencari pekerja yang berkualitas dan unggul, sehingga Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Sehingga pembangunan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian sedini mungkin sejak di bangku sekolah.

Selain mempersiapkan dari segi sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Perluasan kesempatan kerja ini berupa menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat memanfaatkan sektor-sektor unggulan sebagai objek kerja. Lapangan perkerjaan di sektor pertanian menampung banyak tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas.

7. Strategi 7, Pengembangan Agribisnis

Agribisnis merupakan bisnis yang berbasis pada rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agribisnis mempunyai ruang lingkup mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, paska panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Agribisnis dipandang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan utama masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian Daerah apabila dilaksanakan dengan baik.

Agribisnis sangat cocok untuk diterapkan di Kabupaten Gunung Mas dikarenakan pertanian dan turunannya (perkebunan, peternakan, dan perikanan) merupakan komoditi unggulan kabupaten Gunung Mas. Selain itu, dari segi sarana prasarana pertanian dan sumber daya manusia pertanian, Kabupaten Gunung Mas sangat siap dalam mengembangkan agribisnis. Pertanian yang berbasis agribisnis diharapkan menjadikan Kabupaten Gunung Mas daerah yang mandiri pangan dan meningkatkan taraf hidup petani.



8. Strategi 8, Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang dapat menjadi potensi ekonomi kerakyatan karena dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, komunitas lokal, dan nilai-nilai sosial daerah tersebut sehingga wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar daerah pariwisata. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan di lokasi wisata juga perlu dilakukan sebagai upaya menarik wisatawan.

Di Kabupaten Gunung Mas banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan antara lain wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

9. Strategi 9, Percepatan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Gunung Mas pernah menjadi percontohan (*pilot project*) reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam implementasinya, Kabupaten Gunung Mas dianggap berhasil dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Diharapkan reformasi birokrasi dapat dimaksimalkan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Sehingga mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4



10. Strategi 10, Pelestarian kebudayaan Daerah

Nilai budaya suatu daerah memiliki nilai yang begitu besar karena kebudayaan merupakan ciri khas daerah masing-masing. Pelestarian kebudayaan Daerah merupakan strategi untuk menjaga nilai-nilai budaya tersebut tetap utuh agar bisa dinikmati anak cucu. Kabupaten Gunung Mas masih memiliki kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melestarikan kebudayaan Kabupaten Gunung Mas antara lain melalui inventarisasi cagar budaya, festival budaya dan wisata budaya.

Selain itu, Kabupaten yang masih dihuni suku Dayak ini memiliki upacara adat yang terkenal, yaitu Upacara *Tiwah* atau *Tiwah Lale* atau *Magah Salumpuk Liau Uluh Matei*, yaitu upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang letaknya di langit ke tujuh. Kebudayaan ini diharapkan tetap lestari sehingga bisa menjadi kekayaan luhur masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

11. Strategi 11, Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi yang mendukung keberlangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang. Adapun permukaan bumi yang merupakan ekosistem kehidupan manusia luasnya tetap. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya benturan antara pertumbuhan jumlah manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Untuk itu, perlu adanya keserasian, keseimbangan dan daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk mendapat lingkungan hidup yang berkualitas.

Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk mengelola kualitas lingkungan hidup agar menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat yang tinggal. Peningkatan kualitas air, udara dan tanah menjadi pekerjaan rumah yang dilakukan untuk tetap lestari. Kualitas air bisa dilihat dari kualitas air sungai Kabupaten Gunung Mas yang masih masuk kategori 2 atau bisa dikonsumsi namun harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Kualitas udara bisa dilihat dari masih banyak kawasan hutan yang lestari sebagai penyaring udara di Kabupaten Gunung Mas.



Selain itu, kawasan hutan lindung menjadi perhatian untuk dijaga ekosistemnya sehingga bisa menjadi rumah bagi flora dan fauna. Kualitas tanah bisa dilihat dari pengelolaan sampah masyarakat, bahwasanya sampah organik bisa ditimbun dalam tanah sebagai kompos alami, sedangkan sampah non organik sebaiknya dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Selain itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Perangkat Daerah yang terlibat di dalamnya.



6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus dan tema per tahun ini disusun agar Kepala Daerah mengerti fokus permasalahan yang harus diselesaikan per tahun. Dikarenakan semua masalah tidak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, sehingga perlu dibagi dalam lima tahun kinerja. Program dan kegiatan sesuai fokus dan tema pembangunan dilakukan setiap tahun oleh Perangkat Daerah terkait. Pada tahun selanjutnya yang bukan merupakan prioritas hanya berupa program dan kegiatan penunjang dan pendukung saja. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahunan Tahun 2020-2024



Masing-masing tema di atas memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024. Penjelasan dari masing-masing tema adalah sebagai berikut.

1) Arah Pembangunan Tahun 2020

Dengan melanjutkan pembangunan tahun 2019, pada tahun 2020 ini pembangunan Kabupaten Gunung Mas menitikberatkan pada pembangunan masyarakat yang berbudi luhur. Selain itu, tahapan ini juga merupakan tahap lanjutan dari pembangunan RPJMD periode sebelumnya. Dengan ini maka tema pembangunan pada tahun 2020 ini adalah **“Peningkatan Pembangunan Gunung Mas yang Berkelanjutan”**. Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah bidang sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, infrastruktur, pemerintahan dan lingkungan hidup. Dengan pembangunan ini diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial tanpa menghancurkan lingkungan.

2) Arah Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2020 yang berfokus pada pembangunan di beberapa bidang yang cukup strategis dan diharapkan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 ini pembangunan akan dilakukan pada bidang sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan dan lingkungan hidup. Pada tahun 2021 Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu mempercepat pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat. Sesuai pernyataan di atas, maka tema pembangunan tahun 2021 ini adalah **“Percepatan Pembangunan Gunung Mas yang terintegrasi dan terpadu”**. Pembangunan yang stabil diperlukan dalam proses percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam percepatan semua sektor harus berjalan beriringan secara seimbang, sehingga tujuan utama pembangunan dapat terwujud.



3) Arah Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 merupakan kelanjutan pembangunan tahun 2021, pada tahun ini pembangunan menitikberatkan pada pembangunan bidang sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur. Dengan pembangunan ini diharapkan masyarakat Gunung Mas mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah. Sesuai pernyataan diatas maka tema pembangunan pada tahun 2022 ini adalah **“Penguatan Pembangunan Sumber Daya Alam Gunung Mas yang berdaya saing”**. Dengan tema ini pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu mengeksplorasi dan mengembangkan dan mengelola dengan maksimal segala sumber daya Daerah dan potensi-potensi unggulan Daerah agar mampu bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Penguatan pembangunan ini diharapkan menjadi modal dasar kehidupan masyarakat Gunung Mas menuju kehidupan yang lebih baik.

4) Arah Pembangunan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 merupakan kelanjutan pembangunan tahun 2022, pada tahun ini pembangunan menitikberatkan pada pembangunan bidang sumber daya manusia, Ekonomi, Infrastruktur dan Pemerintahan. Pada tahun ini pembangunan Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai pernyataan di atas tema pembangunan tahun 2023 ini adalah **“Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gunung Mas”**. Dengan ini diharapkan pembangunan 2023 masyarakat Gunung Mas menjadi masyarakat yang lebih produktif. Sehingga pemberdayaan masyarakat di berbagai lapisan dapat dilaksanakan dengan optimal dan diharapkan perekonomian masyarakat merata terutama masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah.

4



5) Arah Pembangunan Tahun 2024

Dengan pembangunan berbagai bidang telah dilaksanakan pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 maka pada tahun 2024 ini pembangunan dilakukan dengan berfokus pada beberapa bidang pembangunan yang menyeluruh. Sehingga diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan pernyataan di atas maka tema pembangunan pada tahun 2024 ini adalah **“Terwujudnya Pembangunan Gunung Mas yang Maju dan sejahtera se-Kalimantan Tengah”**. Bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan dari berbagai bidang yang akan dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan yang diharapkan akan berimplikasi pada kemajuan kehidupan masyarakat. Dengan pembangunan yang dilakukan secara optimal, efektif, efisien diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat berdaya saing di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota lain sehingga Kabupaten Gunung Mas dapat diperhitungkan sebagai Kabupaten yang hebat dan mumpuni.

4



Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
1	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	1	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	1	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan						1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
											2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
											3	Program peningkatan Jalan dan Jembatan
											4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
											5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
				2	Pemenuhan pelayanan perhubungan antar wilayah						6	Program peningkatan pelayanan angkutan
											7	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

ef-



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan					Program Pembangunan Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
								8 Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
			3	Pemenuhan aksesibilitas informasi dan komunikasi				9 Program Aplikasi dan Informatika
			4	Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat				10 Program Pengembangan Perumahan
								11 Program Sistem Penyediaan Air Minum
2	Meningkatnya kualitas daya saing kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas	2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5	Peningkatan kualitas anak usia dini			12 Program pembangunan prasarana sanitasi
				6	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar			13 Program Pendidikan Anak Usia Dini
				7	Peningkatan kualitas pendidikan non formal			14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
								15 Program Pendidikan Non Formal

4



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan					Program Pembangunan Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	
		8 Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan						16 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		9 Pengembangan sistem pelayanan pendidikan						17 Program Manajemen Layanan Pendidikan
		10 Peningkatan budaya baca dan peningkatan wawasan masyarakat						18 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		11 Peningkatan penyelenggaraan kapasitas pelayanan kesehatan						19 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
				12	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan						20	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
											21	Program obat dan perbekalan Kesehatan
											22	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
											23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
				13	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular						24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
											25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
				14	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak						26	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

2



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
					Peningkatan penyelenggaraan pelayanan bidang olahraga bagi kaum pemuda						27	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
											28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
		3	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	15	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan						29	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
										30	Program Pemenuhan hak - hak anak	
											31	Program KKBPK
3	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	4	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	16	Peningkatan pelayanan pemberian bantuan kesejahteraan yang tepat sasaran						32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
										33	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
				17	Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial PMKS							34



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
			2020	2021	2022	2023	2024		
		18 Peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa						35	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
								36	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		19 Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin						37	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	5 Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	20 Peningkatan kualitas pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah						38	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
								39	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
		21 Peningkatan efektivitas sistem perdagangan						40	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
								41	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
4	Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran	6	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	22	Pengembangan industri hasil unggulan daerah						42	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
											43	Program Penataan Struktur Industri
				23	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial						44	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
											45	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
				24	Peningkatan kuantitas lapangan kerja						46	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
				25	Peningkatan keterampilan hidup wirausaha muda						47	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
				26	Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan						48	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
											49	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

9



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
					dengan dunia usaha							
				27	Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan						50	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
				28	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset daerah						51	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas unggulan daerah	7	Pengembangan Agribisnis	29	Peningkatan produksi pertanian pangan						52	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan
											53	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
											54	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
				30	Pemenuhan sarana dan prasarana produksi pertanian						55	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
			2020	2021	2022	2023	2024		
		31 Peningkatan produksi perikanan						56	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
								57	Program pengembangan budidaya perikanan
								58	Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
		32 Peningkatan produktivitas perkebunan						59	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
								60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
								61	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
		33 Peningkatan pendistribusian hasil produksi perkebunan						62	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

q



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
				34	Peningkatan produksi peternakan						63	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
											64	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
											65	Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan
6	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ecotourism)	8	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata	35	Pengembangan potensi kepariwisataan Daerah						66	Program Pengembangan Destinasi Wisata
				36	Peningkatan pelayanan pariwisata						67	Program pengembangan pemasaran pariwisata
											68	Program Sarana Promosi Pariwisata
											69	Program Pengembangan Pasar Pariwisata

d



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
7	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien	9	Percepatan Reformasi Birokrasi	37	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan Daerah						70	Program perencanaan pembangunan Daerah
				38	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan						71	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
8	Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel	9	Percepatan Reformasi Birokrasi	39	Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran						72	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas			40	Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat						73	Program Penataan Administrasi Kependudukan

4



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
10	Meningkatnya pemeliharaan situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah	10	Pelestarian kebudayaan Daerah	41	Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat						74	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
											75	Program Pendidikan Politik Masyarakat
				42	Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam						76	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana
											77	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
				43	Integrasi budaya dan pariwisata						78	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
											79	Program Pengembangan Nilai Budaya
				44	Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan Daerah						80	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

q



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan					Program Pembangunan Daerah	
						2020	2021	2022	2023	2024		
11	Meningkatnya pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	11	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	45	Peningkatan kualitas penanganan persampahan						81	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
				46	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan						82	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
											83	Program peningkatan pengendalian polusi
											84	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4



Tabel 6.3
Keterkaitan Agenda Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan infrastruktur wilayah	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Panjang pipa jaringan distribusi ari bersih yang teraliri
				2	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan
				3	Program peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)
				4	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan an Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)
				5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal
			Pemenuhan pelayanan perhubungan antar wilayah	6	Program peningkatan pelayanan angkutan	Presentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

g



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
				7	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas
				8	Program pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis dalam kondisi baik
			Pemenuhan aksesibilitas informasi dan komunikasi	9	Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan Penerapan elektronik pemerintahan (<i>E-Government</i>)
			Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat	10	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni (unit)
				11	Program Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana air bersih
				12	Program pembangunan prasarana sanitasi	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi

4



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)

PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/P RIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
\Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan kualitas anak usia dini	13	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)
			Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar	14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB
						Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB
			Peningkatan kualitas pendidikan non formal	15	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan paket a,b dan c
			Peningkatan kualitas dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	16	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
			Pengembangan sistem pelayanan pendidikan	17	Program Manajemen Layanan Pendidikan	Angka Kelulusan pendidikan (SD & SMP sederajat)

g



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Peningkatan budaya baca dan peningkatan wawasan masyarakat	18	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung
			Peningkatan penyelenggaraan kapasitas pelayanan kesehatan	19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	20	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan puskesmas/pustu dan jaringannya
				21	Program obat dan perbekalan Kesehatan	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
				22	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
				23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan wilayah pembinaan pengembangan lingkungan sehat
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	24	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif
						Penderita DBD yang ditangani
						Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
				25	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan wilayah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

21



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/P RIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak	26	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Bayi
			Peningkatan penyelenggaraan pelayanan bidang olahraga bagi kaum pemuda	27	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Organisasi olahraga aktif
				28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olah raga
		Optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan	29	Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)
				30	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase keterwakilan anak dalam kegiatan anak
				31	Program KKBPK	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)

9



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan pelayanan pemberian bantuan kesejahteraan yang tepat sasaran	32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KLB yang tertangani
				33	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan sosial PMKS	34	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Rasio PMKS yang memperoleh bantuan sosial
			Peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa	35	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
				36	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
			Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin	37	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkatkan
	Peningkatan pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	Peningkatan kualitas pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah	38	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif (%)
				39	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase PKL yang dibina
			Peningkatan efektivitas sistem perdagangan	40	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan temuan kasus perdagangan yang ditangani
				41	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (juta rupiah)



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Pengembangan industri hasil unggulan Daerah	42	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM
				43	Program penataan struktur industri	Luas Kawasan industri yang dikembangkan
	Stabilitas ekonomi Daerah	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kompetensi angkatan kerja potensial	44	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Tingkat partisipasi angkatan kerja
				45	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar
				46	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan
				47	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM

9



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)

PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/P RIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	48	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Persentase pengajuan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan tepat waktu
				49	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN dan PMA
			Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perijinan	50	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan
			Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dan aset Daerah	51	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli Daerah
		Pengembangan Agribisnis	Peningkatan produksi pertanian pangan	52	Program kerawanan dan kewaspadaan pangan	Jumlah wilayah rawan pangan yang terdeteksi
					Program peningkatan produksi	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan

2



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/P RIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
				53	pertanian/perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Pertanian
				54	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rasio kelompok petani yang dibina
			Pemenuhan sarana dan prasarana produksi pertanian	55	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Rasio kelompok tani yang terfasilitasi
			Peningkatan produksi perikanan	56	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)
				57	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)
				58	Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi hasil pengolahan produksi perikanan (ton)
			Peningkatan produktivitas perkebunan	59	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
				60	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktivitas Tanaman Pangan
				61	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Nilai Produksi Komoditi Perkebunan
						Nilai Produksi Komoditi Pertanian
			Peningkatan pendistribusian hasil produksi perkebunan	62	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Nilai produksi pertanian yang dipasarkan
			Peningkatan produksi peternakan	63	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Nilai Produksi Komoditi Peternakan
				64	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase kasus temuan penyakit ternak yang ditangani



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
	Pengelolaan industri pariwisata	Peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata	Pengembangan potensi kepariwisataan Daerah	65	Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan *)	Rasio kelompok ternak yang terfasilitasi
				66	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rasio obyek wisata yang dikembangkan
				67	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)
				68	Program Sarana Promosi Parawisata *)	Rasio obyek wisata yang dipromosikan
				69	Program Pengembangan Pasar Pariwisata *)	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)
Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan Daerah	70	Program perencanaan pembangunan Daerah	Rasio Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)

PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/P RIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	71	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rasio jabatan yang tepenuhi
			Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran	72	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu
			Pemberdayaan pemerintah desa terkait tertib administrasi kependudukan masyarakat	73	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP)

9



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)

PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/P RIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Penguatan kapasitas keamanan lingkungan berbasis masyarakat	74	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penegakan Perda
				75	Program pendidikan politik masyarakat	Rasio Pembinaan politik Daerah
			Peningkatan kewaspadaan terjadinya bencana alam	76	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)	Persentase kejadian bencana yang tertangani
				77	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan *)	Persentase penanganan kebakaran hutan
Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa		Pelestarian kebudayaan Daerah	Integrasi budaya dan pariwisata	78	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)
				79	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase budaya yang dikembangkan



6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

6.3.1. Pengembangan Potensi Prioritas di Kabupaten Gunung Mas

Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi Daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kewilayahan ini ditinjau berdasarkan dokumen perencanaan pada level Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, tinjauan-tinjauan dan data pendukung lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan. Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek ruang (spasial) sangat diperlukan untuk menentukan daerah-daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km². Pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 14 Kabupaten/Kota. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118,49 km²). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, komoditi pertanian dan pertambangan di Kalimantan Tengah masih cukup stabil, sehingga dapat dikembangkan menjadi industri hulu.

q.



Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
PRIORITAS/AGEN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 TAHUN KABUPATEN GUNUNG MAS	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN (ARAH KEBIJAKAN) KABUPATEN GUNUNG MAS	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS		INDIKATOR
			Peningkatan performa penyelenggaraan kebudayaan Daerah	80	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan
Membangun Lingkungan Hidup,Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berkelanjutan	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan	81	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
				82	Program peningkatan pengendalian polusi	Pencemaran status mutu air
				83	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Lingkungan
				Peningkatan kualitas penanganan persampahan	84	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan **Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah**, yang dibagi menjadi **3 Zona**. Antara lain **Zona 1 (Barat)**, **Zona 2 (Tengah)**, dan **Zona 3 (Timur)**, dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

Tabel 6.4.
Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah

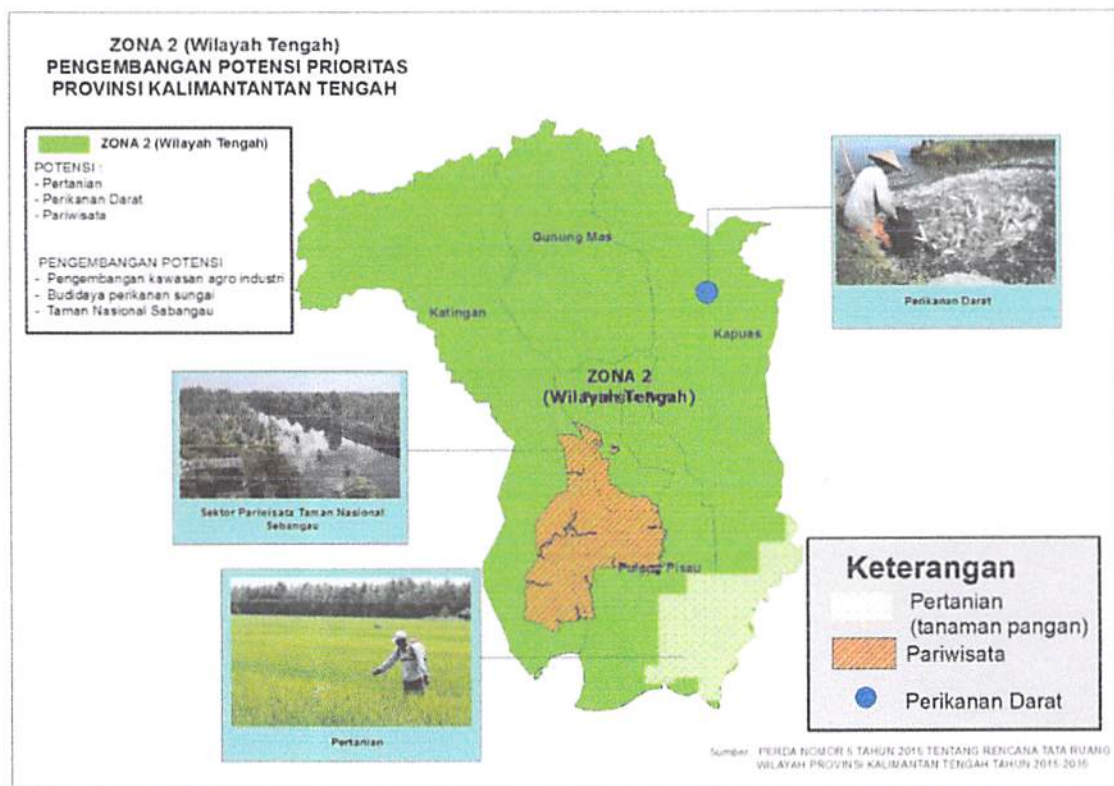
No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
1	Zona 1 (Barat)	• Sukamara • Lamandau • Kotawaringin Barat • Seruyan • Kotawaringin Timur	- Kelapa Sawit (CPO) - Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll) - Perikanan tangkap - Pariwisata	➤ Industri berbasis sawit ➤ Industri berbasis metal ➤ Industri berbasis perikanan tangkap ➤ Taman Nasional Tanjung Puting
2	Zona 2 (Tengah)	• Katingan • Gunung Mas • Palangka Raya • Pulang Pisau • Kapuas	- Pertanian (tanaman pangan) - Perikanan darat - Pariwisata	➤ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas ➤ Budidaya perikanan sungai ➤ Taman Nasional Sebangau
3	Zona 3 (Timur)	• Murung Raya • Barito Utara • Barito Selatan • Barito Timur	- Batubara - Hasil hutan (kayu, rotan, dll) - Karet - HOB (<i>Heart Of Borneo</i>)	➤ Pembangkit tenaga listrik ➤ Industri berbasis hasil hutan ➤ Industri berbasis karet (<i>rubber industry</i>) ➤ Konservasi Hayati di pegunungan <i>Muller Schwaner</i>

Sumber: Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035.

2



Secara spasial, pengembangan potensi prioritas dan pengembangan potensi masing-masing zona di Kalimantan Tengah melalui pembagian wilayah atau zonasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

Gambar 6.2. Pengembangan Potensi
(Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya,
Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas)

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi Daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan. Perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Kabupaten Gunung Mas memiliki sumberdaya alam yang potensial khususnya pada hasil pertambangan. Bahan tambang yang terdapat di Gunung Mas cukup potensial terdiri atas mineral logam, batu bara, dan bahan galian golongan C.



Dari berbagai sektor tersebut Sektor perkebunan menjadi sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas dengan **komoditi utama karet**. Perkebunan karet merupakan komoditi perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Gunung Mas. Usaha budidaya karet merupakan usaha yang turun-temurun di masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Proses perkembangan karet di Kabupaten Gunung Mas dapat dikatakan sangat bagus. Hal ini disebabkan adanya dukungan Pemerintah serta pasar yang terbuka lebar. Cukup banyak lembaga keuangan/perbankan yang memfasilitasi permodalan untuk budidaya karet. Prospek budidaya karet semakin baik sebab kualitas karet Mentah Kabupaten Gunung Mas cukup bagus. Dari segi budidaya juga mudah. Para petani cukup memahami cara pengelolaan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak memerlukan peralatan canggih.

Tabel 6.5.
Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet Kabupaten Gunung Mas

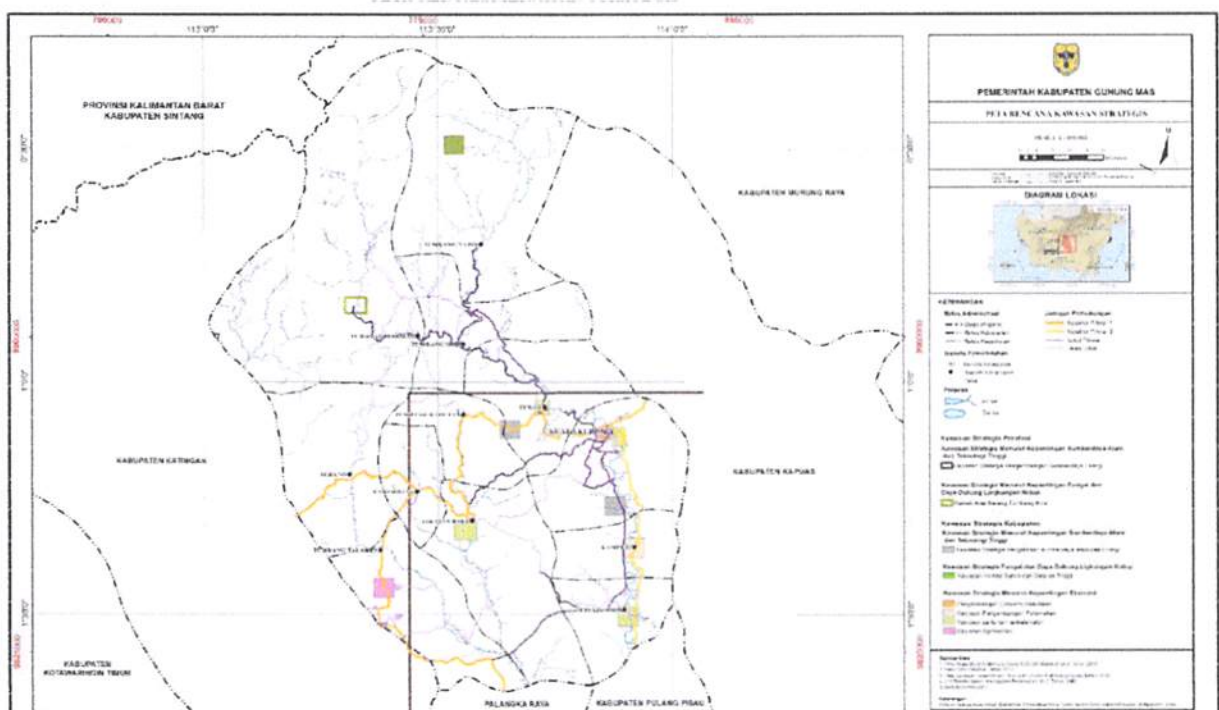
Peluang	Tantangan
▪ Lahan untuk pengembangan tersedia luas. ▪ Masyarakat familiar dengan karet, karena sebagian besar masyarakat bergerak di sektor pertanian. ▪ Transportasi lancar. ▪ Dukungan Pemerintah cukup tinggi. ▪ Prospek cukup bagus karena kualitas karet mentah cukup bagus. Karenanya pasar cukup mudah. ▪ Sumber permodalan sebenarnya banyak baik dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan mendukung komoditi ini	▪ Harga yang masih fluktuatif. ▪ Belum adanya asosiasi sebagai wadah koordinasi antar petani karet. ▪ Kualitas sumber daya manusia masih rendah pengendalian harga dan mutu masih kurang. ▪ Belum terdapat industri pengolahan karet yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga mata rantai pemasaran menjadi lebih panjang.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
▪ Teknologi produksi/pengolahan karet yang selalu dikembangkan. ▪ Para petani memahami cara pengolahan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus dan cukup mudah, juga tidak memerlukan peralatan yang canggih.	▪ Tidak adanya kontrol kualitas terhadap bibit lokal/tidak (bibit unggul) juga dalam hal peremajaan dari instansi terkait. ▪ Pemasaran tergantung tengkulak, dikuasai oleh jaringan-jaringan tertentu.



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasokan cukup banyak karena area perkebunan cukup luas. ▪ Hanya sampai pengelolaan slop karet tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses produksi yang agak lama dan dikelola secara tradisional. ▪ Kurangnya sarana distribusi seperti angkutan. ▪ Manajemen usaha yang masih sederhana. |
|--|---|

6.3.2. Prioritas Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Gunung Mas

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Gunung Mas, terdapat peta yang menggambarkan kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. Gambaran Peta adalah sebagai berikut.



Gambar 6.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Gunung Mas

Dilihat pada tabel di atas digambarkan bahwa, kawasan strategis menurut kepentingan ekonomi terbagi menjadi empat antara lain: Pengembangan ekonomi perkotaan, kawasan pengembangan peternakan, kawasan pertanian berkelanjutan, dan kawasan agropolitan.

4



Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan mendominasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang ditandai dengan warna hijau muda. Menurut peta kawasan strategis di atas, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan terdapat pada empat titik yaitu Kuala Kurun, Jakatan Raya, Sepang Simin, dan Tewah.

6.3.3. Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunung Mas

Mengikuti arus jaman yang sudah memasuki era Industri 4.0. Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk mengatur strategi dalam menyambut era tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat dalam menghadapi era Industri 4.0. diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur kelistrikan bersumber dari energi baru terbarukan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 2 Desa yaitu Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing sebanyak 127 Unit, Desa Tumbang Mujai Kecamatan Rungan sebanyak 45 Unit.
2. Pengembangan kawasan dan kegiatan perhutanan sosial di Kabupaten Gunung Mas yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Tahura Lapak Jaru luas $\pm$ 5.000 ha.
 - b. 2 (dua) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) luas $\pm$ 2.400 ha.
 - c. 11 (sebelas) Hutan Kemasyarakatan (HKM) luas $\pm$ 9.354 ha.
 - d. 6 (enam) Hutan Desa (HD) luas $\pm$ 4.296 ha.

4



3. Inovasi pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam hal inovasi pelayanan diharapkan Pemerintahan Gunung Mas meluncurkan sistem pelayanan di bidang perdagangan dan industri kecil menengah. Sistem pelayanan berbasis aplikasi ini dapat memudahkan perizinan bagi pelaku usaha serta sebagai sarana promosi bagi barang-barang milik UKM.

4. Pengembangan Program untuk pembuatan TPA menggunakan metode *Sanitary landfill*.

Sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Metode ini efektif untuk mengurangi bau tidak sedap juga mencegah berkembangnya bibit penyakit yang ada dalam sampah sehingga tidak sampai ke wilayah pemukiman.

6.4. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024.

4



Program-program pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2019-2024 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program pembangunan Daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah (Lampiran I tabel 6.6).

g.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program-program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD.

Kerangka Pendanaan Pembangunan berisi jumlah dana yang tersedia untuk menyelenggarakan pembangunan, Berikut kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024:

Tabel 7.1.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas riil keuangan	493.619	500.325	507.164	514.140	521.257
BELANJA	1.077.096	1.095.461	1.114.193	1.133.300	1.152.790
Belanja Tidak Langsung	583.477	595.136	607.029	619.160	631.533
Belanja Pegawai	394.399	402.287	410.333	418.540	426.911
Belanja Bunga	765	780	796	812	828
Belanja Hibah	12.895	13.153	13.416	13.684	13.958
Belanja Bantuan Sosial	1.597	1.629	1.662	1.695	1.729
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	173.321	176.787	180.322	183.929	187.607
Belanja Tidak Terduga	500	500	500	500	500
Belanja Langsung	493.619	500.325	507.164	514.140	521.257

Program Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas berisi program-program pembangunan baik untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program

4



prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan terlampir dalam tabel 7.2. Sedangkan rekap pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 terlampir dalam tabel 7.3.

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

[illegible]

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.04 - 3.02.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan				19.230.036		19.401.297		19.757.727		20.029.497		20.306.721		98.815.269	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.04 - 3.02.01 - 19	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)	Persentase penyelesaian sara batas wilayah		96%	19.230.036	95%	19.401.297	97%	19.757.727	98%	20.029.497	100%	20.306.721	100%	98.815.269	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.04 - 4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH				208.859.558		211.697.036		214.390.674		217.947.904		220.552.551		1.673.241.672	SETDA
2.04 - 4.01.01 - 16	Program perbaikan pengumbaran, pemukiman, pembangunan dan pemeliharaan tanah	Luas lahan pembangunan yang dipenuhi			173.070.324		175.421.585		177.819.547		180.263.474		182.760.487		889.337.418	SETDA
2.04 - 4.01.01 - 19	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)	Persentase penyelesaian sara batas wilayah		96%	35.789.234	95%	36.279.451	97%	36.771.326	98%	37.277.120	100%	37.793.084	100%	183.806.194	SETDA
2.05	Lingkungan Hidup				14.635.000.192		14.824.750.100		15.028.700.100		15.233.079.236		15.443.919.536		76.193.186.350	
2.05 - 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan				9.103.237.678		9.220.930.703		9.333.066.189		9.481.712.521		9.612.946.715		46.777.807.604	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 61	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	4.238.361.339	100%	4.295.941.933	100%	4.354.666.272	100%	4.414.505.117	100%	4.475.666.095	100%	21.779.700.704	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		96%	538.342.876	80%	563.901.110	90%	571.609.482	95%	579.472.031	98%	587.492.309	95%	2.858.817.873	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 3.01.01 - 63	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		96%	74.420.339	95%	75.431.282	97%	76.462.403	98%	77.514.134	99%	78.567.009	99%	382.415.090	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 65	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	347.476.098	80%	352.196.731	83%	357.011.159	86%	361.821.886	87%	366.931.183	87%	1.785.337.007	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 66	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu		100%	113.371.313	100%	115.063.566	100%	118.636.451	100%	119.340.798	100%	119.877.342	100%	583.339.469	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persempaian	Persentase penanganan sampah (%)		96%	879.498.668	92%	886.730.048	94%	898.144.789	96%	907.747.845	100%	917.543.619	100%	3.481.684.966	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase hulu lingkungan		100%	308.836.492	100%	313.310.402	100%	320.339.084	100%	327.889.134	100%	335.002.896	100%	2.803.398.949	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 17	Program Perindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan smpai		100%	28.069.404	100%	29.464.329	100%	29.867.098	100%	30.277.923	100%	30.666.993	100%	148.375.788	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				801.403.352		809.373.765		817.905.463		826.403.831		835.075.770		3.490.365.181	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 20	Program peningkatan pengendalian air	Persentase status mutu air		33,8	42.519.746	32,3	43.097.402	31,9	43.686.511	31,02	44.287.444	30,14	44.900.418	30,14	218.491.338	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.01 - 95	Program pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan *)	Persentase penanganan kebakaran hutan		100%	1.914.008.220	100%	1.946.011.130	100%	1.986.330.524	100%	1.993.580.359	100%	2.021.173.045	100%	9.835.303.277	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.05 - 2.05.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3.414.735.319		3.488.337.503		3.583.341.820		3.635.885.961		3.717.628.065		27.834.268.894	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 61	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	1.591.594.751	100%	1.613.215.515	100%	1.635.271.761	100%	1.657.765.097	100%	1.680.705.841	100%	8.178.582.965	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		96%	234.766.890	90%	237.988.131	90%	241.208.923	98%	244.526.777	98%	247.911.216	98%	1.206.369.738	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 63	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		96%	28.268.193	95%	28.652.192	97%	29.043.859	98%	29.443.381	99%	29.850.880	99%	148.338.445	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 65	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	120.167.728	80%	121.630.545	83%	123.465.757	86%	125.184.357	87%	126.917.005	87%	617.595.429	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 66	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu		100%	18.890.382	100%	17.119.847	100%	17.333.871	100%	17.592.375	100%	17.836.070	100%	86.792.741	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana Bencana *)	Persentase kejadian bencana yang tertangani		100%	73.917.968	100%	74.922.186	100%	75.946.351	100%	76.961.001	100%	78.056.816	100%	379.834.123	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 54	Program Ketahanan dan Logistik Penanggulangan Bencana *)	High respon (waktu kecapatan ke tempat bencana)			93.363.598		96.860.869		98.184.979		99.832.473		100.915.121		491.256.968	BPRD
2.05 - 2.05.02 - 65	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan *)	Persentase penanganan kebakaran hutan		100%	3.253.585.052	100%	3.287.786.617	100%	3.340.846.137	100%	3.388.827.340	100%	3.435.731.317	100%	18.718.738.465	BPRD
2.05 - 2.05.02	SATUAN POLISIT RAMOHO PRATA				107.047.501		108.501.499		109.884.583		111.497.834		113.040.746		850.671.682	SATPOL PP
2.05 - 2.05.02 - 25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana Bencana *)	Persentase kejadian bencana yang tertangani		100%	107.047.501	100%	108.501.499	100%	109.884.583	100%	111.497.834	100%	113.040.746	100%	550.071.642	SATPOL PP
2.06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil				4.327.205.945		4.385.994.598		4.443.940.681		4.507.104.362		4.569.486.184		22.235.742.040	Diskutasi
2.06 - 2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	2.353.493.777	100%	2.385.467.353	100%	2.418.076.004	100%	2.451.336.898	100%	2.485.263.284	100%	12.493.639.312	Diskutasi
2.06 - 2.06.01 - 62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		96%	198.330.122	90%	201.247.500	90%	203.968.538	95%	206.804.538	95%	209.866.892	95%	1.020.287.849	Diskutasi
2.06 - 2.06.01 - 66	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu		100%	20.824.214	100%	20.904.406	100%	21.190.163	100%	21.481.630	100%	21.778.958	100%	105.979.376	Diskutasi
2.06 - 2.06.01 - 15	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)		100%	1.581.469.515	100%	1.602.975.372	100%	1.624.387.583	100%	1.647.238.084	100%	1.670.637.126	100%	8.126.638.680	Diskutasi
2.06 - 2.06.01 - 16	Program Pencatatan Sipil *)	Persentase sara ketahanan per 1000 penduduk			173.046.958		175.391.928		177.797.054		180.243.219		182.737.924		889.227.623	Diskutasi
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				5.831.333.232		5.830.630.182		5.831.020.842		5.832.583.102		5.833.977.004		28.782.697.184	
2.07 - 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.801.263.195		5.877.372.871		5.794.966.019		5.834.146.969		5.914.697.991		28.782.697.184	DPMD
2.07 - 2.07.01 - 61	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	2.031.600.598	100%	2.059.300.858	100%	2.087.349.539	100%	2.116.081.253	100%	2.145.349.186	100%	10.439.381.203	DPMD
2.07 - 2.07.01 - 62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		96%	284.497.700	80%	286.362.766	90%	292.304.602	95%	298.525.252	95%	300.438.852	95%	1.461.817.004	DPMD
2.07 - 2.07.01 - 63	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		96%	87.090.697	95%	88.273.874	97%	89.460.553	98%	90.711.367	99%	91.966.881	99%	447.323.372	DPMD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outsourcing)	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024			Kendali Kinerja Pada AKHR RPJMD	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	66.770.958	80%	67.878.081	83%	68.603.230	85%	69.546.868	87%	70.509.447	87%	343.108.572	DPMD
2.07.2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu		100%	16.238.697	100%	16.456.309	100%	16.684.303	100%	16.913.798	100%	17.147.898	100%	83.444.103	DPMD
2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Proporsi organisasi masyarakat yang diberdayakan pedesaan		90%	276.045.861	98%	279.775.771	97%	283.600.223	98%	287.801.170	100%	291.480.414	100%	1.418.383.387	DPMD
2.07.2.07.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)			198.934.723		201.637.366		204.393.661		207.205.148		210.073.026		1.022.243.954	DPMD
2.07.2.07.01.17	Program peningkatan sertifikasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		90%	791.143.981	95%	801.892.130	97%	812.853.764	98%	824.074.654	100%	835.439.928	100%	4.088.304.437	DPMD
2.07.2.07.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih		75%	741.167.788	80%	751.236.582	83%	761.506.173	85%	771.880.773	87%	782.866.581	87%	3.608.857.286	DPMD
2.07.2.07.01.19	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah PKK aktif			899.871.673		912.096.651		924.585.633		937.282.644		950.196.295		4.824.071.476	DPMD
2.07.2.07.01.26	Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat ekuitas TTG			207.940.790		210.705.788		213.646.893		216.585.829		219.583.341		1.090.822.438	DPMD
2.07.4.01.10	KECAMATAN KURUN				25.840.248		25.988.383		26.343.637		26.705.998		27.078.628		131.753.692	KECAMATAN KURUN
2.07.4.01.10.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.840.248	95%	25.988.383	95%	26.343.637	95%	26.705.998	95%	27.078.628	95%	131.753.692	KECAMATAN KURUN
2.07.4.01.11	KECAMATAN TEWAH				25.704.148		25.852.194		26.207.448		26.572.761		26.943.317		132.083.278	KECAMATAN TEWAH
2.07.4.01.11.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.704.148	95%	25.852.194	95%	26.207.448	95%	26.572.761	95%	26.943.317	95%	132.083.278	KECAMATAN TEWAH
2.07.4.01.12	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA				25.840.248		25.988.383		26.343.637		26.705.998		27.078.628		131.753.692	Kec. KAHAYAN HULU UTARA
2.07.4.01.12.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.840.248	95%	25.988.383	95%	26.343.637	95%	26.705.998	95%	27.078.628	95%	131.753.692	Kec. KAHAYAN HULU UTARA
2.07.4.01.13	KECAMATAN SIPANG				13.248.224		13.302.133		13.363.837		13.426.878		13.491.192		66.818.814	KECAMATAN SIPANG
2.07.4.01.13.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	13.248.224	95%	13.302.133	95%	13.363.837	95%	13.426.878	95%	13.491.192	95%	66.818.814	KECAMATAN SIPANG
2.07.4.01.14	KECAMATAN MANUHUNG				25.840.248		25.988.383		26.343.637		26.705.998		27.078.628		131.753.692	KECAMATAN MANUHUNG
2.07.4.01.14.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.840.248	95%	25.988.383	95%	26.343.637	95%	26.705.998	95%	27.078.628	95%	131.753.692	KECAMATAN MANUHUNG
2.07.4.01.15	KECAMATAN RUMAH				30.981.731		31.402.029		31.831.894		32.269.745		32.716.383		159.202.377	KECAMATAN RUMAH
2.07.4.01.15.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	30.981.731	95%	31.402.029	95%	31.831.894	95%	32.269.745	95%	32.716.383	95%	159.202.377	KECAMATAN RUMAH
2.07.4.01.16	KECAMATAN HIRING RAYA				25.840.248		25.988.383		26.343.637		26.705.998		27.078.628		131.753.692	KECAMATAN HIRING RAYA
2.07.4.01.16.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.840.248	95%	25.988.383	95%	26.343.637	95%	26.705.998	95%	27.078.628	95%	131.753.692	KECAMATAN HIRING RAYA
2.07.4.01.17	KECAMATAN RUMAH HULU				25.840.248		25.988.383		26.343.637		26.705.998		27.078.628		131.753.692	KECAMATAN RUMAH HULU
2.07.4.01.17.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.840.248	95%	25.988.383	95%	26.343.637	95%	26.705.998	95%	27.078.628	95%	131.753.692	KECAMATAN RUMAH HULU
2.07.4.01.18	KECAMATAN DAMANG BATU				11.297.816		11.491.131		11.687.665		11.887.130		12.090.198		58.053.670	KECAMATAN DAMANG BATU
2.07.4.01.18.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	11.297.816	95%	11.491.131	95%	11.687.665	95%	11.887.130	95%	12.090.198	95%	58.053.670	KECAMATAN DAMANG BATU
2.07.4.01.19	KECAMATAN MANUHUNG RAYA				25.840.248		25.988.383		26.343.637		26.705.998		27.078.628		131.753.692	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
2.07.4.01.19.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	25.840.248	95%	25.988.383	95%	26.343.637	95%	26.705.998	95%	27.078.628	95%	131.753.692	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
2.07.4.01.20	KECAMATAN MIRI MANASA				15.277.193		15.484.743		15.696.417		15.912.323		16.132.661		78.503.241	KECAMATAN MIRI MANASA
2.07.4.01.20.22	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa	Rata-rata tingkat serapan keuangan desa		95%	15.277.193	95%	15.484.743	95%	15.696.417	95%	15.912.323	95%	16.132.661	95%	78.503.241	KECAMATAN MIRI MANASA
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.055.453.081		5.124.134.339		5.194.179.779		5.265.626.272		5.338.506.896		23.977.900.082	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.055.453.081		5.124.134.339		5.194.179.779		5.265.626.272		5.338.506.896		23.977.900.082	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)			77.294.602		78.344.146		79.415.688		80.507.481		81.611.736		357.182.481	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio Akseptor KB (orang)			79.858.066		80.942.584		82.049.452		83.178.051		84.329.290		410.357.852	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.25	Program Keluarga Sejahtera (*)	Jumlah PKK Aktif di SMP/SMK/organisasi kepemudaan			161.200.585		163.390.588		165.624.050		167.902.267		170.226.184		828.343.593	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.26	Program Pengendalian Perilaku (*)	Jumlah PKK Aktif (orang)			184.967.040		187.067.269		189.214.384		191.404.364		193.636.325		796.286.373	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.27	Program Penyuluhan dan Perserikan KB (*)	Jumlah kelompok bina (kelompok)			174.083.876		176.428.635		178.846.383		181.350.331		183.959.688		846.942.873	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.29	Program Meningkatkan Dukungan Sarana Prasarana Perencanaan KB (*)	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana KB yang terpenuhi		90%	1.376.774.293	95%	1.395.478.542	97%	1.414.552.300	98%	1.434.009.641	100%	1.453.857.418	100%	7.074.509.179	DPKPB & PPKA
2.08.2.08.01.30	Berkas Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (*)	Jumlah program kerja KB yang terdapat (program)			3.031.303.159		3.072.484.154		3.114.484.128		3.157.324.186		3.201.023.982		13.376.618.805	DPKPB & PPKA
2.09	Perhubungan				998.239.087		971.086.702		984.505.075		998.106.708		1.011.963.901		4.928.156.977	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.09.2.09.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan				998.239.087		971.086.702		984.505.075		998.106.708		1.011.963.901		4.928.156.977	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.09.2.09.01.15	Program Peningkatan Fasilitas dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bk dalam kondisi baik			94.825.444		96.113.703		97.427.550		98.767.876		100.134.696		467.289.169	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.09.2.09.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Penurunan Angka/Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas			361.415.707		366.325.749		371.333.310		376.441.040		381.651.279		1.897.187.097	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.09.2.09.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bk dalam kondisi baik			26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.193.779		137.243.419	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.09.2.09.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas		75%	148.792.941	80%	250.145.788	83%	253.565.186	85%	257.053.043	87%	260.610.814	87%	1.368.187.709	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelancaran pengoperasian kendaraan bermotor	Keperluan KIR angkutan umum			228.527.612		231.832.292		234.798.038		238.028.318		241.522.813		1.174.309.873	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
2.10	Kependudukan dan Tata Kelola				17.809.135.758		17.867.898.638		17.926.130.724		17.985.006.351		18.044.807.345		69.167.580.633	Dindikcapil
2.10.2.08.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN KIRIL				18.025.030		18.242.750		18.464.773		18.692.287		18.924.287		42.346.037	Dindikcapil

f

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024			Kendali Kinerja Pada Akhir RPJMD	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
2.10.2.4.6.01.19	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)	Jumlah kunjungan website		16.925.630		16.243.739		16.464.773		16.691.248		16.922.267		82.346.037	Ditdisdikapj	
2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik			11.879.956.483		11.433.261.223		11.599.469.792		11.748.504.451		11.911.518.318		57.963.070.277	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik	
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	2.546.152.198	100%	2.586.743.148	100%	2.619.021.164	100%	2.852.004.812	100%	2.888.710.598	100%	13.082.631.917	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	1.347.170.858	90%	1.305.473.654	90%	1.394.138.976	95%	1.403.177.549	95%	1.422.598.005	95%	6.922.559.542	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	41.056.127	95%	41.813.888	97%	42.182.748	98%	42.762.978	99%	43.354.849	99%	210.570.599	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	57.105.940	80%	57.932.437	83%	58.734.357	85%	59.532.318	87%	60.356.087	87%	293.700.937	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu		100%	32.725.782	100%	33.170.381	100%	33.623.810	100%	34.089.369	100%	34.558.090	100%	168.164.373	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Media Telekomunikasi yang dikendalikan		100%	34.720.898	100%	35.193.602	100%	35.673.675	100%	36.164.370	100%	36.664.913	100%	178.418.457	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media				128.200.240		129.941.815		131.718.183		133.529.981		135.378.138		658.768.458	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.19	Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika *)	Persentase sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang terakrui		75%	2.979.320.166	80%	3.019.795.658	83%	3.061.075.697	85%	3.103.181.117	87%	3.146.131.531	87%	15.309.504.468	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Persentase kegiatan pembangunan yang dapat diakses publik		100%	2.824.758.017	100%	3.876.719.570	100%	3.929.713.210	100%	3.983.769.831	100%	4.038.905.228	100%	19.653.692.857	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.22	Program Penyelenggaraan Pemindaian Untuk Pengambilan Informasi Milik Pemerintah Daerah*)	Persentase informasi milik sendiri yang diarsipkan		100%	132.452.215	100%	134.251.855	100%	136.086.836	100%	137.958.725	100%	139.858.180	100%	680.617.611	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.23	Program Pembinaan Layanan Elektronik dan Teknologi Informasi *)	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terakreditasi		100%	57.896.108	100%	58.473.862	100%	59.273.182	100%	60.089.491	100%	60.920.162	100%	296.445.808	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.25	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)	Jumlah kunjungan website			48.190.585		48.861.523		49.430.660		47.069.318		47.720.794		232.213.881	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.2.10.01.26	Program Aplikasi dan Informatika *)	Cakupan penerapan E-Gov			83.363.350		84.686.322		84.927.694		85.581.855		86.391.150		274.212.370	Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik
2.10.4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH				139.796.337		141.685.413		143.822.214		145.597.753		147.612.938		718.304.657	SETDA
2.10.4.01.01.20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)	Persentase kegiatan pembangunan yang dapat diakses publik		100%	139.796.337	100%	141.685.413	100%	143.822.214	100%	145.597.753	100%	147.612.938	100%	718.304.657	SETDA
2.10.4.01.02	SEKRETARIAT DPRD				683.387.808		673.366.960		680.543.947		689.504.961		699.492.718		3.403.637.631	SET DPRD
2.10.4.01.02.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase kegiatan pembangunan yang dapat diakses publik		100%	683.387.808	100%	673.366.960	100%	680.543.947	100%	689.504.961	100%	699.492.718	100%	3.403.637.631	SET DPRD
2.11	Kawasan Usaha Kecil dan Menengah				2.387.727.256		2.477.030.295		2.570.107.554		2.669.270.187		2.769.221.100		13.690.826.377	
2.11.2.11.01	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				2.387.727.256		2.477.030.295		2.570.107.554		2.669.270.187		2.769.221.100		13.690.826.377	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	1.419.539.933	100%	1.438.245.303	100%	1.458.493.531	100%	1.479.551.284	100%	1.499.019.608	100%	7.294.433.540	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	268.886.337	90%	272.330.556	90%	276.059.359	95%	279.855.585	95%	283.730.015	95%	1.380.548.492	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	38.460.072	95%	38.982.574	97%	39.515.413	98%	40.058.994	99%	40.613.443	99%	197.570.577	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	121.256.061	80%	122.903.394	83%	124.583.448	85%	126.297.107	87%	128.045.156	87%	623.585.166	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu		100%	30.277.692	100%	30.646.032	100%	31.105.842	100%	31.538.443	100%	31.972.922	100%	155.584.640	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.15	Program peningkatan krm usaha Usaha Kecil Menengah yang konvensional	Jumlah UMKH		2.872	369.483.770	2.885	374.503.427	2.999	379.622.781	3.013	384.844.532	3.027	390.171.077	3.027	1.896.525.592	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKH Yang Mulus dan Omzet Meningkat		41	171.849.438	41	173.981.385	41	176.389.671	41	178.785.517	41	181.250.046	41	882.038.467	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kolaborasi Koperasi	Koperasi Aktif (%)		81	26.708.363	83	27.071.232	86	27.441.288	73	27.818.746	76	28.203.779	78	157.243.429	Ditranstraker KUMH
2.11.2.11.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Nelayan *)	Persentase PKL yang dibina		75%	455.245.967	80%	461.430.778	83%	467.738.404	85%	474.173.195	87%	480.735.113	87%	2.339.322.476	Ditranstraker KUMH
2.11.4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH				36.430.335		36.625.181		37.405.812		37.664.770		38.009.854		187.200.637	SETDA
2.11.4.01.01.15	Program peningkatan krm usaha Usaha Kecil Menengah yang konvensional	Jumlah UMKH		2.872	36.430.335	2.885	36.915.181	2.999	37.429.917	3.013	37.944.770	3.027	38.469.954	3.027	187.200.637	SETDA
2.12	Pengembangan Modal				2.818.828.956		2.853.031.533		2.898.853.385		2.944.462.060		2.990.271.569		15.932.551.813	
2.12.2.12.01	DINAS PENANAIAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KATU BONTU				2.818.828.956		2.853.031.533		2.898.853.385		2.944.462.060		2.990.271.569		15.932.551.813	DPMPTSP
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	1.195.509.163	100%	1.212.784.454	100%	1.229.543.594	100%	1.246.262.332	100%	1.263.501.423	100%	6.149.369.686	DPMPTSP
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	259.740.552	90%	263.269.278	90%	266.868.653	95%	270.579.994	95%	274.283.358	95%	1.334.700.172	DPMPTSP
2.12.2.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	22.915.793	95%	23.217.117	97%	23.544.615	98%	23.889.494	99%	24.198.842	99%	117.754.062	DPMPTSP
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	154.374.456	80%	156.471.722	83%	158.610.646	85%	160.792.352	87%	163.017.843	87%	793.267.016	DPMPTSP
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN dan PMA		50	299.439.476	53	302.493.949	60	306.628.954	65	310.849.688	70	315.149.028	70	1.533.888.672	DPMPTSP
2.12.2.12.01.18	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *)	Persentase Pengajuan perjanjian dan non perjanjian yang diselesaikan tepat waktu		80	324.408.175	80	328.904.643	80	333.400.875	80	337.996.637	80	342.664.632	80	1.667.462.781	DPMPTSP

4

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (output)	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Prediksis										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024			Kendali Kinerja Pada Akhir RPJMD	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
3.02 - 3.02.01 - 34	Program Pembinaan Kader Konservasi *)	Persentase kader konservasi yang dilatih		100%	37.429.129	100%	37.937.625	100%	38.436.221	100%	38.985.191	100%	39.534.776	100%	192.332.941	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan
3.02 - 3.02.01 - 36	Program Penanaman Bumbu pada Kiri Kiri Sungai, Sempadan Dulu dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Hala Air dan Daerah Intubasi Air Tanah *)	Panjang Dampakan sungai dalam kondisi baik			679.299.791		691.651.733		904.046.117		916.460.333		928.165.146		4.321.444.133	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan
3.03	Kebudayaan dan Pariwisata				5.961.797.609		6.042.776.899		6.125.379.699		6.208.815.137		6.292.101.664		30.435.135.757	
3.03 - 3.03.01	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				5.961.797.609		6.042.776.899		6.125.379.699		6.208.815.137		6.292.101.664		30.435.135.757	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	1.538.579.663	100%	1.579.793.870	100%	1.601.346.650	100%	1.623.375.371	100%	1.645.844.134	100%	8.408.801.668	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	186.544.466	90%	189.382.856	90%	191.971.665	95%	194.812.236	95%	197.303.839	95%	960.117.682	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	73.245.071	80%	74.240.147	83%	75.254.989	85%	76.390.129	87%	77.346.043	87%	276.376.379	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktivitas Tanaman Pangan			1.711.164.767		1.734.432.193		1.758.141.381		1.782.324.802		1.806.693.548		8.793.076.680	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 26	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (ton)		4379	2.165.839.729	4718	2.195.284.107	5057	2.225.293.090	5396	2.255.602.232	5734	2.287.125.634	5734	11.129.464.892	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Hasil tangkapan alam sesuai upaya peningkatan (ton)			83.726.559		86.693.241		88.081.047		89.392.611		90.526.489		440.523.957	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.03 - 3.03.01 - 23	Program Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan (ton)	Produksi hasil pengolahan produk perikanan (ton)			180.340.346		182.790.374		185.260.066		187.837.737		190.457.536		926.695.079	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.04	Pariwisata				685.467.161		704.935.778		714.922.047		724.461.661		734.027.326		3.573.831.265	
3.04 - 2.13.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				685.467.161		704.935.778		714.922.047		724.461.661		734.027.326		3.573.831.265	Dinas Pariwisata
3.04 - 2.13.01 - 13	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)			60.601.322		61.424.626		62.264.263		63.120.735		63.994.374		311.465.340	Dinas Pariwisata
3.04 - 2.13.01 - 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rasio obyek wisata yang dikembangkan		82%	236.351.337	85%	239.634.018	87%	263.365.875	90%	267.008.775	95%	270.704.382	95%	1.317.284.587	Dinas Pariwisata
3.04 - 2.13.01 - 18	Program Sarana Promosi Pariwisata *)	Kasus obyek wisata yang dipromosikan		100%	279.473.129	100%	283.260.333	100%	287.142.151	100%	291.091.822	100%	295.120.737	100%	1.436.297.751	Dinas Pariwisata
3.04 - 2.13.01 - 19	Pembudayaan Masyarakat dan Standarisasi Fasilitas Wisata *)	Rasio wisatawan yang dilatih			79.228.855		79.291.639		80.375.533		81.461.107		82.608.868		401.966.003	Dinas Pariwisata
3.04 - 2.13.01 - 20	Program Pengembangan Pasar Pariwisata *)	Jumlah Kunjungan Wisata (orang)			20.532.530		21.115.561		21.404.305		21.698.622		21.998.946		107.049.874	Dinas Pariwisata
3.05	Pertanian				17.822.132.192		17.863.511.011		18.103.799.713		18.354.799.077		18.606.792.923		96.434.529.287	
3.05 - 3.05.01	Dinas Pertanian				17.822.132.192		17.863.511.011		18.103.799.713		18.354.799.077		18.606.792.923		96.434.529.287	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	2.332.132.335	100%	2.363.815.703	100%	2.396.128.363	100%	2.428.687.382	100%	2.462.707.820	100%	11.983.871.823	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	202.449.546	90%	205.190.340	90%	208.004.964	95%	210.866.059	95%	213.794.644	95%	1.040.303.189	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	59.876.779	80%	60.639.560	83%	61.468.496	85%	62.313.991	87%	63.178.405	87%	307.425.260	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 08	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan jasa keuangan yang sesuai hasil petani	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai hasil petani		100%	26.801.500	100%	26.963.547	100%	27.331.523	100%	27.707.471	100%	28.080.564	100%	136.694.455	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 09	Program Pengembangan Sistem Pemenuhan dan Pengukuran Kinerja yang sesuai hasil petani	Persentase dokumen pemenuhan dan pengukuran kinerja yang sesuai hasil petani		100%	181.029.423	100%	183.488.812	100%	185.997.091	100%	188.535.460	100%	191.105.213	100%	930.235.960	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kasus kelompok petani yang dilatih		100%	360.884.608	100%	363.564.506	100%	370.361.667	100%	375.658.782	100%	380.838.189	100%	1.853.307.812	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Nile produksi pertanian yang dipasarkan			21.526.957		21.619.413		22.117.678		22.411.909		22.732.246		110.618.264	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 18	Program peningkatan pemasaran teknologi pertanian/perkebunan	Persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian/perkebunan		75%	47.006.795	80%	47.845.349	83%	48.296.667	85%	48.960.993	87%	49.638.631	87%	241.548.424	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Nile Produk komoditi Perkebunan			1.031.667.408		1.471.349.150		1.491.302.616		1.513.018.392		1.532.943.890		7.409.523.497	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase penyuluh yang diberdayakan		82%	816.803.373	85%	827.697.403	87%	839.011.788	90%	850.552.484	95%	863.324.785	95%	4.198.159.834	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 21	Program pencegahan dan penanganan penyakit ternak	Persentase kasus ternak penyakit ternak yang ditangani		100%	434.365.147	100%	440.298.521	100%	446.305.111	100%	452.444.085	100%	458.766.339	100%	2.232.127.124	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Nile Produk komoditi Peternakan			6.278.669.694		6.402.921.806		6.531.437.039		6.663.363.239		6.796.300.347		47.470.132.514	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 25	Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan *)	Kasus kelompok ternak yang terfasilitasi		82%	22.862.370	85%	23.172.375	87%	23.489.743	90%	23.812.847	95%	24.142.435	95%	117.480.375	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 27	Program ketahanan dan kemandirian pangan *)	Jumlah wilayah rawan pangan yang terfasilitasi			46.590.104		47.223.058		47.866.583		48.527.021		49.186.672		229.407.437	Dinas Pertanian
3.05 - 3.05.01 - 29	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)	Kasus kelompok ternak yang terfasilitasi		82%	2.341.597.659	85%	2.373.713.528	87%	2.406.161.913	90%	2.439.258.925	95%	2.473.020.145	95%	12.034.052.600	Dinas Pertanian
3.06 - 4.61.10	KECAMATAN KUBUN				0		0		0		0		0		0	KECAMATAN KUBUN
3.06 - 4.61.10 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Produktivitas Tanaman Pangan			0		0		0		0		0		0	KECAMATAN KUBUN
3.06	Pendidikan				5.709.827.941		5.748.090.757		5.786.325.570		5.824.591.382		5.862.800.194		28.163.661.369	
3.06 - 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga				5.709.827.941		5.748.090.757		5.786.325.570		5.824.591.382		5.862.800.194		28.163.661.369	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
3.06 - 1.01.01 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan			26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
3.06 - 1.02.01	DINAS KESIHATAN				26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	DINAS KESIHATAN
3.06 - 1.02.01 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan			26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	DINAS KESIHATAN
3.06 - 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KUBUN				26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KUBUN
3.06 - 1.02.02 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan			26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KUBUN
3.06 - 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM				26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	Dinas Pekerjaan Umum
3.06 - 1.03.01 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan			26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	Dinas Pekerjaan Umum
3.06 - 1.03.02	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				26.708.383		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.429	BAKOSBANGPOL

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (output)	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Koreksi Pelaksanaan								KORNET KINERJA PERAS XHNP RP2020				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024				
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	BAKESBANGPOL	
3.06.1.4.1.01	SATUAN POLISI RAMBONG PEJAJA			21.366.707		21.856.088		21.953.031		22.254.997		22.563.023		109.794.743	SATPOL PP	
3.06.1.4.1.02.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		21.366.707		21.856.088		21.953.031		22.254.997		22.563.023		109.794.743	SATPOL PP	
3.06.1.4.1.02	DINAS SOSIAL			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	DINAS SOSIAL	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	DINAS SOSIAL	
3.06.1.4.1.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan			80.129.110		81.213.697		82.323.860		83.456.238		84.611.337		411.730.286	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		80.129.110		81.213.697		82.323.860		83.456.238		84.611.337		411.730.286	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	
3.06.1.4.1.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	BPRD	
3.06.1.4.1.02.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	BPRD	
3.06.1.4.1.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			20.729.706		21.007.278		21.294.440		21.597.347		21.896.132		106.806.961	Disdukcapil	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		20.729.706		21.007.278		21.294.440		21.597.347		21.896.132		106.806.961	Disdukcapil	
3.06.1.4.1.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	DPMD	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	DPMD	
3.06.1.4.1.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Dinas komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
3.06.1.4.1.01	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Dinas tenaga KUKM	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Dinas tenaga KUKM	
3.06.1.4.1.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KONTOR			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	DPHPTSP	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	DPHPTSP	
3.06.1.4.1.01	Dinas Kebumihutan dan Perikanan			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Disnaker	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Disnaker	
3.06.1.4.1.01	DINAS PERPUNTAKAN DAN KEARSIPAN			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Perpustakaan dan Kearsipan	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Perpustakaan dan Kearsipan	
3.06.1.4.1.01	Dinas Pertanian			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Dinas Pertanian	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	Dinas Pertanian	
3.06.1.4.1.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			4.105.871.492		4.181.416.377		4.259.116.191		4.338.366.836		4.418.946.934		21.697.391.791	Disnakerdag	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan lokasi kios perdagangan yang diperdagang	100%	243.046.947		246.342.769	100%	249.710.234	100%	253.145.035	100%	256.648.742	100%	260.287.732	Disnakerdag	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN DAERAH			108.833.824		108.284.529		109.798.113		111.274.984		112.818.113		548.973.715	SETDA	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		108.833.824		108.284.529		109.798.113		111.274.984		112.818.113		548.973.715	SETDA	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN DPRD			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	SET DPRD	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	SET DPRD	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN KURUN			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	KECAMATAN KURUN	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	KECAMATAN KURUN	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN TEPAH			22.989.210		23.281.260		23.598.508		23.924.122		24.266.250		118.029.349	KECAMATAN TEPAH	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		22.989.210		23.281.260		23.598.508		23.924.122		24.266.250		118.029.349	KECAMATAN TEPAH	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN SEPAH			21.366.707		21.856.088		21.953.031		22.254.997		22.563.023		109.794.743	KECAMATAN SEPAH	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		21.366.707		21.856.088		21.953.031		22.254.997		22.563.023		109.794.743	KECAMATAN SEPAH	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN MANUHUNG			24.892.213		25.230.388		25.578.281		25.927.071		26.285.974		127.810.876	KECAMATAN MANUHUNG	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		24.892.213		25.230.388		25.578.281		25.927.071		26.285.974		127.810.876	KECAMATAN MANUHUNG	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN RUMBAN			26.166.737		26.632.278		26.984.278		27.284.582		27.611.806		134.466.132	KECAMATAN RUMBAN	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.166.737		26.632.278		26.984.278		27.284.582		27.611.806		134.466.132	KECAMATAN RUMBAN	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN MINDING RAYA			25.063.127		25.403.644		25.750.905		26.108.111		26.466.426		128.799.233	KECAMATAN MINDING RAYA	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		25.063.127		25.403.644		25.750.905		26.108.111		26.466.426		128.799.233	KECAMATAN MINDING RAYA	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN RUMANG HULU			16.959.823		17.190.232		17.428.218		17.664.904		17.909.460		87.149.577	KECAMATAN RUMANG HULU	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		16.959.823		17.190.232		17.428.218		17.664.904		17.909.460		87.149.577	KECAMATAN RUMANG HULU	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN DAMANG BATU			26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	KECAMATAN DAMANG BATU	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		26.708.363		27.071.232		27.441.288		27.818.746		28.203.779		137.243.428	KECAMATAN DAMANG BATU	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN MANUHUNG RAYA			16.959.823		17.190.232		17.428.218		17.664.904		17.909.460		87.149.577	KECAMATAN MANUHUNG RAYA	
3.06.1.4.1.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pengunjung pameran pembangunan		16.959.823		17.190.232		17.428.218		17.664.904		17.909.460		87.149.577	KECAMATAN MANUHUNG RAYA	
3.06.1.4.1.01	KECAMATAN MIRI MANASA			13.380.800		13.587.887		13.748.083		13.937.192		14.136.093		68.758.056	KECAMATAN MIRI MANASA	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		KUALITAS PAKE ANTR- RUMAH		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
4.01.4.61.03.37	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Persentase penyelesaian penangan pengaduan		100%	12.499.523	100%	12.069.337	100%	12.842.513	100%	13.019.173	100%	13.199.369	100%	64.229.923	SETDA
4.01.4.61.03.38	Program peningkatan pelayanan staf ahli *)	Persentase staf ahli yang terlatih		75%	107.556.189	80%	210.375.000	83%	213.251.735	85%	216.185.039	87%	219.177.206	87%	1.066.546.133	SETDA
4.01.4.61.04	KEKANTORAN DPRD				14.739.319.940		14.928.484.037		15.133.465.601		15.341.729.502		15.550.070.941		79.689.727.345	SET DPRD
4.01.4.61.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	5.819.818.607	100%	5.766.110.574	100%	5.794.111.462	100%	5.863.672.528	100%	5.944.850.286	100%	28.929.353.637	SET DPRD
4.01.4.61.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	561.356.802	90%	560.983.159	90%	576.760.993	95%	584.694.404	95%	592.787.024	95%	2.884.582.384	SET DPRD
4.01.4.61.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	614.292.818	95%	622.638.342	97%	631.149.628	98%	639.831.138	99%	648.585.914	99%	3.156.559.859	SET DPRD
4.01.4.61.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	275.630.517	80%	279.375.117	83%	283.194.694	85%	287.089.459	87%	291.050.908	87%	1.415.352.184	SET DPRD
4.01.4.61.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi berbasis kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai target waktu		100%	27.354.726	100%	27.726.336	100%	28.105.267	100%	28.491.960	100%	28.889.310	100%	140.594.720	SET DPRD
4.01.4.61.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase fungsi lembaga perwakilan rakyat yang tercapai		100%	7.621.113.371	100%	7.724.050.509	100%	7.830.244.358	100%	7.937.930.595	100%	8.047.817.430	100%	39.161.775.582	SET DPRD
4.01.4.61.10	KEKAMATAN KURUN				2.805.558.763		2.836.313.514		2.869.384.811		2.902.384.363		2.936.138.451		17.289.727.682	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	991.814.608	100%	1.005.288.438	100%	1.019.036.441	100%	1.033.047.313	100%	1.047.349.481	100%	5.095.525.742	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	131.873.330	90%	133.461.173	90%	135.285.531	95%	137.148.418	95%	139.044.630	95%	675.510.103	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	14.458.627	95%	14.896.541	97%	15.348.653	98%	15.805.340	99%	16.273.232	99%	166.778.213	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	49.143.423	80%	49.811.607	83%	50.491.970	85%	51.188.493	87%	51.894.953	87%	252.577.809	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi berbasis kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai target waktu		100%	25.340.914	100%	25.685.183	100%	26.038.394	100%	26.394.426	100%	26.759.740	100%	130.218.385	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.10	Program pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subunit		100%	100.232.588	100%	101.614.577	100%	103.063.519	100%	104.426.445	100%	105.865.704	100%	515.156.934	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kesosokan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina		100%	483.469.341	100%	490.071.700	100%	496.732.330	100%	503.364.928	100%	510.034.651	100%	2.484.331.130	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.12	Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun		100%	588.309.869	100%	594.173.867	100%	600.298.048	100%	606.590.493	100%	612.931.600	100%	3.072.392.604	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.10.37	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Persentase penyelesaian penangan pengaduan		100%	1.205.008	100%	1.240.348	100%	1.282.953	100%	1.328.230	100%	1.376.453	100%	16.469.211	KEKAMATAN KURUN
4.01.4.61.11	KEKAMATAN TEWAH				1.612.828.419		1.624.630.605		1.638.686.924		1.653.919.121		1.670.319.083		8.288.678.057	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	580.928.630	100%	588.218.834	100%	596.267.838	100%	604.077.819	100%	612.492.591	100%	2.985.143.762	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	83.804.324	90%	85.003.669	90%	86.169.043	95%	87.350.862	95%	88.559.860	95%	430.344.368	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	15.486.178	95%	15.690.488	97%	15.904.971	98%	16.123.745	99%	16.348.910	99%	75.548.391	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	32.050.660	80%	32.485.479	83%	32.929.546	85%	33.383.495	87%	33.844.535	87%	164.592.114	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi berbasis kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai target waktu		100%	12.787.974	100%	12.961.708	100%	13.138.889	100%	13.319.810	100%	13.503.909	100%	66.712.184	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.10	Program pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subunit		100%	62.142.187	100%	63.256.110	100%	64.398.331	100%	65.577.110	100%	66.741.286	100%	422.594.910	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kesosokan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina		100%	128.891.624	100%	130.440.075	100%	132.223.103	100%	134.041.846	100%	135.897.088	100%	661.293.737	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.12	Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun		100%	676.395.994	100%	685.585.236	100%	694.958.078	100%	704.518.183	100%	714.267.231	100%	3.475.721.514	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.11.37	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *)	Persentase penyelesaian penangan pengaduan		100%	289.412	100%	293.344	100%	297.354	100%	301.444	100%	305.610	100%	1.487.170	KEKAMATAN TEWAH
4.01.4.61.12	KEKAMATAN KAHAYAN HULU UTARA				1.229.387.861		1.246.127.451		1.263.239.441		1.280.733.723		1.298.619.933		7.889.167.802	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	478.058.878	100%	484.553.583	100%	491.177.291	100%	497.933.487	100%	504.825.269	100%	2.459.548.504	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	78.843.148	90%	79.914.279	90%	81.006.663	95%	82.120.938	95%	83.257.555	95%	405.142.401	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	22.435.042	95%	22.736.835	97%	23.050.682	98%	23.367.747	99%	23.691.174	99%	115.284.480	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	37.391.737	80%	37.895.725	83%	38.417.803	85%	38.949.244	87%	39.489.240	87%	192.140.800	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi berbasis kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai target waktu		100%	4.807.509	100%	4.872.822	100%	4.939.432	100%	5.007.374	100%	5.076.686	100%	24.793.817	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.10	Program pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subunit		100%	38.554.200	100%	38.937.224	100%	39.329.843	100%	39.732.315	100%	40.144.870	100%	182.889.482	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kesosokan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina		100%	228.273.434	100%	229.347.480	100%	230.482.504	100%	231.680.418	100%	232.942.434	100%	1.162.728.328	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.12.12	Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun		100%	499.023.729	100%	502.767.499	100%	506.635.117	100%	510.645.262	100%	514.799.909	100%	2.548.867.517	KEC. KAHAYAN HULU UTARA
4.01.4.61.13	KEKAMATAN SEPANG				1.182.067.871		1.197.885.295		1.213.982.108		1.230.416.437		1.247.193.600		6.971.844.586	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	502.331.128	100%	509.155.583	100%	516.115.590	100%	523.214.820	100%	530.456.516	100%	2.581.273.643	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	68.533.712	90%	69.464.782	90%	70.414.345	95%	71.382.362	95%	72.370.892	95%	352.168.638	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	23.503.377	80%	23.822.584	83%	24.148.334	85%	24.480.490	87%	24.819.325	87%	120.774.217	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi berbasis kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai target waktu		100%	7.409.531	100%	7.415.638	100%	7.421.833	100%	7.428.121	100%	7.434.501	100%	40.128.979	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.10	Program pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subunit		100%	31.302.567	100%	31.734.848	100%	32.166.678	100%	32.609.134	100%	33.050.470	100%	160.876.747	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kesosokan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina		100%	259.054.264	100%	261.560.280	100%	264.135.531	100%	266.782.498	100%	272.502.685	100%	1.325.035.028	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.13.12	Program pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun		100%	270.658.358	100%	274.234.090	100%	277.982.751	100%	281.808.474	100%	285.706.892	100%	1.390.288.846	KEKAMATAN SEPANG
4.01.4.61.14	KEKAMATAN MANUHUNG				1.602.850.738		1.621.845.821		1.641.313.863		1.661.362.868		1.681.913.903		7.904.880.139	KEKAMATAN MANUHUNG
4.01.4.61.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor		100%	488.942.312	100%	493.604.385	100%	500.355.870	100%	507.238.317	100%	514.258.886	100%	2.502.453.771	KEKAMATAN MANUHUNG
4.01.4.61.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	104.795.180	90%	106.318.833	90%	107.870.834	95%	109.461.887	95%	110.667.603	95%	528.499.280	KEKAMATAN MANUHUNG

4

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2020		2021		2022		2023		2024			Kendali Kinerja Pada Akhir RPJMD
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
4.01.4.01.14.09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	55.087.605	80%	55.849.588	83%	57.626.703	85%	58.419.367	87%	59.227.936	87%	289.211.300	KECAMATAN MANUHUNG
4.01.4.01.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi pelayanan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu	100%	4.519.058	100%	4.586.452	100%	4.643.066	100%	4.706.932	100%	4.772.079	100%	23.221.548	KECAMATAN MANUHUNG
4.01.4.01.14.10	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subdinat	100%	35.235.660	100%	35.734.027	100%	36.233.500	100%	36.740.745	100%	37.248.988	100%	181.161.326	KECAMATAN MANUHUNG
4.01.4.01.14.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina	100%	219.217.817	100%	222.196.018	100%	225.233.374	100%	228.331.482	100%	231.441.766	100%	1.125.476.457	KECAMATAN MANUHUNG
4.01.4.01.14.12	Program Pengembangan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun	100%	495.023.729	100%	502.782.499	100%	509.635.117	100%	516.645.262	100%	523.795.969	100%	2.548.862.517	KECAMATAN MANUHUNG
4.01.4.01.15	KECAMATAN RUNDAN			1.974.839.148		1.998.374.113		1.988.044.015		1.980.306.966		1.981.009.430		8.659.801.133	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	955.526.823	100%	963.673.979	100%	970.771.638	100%	978.622.654	100%	986.630.629	100%	2.874.624.526	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	74.746.082	90%	75.761.551	90%	76.797.189	95%	77.853.543	95%	78.931.045	95%	384.089.459	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.15.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	44.870.284	80%	45.479.870	83%	46.101.364	85%	46.755.493	87%	47.382.348	87%	230.366.980	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.15.10	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subdinat	100%	68.159.794	100%	69.085.785	100%	70.036.197	100%	70.993.440	100%	71.976.044	100%	350.345.330	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.15.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina	100%	245.318.501	100%	248.645.208	100%	252.048.232	100%	255.516.182	100%	259.051.709	100%	1.280.590.892	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.15.12	Program Pengembangan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun	100%	595.259.882	100%	594.173.802	100%	592.990.448	100%	590.590.594	100%	588.031.606	100%	3.012.282.545	KECAMATAN RUNDAN
4.01.4.01.16	KECAMATAN MINGING RAYA			1.374.667.732		1.390.524.613		1.398.509.648		1.375.509.698		1.340.331.436		6.031.621.669	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	563.875.857	100%	571.333.720	100%	579.143.687	100%	587.109.870	100%	595.335.923	100%	2.495.499.635	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	146.997.600	90%	148.994.688	90%	151.031.382	95%	153.108.814	95%	155.217.958	95%	755.360.383	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	23.503.377	80%	23.822.684	83%	24.148.334	85%	24.480.496	87%	24.819.325	87%	120.774.217	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi pelayanan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu	100%	10.869.666	100%	10.811.523	100%	10.756.983	100%	10.694.948	100%	10.638.691	100%	51.799.424	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.10	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subdinat	100%	61.930.629	100%	62.792.265	100%	63.650.617	100%	64.520.138	100%	65.419.249	100%	318.338.878	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina	100%	142.915.290	100%	144.441.267	100%	146.415.737	100%	148.429.761	100%	150.484.582	100%	732.279.038	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.16.12	Program Pengembangan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun	100%	229.485.331	100%	228.528.409	100%	231.652.326	100%	234.838.728	100%	238.089.077	100%	1.109.573.871	KECAMATAN MINGING RAYA
4.01.4.01.17	KECAMATAN RUNDAN HULU			1.268.687.867		1.285.917.081		1.298.609.867		1.272.452.524		1.240.756.385		6.344.302.544	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	627.287.440	100%	635.786.241	100%	644.480.357	100%	653.345.191	100%	662.387.991	100%	3.223.270.189	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	43.353.248	90%	43.947.014	90%	44.542.699	95%	45.155.389	95%	45.780.374	95%	232.773.533	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	23.803.377	80%	23.822.684	83%	24.148.334	85%	24.480.496	87%	24.819.325	87%	120.774.217	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi pelayanan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu	100%	10.159.869	100%	10.297.897	100%	10.438.666	100%	10.582.251	100%	10.729.713	100%	62.307.460	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.10	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subdinat	100%	43.726.963	100%	44.321.021	100%	44.926.877	100%	45.544.851	100%	46.175.227	100%	234.684.941	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina	100%	150.912.668	100%	153.096.760	100%	155.328.473	100%	157.602.381	100%	159.922.127	100%	825.864.409	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.17.12	Program Pengembangan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun	100%	390.744.530	100%	395.645.434	100%	399.643.732	100%	395.741.965	100%	390.542.523	100%	1.812.718.194	KECAMATAN RUNDAN HULU
4.01.4.01.18	KECAMATAN DAMANG BATU			1.317.045.108		1.338.344.417		1.353.588.191		1.372.317.677		1.383.209.637		6.205.816.451	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	635.852.440	100%	644.490.884	100%	652.300.868	100%	662.387.991	100%	671.453.654	100%	3.267.384.917	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	59.901.582	90%	60.715.300	90%	61.545.321	95%	62.391.684	95%	63.258.435	95%	307.809.582	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.18.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	23.503.377	80%	23.822.684	83%	24.148.334	85%	24.480.496	87%	24.819.325	87%	120.774.217	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.18.10	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subdinat	100%	31.222.100	100%	31.846.320	100%	32.478.866	100%	33.120.114	100%	33.770.217	100%	160.437.546	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.18.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina	100%	261.315.204	100%	264.729.467	100%	268.211.545	100%	271.763.272	100%	275.386.277	100%	1.391.405.766	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.18.12	Program Pengembangan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun	100%	315.851.464	100%	319.824.772	100%	324.312.336	100%	328.774.220	100%	333.324.708	100%	1.622.003.420	KECAMATAN DAMANG BATU
4.01.4.01.19	KECAMATAN MANUHUNG RAYA			1.135.304.883		1.150.728.979		1.166.458.860		1.183.003.655		1.198.876.415		5.433.866.763	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	551.215.124	100%	568.829.538	100%	576.615.429	100%	584.546.833	100%	592.637.413	100%	2.883.854.357	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	72.166.032	90%	73.148.470	90%	74.146.361	95%	75.166.292	95%	76.206.610	95%	370.831.744	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin	90%	8.974.017	95%	9.095.634	97%	9.226.273	98%	9.347.099	98%	9.476.470	99%	46.113.792	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	23.503.377	80%	23.822.684	83%	24.148.334	85%	24.480.496	87%	24.819.325	87%	120.774.217	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem informasi pelayanan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu	100%	3.632.340	100%	3.081.688	100%	3.732.015	100%	3.763.349	100%	3.835.714	100%	18.665.166	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.10	Program Pembinaan Daerah Bawahan *)	Cakupan pembinaan wilayah subdinat	100%	28.945.654	100%	29.236.631	100%	29.636.591	100%	30.044.246	100%	30.460.081	100%	148.222.903	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)	Persentase organisasi keagamaan yang dibina	100%	211.503.688	100%	214.377.058	100%	217.307.561	100%	220.295.630	100%	223.345.725	100%	1.045.830.712	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.19.12	Program Pengembangan sarana dan prasarana Kelurahan	Persentase kelurahan yang dibangun	100%	225.465.331	100%	228.528.409	100%	231.652.326	100%	234.838.728	100%	238.089.077	100%	1.159.873.871	KECAMATAN MANUHUNG RAYA
4.01.4.01.20	KECAMATAN MIRI MANASA			1.607.796.867		1.477.801.662		1.497.860.354		1.518.402.696		1.539.418.657		7.451.070.733	KECAMATAN MIRI MANASA
4.01.4.01.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	695.139.472	100%	704.683.345	100%	714.214.768	100%	724.036.896	100%	734.060.152	100%	3.572.036.681	KECAMATAN MIRI MANASA
4.01.4.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	92.985.061	90%	94.248.349	90%	95.536.666	95%	96.850.613	95%	98.191.303	95%	477.812.529	KECAMATAN MIRI MANASA
4.01.4.01.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin	90%	8.913.515	95%	8.121.370	97%	8.232.786	98%	8.345.624	99%	8.461.134	99%	41.173.029	KECAMATAN MIRI MANASA

K

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pencapaian Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kontrol Awal	Target Kinerja Program dan Rencanan Pelaksanaan										KINERJA KEGIATAN AKTIF RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		Target	Pagu	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
4.01.4.01.20.09	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	49.143.425	80%	49.811.007	83%	50.491.970	85%	51.166.493	87%	51.894.953	87%	49.527.909	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.01.4.01.20.10	Program Pembinaan Daerah Bawah *	Cakupan pembinaan wilayah subdistrik	100%	28.738.221	100%	29.128.646	100%	29.518.826	100%	29.922.971	100%	30.347.266	100%	28.738.221	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.01.4.01.20.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kebudayaan *	Peningkatan organisasi keagamaan yang bina	100%	97.216.516	100%	96.339.285	100%	99.886.339	100%	101.620.235	100%	103.661.755	100%	99.886.339	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.01.4.01.20.12	Program Pembangunan sarana dan prasarana kuburan	Peningkatan kesehatan yang dibangun	100%	450.930.863	100%	457.056.817	100%	463.304.662	100%	469.277.457	100%	476.178.154	100%	457.056.817	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.01.4.01.20.18	Program peningkatan peran serta perempuan	Jumlah peserta yang ikut seleksi tingkat kabupaten	100%	32.161.477	100%	32.339.621	100%	32.984.428	100%	33.432.133	100%	33.900.942	100%	32.161.477	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.01.4.01.20.37	Program peningkatan kualitas pelayanan publik *	Peningkatan penyelesaian penanganan pengaduan	100%	3.525.507	100%	3.573.403	100%	3.632.250	100%	3.692.074	100%	3.752.899	100%	3.525.507	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.01.4.01.21	KECAMATAN KUNING BARAT			1.406.789.426		1.476.560.482		1.496.744.639		1.517.332.520		1.538.333.560		1.406.789.426	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi Pemerintah	100%	719.332.593	100%	729.105.143	100%	739.071.800	100%	749.337.811	100%	759.607.838	100%	719.332.593	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95%	33.534.300	90%	36.037.224	90%	36.529.643	95%	37.032.315	95%	37.544.870	95%	33.534.300	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin disiplin	95%	0	95%	0	97%	0	98%	0	99%	0	99%	0	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	23.503.377	80%	23.822.584	83%	24.146.334	85%	24.480.498	87%	24.818.325	87%	23.503.377	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan publik kinerja dan keuangan yang akurat tepat waktu	Peningkatan laporan kinerja dan keuangan yang akurat tepat waktu	100%	1.175.169	100%	1.191.134	100%	1.207.417	100%	1.224.025	100%	1.240.968	100%	1.175.169	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.10	Program Pembinaan Daerah Bawah *	Cakupan pembinaan wilayah subdistrik	100%	35.415.316	100%	35.896.454	100%	36.367.146	100%	36.887.657	100%	37.368.311	100%	35.415.316	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.11	Program pembinaan sosial, keagamaan dan kebudayaan *	Peningkatan organisasi keagamaan yang bina	100%	190.838.708	100%	192.451.026	100%	194.093.446	100%	196.792.739	100%	201.544.304	100%	190.838.708	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.01.4.01.21.12	Program Pembangunan sarana dan prasarana kuburan	Peningkatan kesehatan yang dibangun	100%	450.930.863	100%	457.056.817	100%	463.304.662	100%	469.277.457	100%	476.178.154	100%	457.056.817	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.02.4.02.01	INSPEKTORAT KABUPATEN			1.869.126.521		1.869.126.521		1.869.126.521		1.869.126.521		1.869.126.521		1.869.126.521	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi Pemerintah	100%	1.046.571.251	100%	1.046.571.251	100%	1.046.571.251	100%	1.046.571.251	100%	1.046.571.251	100%	1.046.571.251	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	95%	286.808.776	90%	296.705.240	90%	294.879.030	95%	298.732.439	95%	302.867.125	95%	286.808.776	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin disiplin	95%	74.067.589	95%	75.008.070	97%	76.034.321	98%	77.080.161	99%	78.147.030	99%	74.067.589	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	340.798.972	80%	345.428.923	83%	350.130.837	85%	354.967.199	87%	359.880.736	87%	340.798.972	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan publik kinerja dan keuangan yang akurat tepat waktu	Peningkatan laporan kinerja dan keuangan yang akurat tepat waktu	100%	30.126.294	100%	30.807.389	100%	31.501.810	100%	32.210.223	100%	32.932.832	100%	30.126.294	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.20	Program peningkatan sistem pengembangan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan tindak lanjut temuan	100%	2.641.116.759	100%	2.666.646.539	100%	2.697.129.102	100%	2.735.975.335	100%	2.775.400.469	100%	2.641.116.759	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.02.4.02.01.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kelu pejabat yang terampil	100%	69.708.681	100%	70.555.816	100%	71.621.763	100%	72.808.927	100%	73.811.863	100%	69.708.681	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.03.4.03.01	SEKRETARIAT DAERAH			6.878.433.363		6.785.109.282		6.657.365.371		6.495.513.383		7.068.131.895		6.878.433.363	SEKRETARIAT DAERAH	
4.03.4.03.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama yang terjalin	95%	756.932.222	90%	807.759.008	90%	818.600.840	95%	830.021.720	95%	841.052.230	95%	756.932.222	SEKRETARIAT DAERAH	
4.03.4.03.01.32	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata capaian kinerja dokumen rencana OPD bidang ekonomi	95%	366.342.670	95%	371.319.680	95%	376.395.665	95%	381.573.046	95%	386.854.512	95%	366.342.670	SEKRETARIAT DAERAH	
4.03.4.03.10	KECAMATAN KUBUH			31.035.141		31.456.772		31.866.777		32.145.383		32.775.791		31.035.141	KECAMATAN KUBUH	
4.03.4.03.10.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	31.035.141	95%	31.456.772	95%	31.866.777	95%	32.145.383	95%	32.775.791	95%	31.035.141	KECAMATAN KUBUH	
4.03.4.03.11	KECAMATAN TEWAH			21.607.406		21.894.671		22.193.905		22.499.249		22.810.632		21.607.406	KECAMATAN TEWAH	
4.03.4.03.11.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	21.607.406	95%	21.894.671	95%	22.193.905	95%	22.499.249	95%	22.810.632	95%	21.607.406	KECAMATAN TEWAH	
4.03.4.03.12	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA			10.857.040		11.045.043		11.196.046		11.350.046		11.507.142		10.857.040	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
4.03.4.03.12.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	10.857.040	95%	11.045.043	95%	11.196.046	95%	11.350.046	95%	11.507.142	95%	10.857.040	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
4.03.4.03.13	KECAMATAN SEPANG			10.117.139		10.254.563		10.394.760		10.537.741		10.683.591		10.117.139	KECAMATAN SEPANG	
4.03.4.03.13.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	10.117.139	95%	10.254.563	95%	10.394.760	95%	10.537.741	95%	10.683.591	95%	10.117.139	KECAMATAN SEPANG	
4.03.4.03.14	KECAMATAN MANUHUNG			13.637.436		13.697.172		13.861.045		14.028.235		14.196.784		13.637.436	KECAMATAN MANUHUNG	
4.03.4.03.14.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	13.637.436	95%	13.697.172	95%	13.861.045	95%	14.028.235	95%	14.196.784	95%	13.637.436	KECAMATAN MANUHUNG	
4.03.4.03.15	KECAMATAN KUNING			12.145.638		12.354.228		12.523.106		12.693.363		12.871.077		12.145.638	KECAMATAN KUNING	
4.03.4.03.15.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	12.145.638	95%	12.354.228	95%	12.523.106	95%	12.693.363	95%	12.871.077	95%	12.145.638	KECAMATAN KUNING	
4.03.4.03.16	KECAMATAN HIKI MANASA			11.837.106		11.997.970		12.161.979		12.329.268		12.499.915		11.837.106	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.03.4.03.16.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	11.837.106	95%	11.997.970	95%	12.161.979	95%	12.329.268	95%	12.499.915	95%	11.837.106	KECAMATAN HIKI MANASA	
4.03.4.03.17	KECAMATAN KUNING BARAT			13.320.746		13.400.340		13.581.539		13.770.362		13.960.574		13.320.746	KECAMATAN KUNING BARAT	
4.03.4.03.17.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keterwakilan stakeholder dalam keputusan perencanaan tingkat kecamatan	95%	13.320.746	95%	13.400.340	95%	13.581.539	95%	13.770.362	95%	13.960.574	95%	13.320.746	KECAMATAN KUNING BARAT	

KODE	Bidang Urutan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Rerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024			Kendali Kinerja Pada Akhir RPJMD	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		Target	Pagu
4.03.4.63.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan				5.704.866.232		5.762.366.641		5.861.413.273		5.942.037.632		6.024.280.964	95.314.586.282	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	1.912.973.800	100%	1.938.962.718	100%	1.965.407.780	100%	1.992.502.497	100%	2.020.080.771	100%	9.529.988.145	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	431.191.666	90%	437.046.089	90%	443.024.316	95%	449.118.183	95%	455.334.324	95%	2.215.718.817	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin	90%	38.344.360	99%	38.838.533	97%	37.342.105	98%	37.855.750	99%	38.379.702	99%	186.780.858	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	80.125.150	80%	81.213.697	83%	82.323.863	83%	83.456.238	87%	84.611.337	87%	411.730.280	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100%	40.810.410	100%	41.364.843	100%	41.930.288	100%	42.507.044	100%	43.093.374	100%	209.707.959	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.15	Program pengembangan data/informasi	Persentase kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan	83%	417.184.946	85%	422.852.648	87%	428.632.021	90%	434.528.813	95%	440.543.036	95%	2.143.742.336	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.18	Program Peningkatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan wilayah pembangunan infrastruktur perdesaan	85%	348.958.141	70%	353.646.233	75%	358.460.476	80%	363.411.413	85%	368.441.368	85%	1.792.895.566	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar			80.167.670		81.250.794		82.367.951		83.500.526		84.656.737		411.949.778	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu	100%	1.270.678.048	100%	1.287.940.945	100%	1.305.546.727	100%	1.323.504.080	100%	1.341.822.983	100%	6.549.493.362	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata capaian kinerja dokumen rencana DPD bidang ekonomi	95%	157.078.101	95%	159.265.037	96%	161.385.398	95%	163.605.272	95%	165.860.659	95%	807.144.524	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Rata-rata capaian kinerja dokumen rencana DPD bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	95%	65.068.263	95%	65.891.379	95%	66.792.465	95%	67.710.828	95%	68.667.998	95%	334.050.565	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.26	Program Pengembangan Infrastruktur *)	Persentase pembangunan Infrastruktur yang terlaksana	100%	159.919.116	100%	162.091.710	100%	164.307.457	100%	166.567.524	100%	168.877.946	100%	821.758.754	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.27	Program penelitian dan pengembangan (PTIK *)	Rasio hasil penelitian yang dikembangkan/dinuklarkan	100%	460.572.334	100%	466.014.341	100%	471.584.440	100%	477.225.553	100%	482.936.278	100%	2.558.378.943	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.03.4.63.01.28	Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya *)	Rata-rata capaian kinerja dokumen rencana DPD bidang sosial budaya	95%	302.908.284	95%	308.037.033	95%	313.247.832	95%	318.542.834	95%	323.924.031	95%	1.561.560.036	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.04	Keuangan				16.907.419.716		17.104.864.910		17.288.951.554		17.474.282.264		17.662.105.756		87.700.221.807	
4.04.1.63.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				13.941.226		14.131.183		14.324.352		14.521.383		14.722.373		71.841.670	BAKESBANGPOL
4.04.1.63.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	13.941.226	100%	14.131.183	100%	14.324.352	100%	14.521.383	100%	14.722.373	100%	71.841.670	BAKESBANGPOL	
4.04.1.63.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.896.763		6.994.378		7.099.852		7.177.236		7.276.678		35.408.803	Dinkukcap
4.04.1.63.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	6.896.763	100%	6.994.378	100%	7.099.852	100%	7.177.236	100%	7.276.678	100%	35.408.803	Dinkukcap	
4.04.1.63.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				51.807.681		52.579.333		53.290.987		54.024.065		54.771.729		268.526.738	DINPTSP
4.04.1.63.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100%	51.807.681	100%	52.579.333	100%	53.290.987	100%	54.024.065	100%	54.771.729	100%	268.526.738	DINPTSP	
4.04.1.63.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan				27.082.301		27.450.224		27.825.466		28.208.268		28.598.632		138.164.837	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
4.04.1.63.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	27.082.301	100%	27.450.224	100%	27.825.466	100%	28.208.268	100%	28.598.632	100%	138.164.837	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan	
4.04.1.63.01	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan				14.103.038		14.293.611		14.489.660		14.688.298		14.891.595		72.464.530	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
4.04.1.63.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100%	14.103.038	100%	14.293.611	100%	14.489.660	100%	14.688.298	100%	14.891.595	100%	72.464.530	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
4.04.1.63.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				66.129.657		67.038.371		67.944.830		68.879.213		69.832.656		329.814.729	Diperindag
4.04.1.63.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100%	66.129.657	100%	67.038.371	100%	67.944.830	100%	68.879.213	100%	69.832.656	100%	329.814.729	Diperindag	
4.04.1.63.01	INSPEKTORAT KABUPATEN				89.579.918		90.796.913		92.038.081		93.304.674		94.595.474		460.314.460	INSPEKTORAT KABUPATEN
4.04.1.63.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	89.579.918	100%	90.796.913	100%	92.038.081	100%	93.304.674	100%	94.595.474	100%	460.314.460	INSPEKTORAT KABUPATEN	
4.04.1.63.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan				48.415.643		48.632.632		48.861.378		49.093.367		49.327.818		233.369.275	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
4.04.1.63.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100%	48.415.643	100%	48.632.632	100%	48.861.378	100%	49.093.367	100%	49.327.818	100%	233.369.275	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	
4.04.1.63.01	Badan Pendapatan Daerah				5.619.426.928		5.682.460.493		5.748.604.644		5.817.828.692		5.890.108.494		23.781.923.728	Badan Pendapatan Daerah
4.04.1.63.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor	100%	2.432.762.719	100%	2.465.813.209	100%	2.499.540.166	100%	2.533.901.330	100%	2.568.972.474	100%	12.500.599.898	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.1.63.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90%	556.313.862	90%	560.419.071	90%	564.677.251	95%	569.104.691	95%	573.701.258	95%	3.094.212.073	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.1.63.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	75%	138.746.823	80%	138.064.709	83%	140.499.360	85%	142.131.980	87%	144.002.348	87%	702.688.385	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.1.63.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu	100%	66.885.475	100%	67.797.194	100%	68.721.962	100%	69.669.268	100%	70.633.544	100%	343.712.443	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.1.63.01.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan PAD	7%	1.788.358.808	10%	1.819.830.342	10%	1.852.863.770	10%	1.886.832.419	10%	1.886.567.771	10%	9.180.393.067	Badan Pendapatan Daerah	
4.04.1.63.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah				12.993.134.830		13.777.865.133		13.986.143.782		14.198.249.546		14.394.310.612		69.849.543.687	BKAD

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kendali Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2020		2021		2022		2023		2024			Kendali Kinerja Pada Akhir RPJMD	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
4.04.4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100%	2.183.599.352	100%	2.215.366.172	100%	2.243.622.250	100%	2.274.483.512	100%	2.302.964.113	100%	11.221.135.390	BKAD
4.04.4.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	8.109.543.710	90%	8.216.594.288	90%	8.322.630.746	95%	8.437.312.164	95%	8.554.071.055	95%	41.625.371.983	BKAD
4.04.4.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	50.115.611	96%	56.796.400	97%	51.490.833	98%	52.199.095	99%	52.921.571	99%	457.523.575	BKAD
4.04.4.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis		75%	106.822.534	80%	108.381.526	83%	109.765.153	85%	111.274.684	87%	112.816.115	87%	548.372.715	BKAD
4.04.4.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu		100%	155.111.607	100%	157.218.858	100%	159.368.425	100%	161.566.149	100%	163.796.266	100%	797.054.936	BKAD
4.04.4.04.07	Program peningkatan dan pengembangan sumber daya keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		100%	2.986.830.717	100%	3.037.514.398	100%	3.079.066.753	100%	3.121.419.844	100%	3.164.622.493	100%	15.399.384.003	BKAD
4.05					7.050.897.847		7.116.250.501		7.183.527.880		7.251.755.132		7.319.964.308		36.877.394.469	
4.05.2.09.01	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan				15.010.111		15.214.033		15.421.004		15.634.135		15.850.524		77.136.867	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
4.05.2.09.01.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rasio jabatan yang terpenuhi		100%	15.010.111	100%	15.214.033	100%	15.421.004	100%	15.634.135	100%	15.850.524	100%	77.136.867	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan
4.05.2.09.01.17	KECAMATAN KLANGAN HULU				19.230.036		19.491.287		19.757.737		20.029.497		20.306.721		98.815.269	KECAMATAN KLANGAN HULU
4.05.4.01.17.39	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rasio eselon yang mendapatkan diklat teknis eselon		100%	19.230.036	100%	19.491.287	100%	19.757.737	100%	20.029.497	100%	20.306.721	100%	98.815.269	KECAMATAN KLANGAN HULU
4.05.4.05.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6.986.027.499		7.061.544.860		7.136.347.855		7.217.080.480		7.297.806.904		35.901.413.291	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		100%	1.802.192.470	100%	1.848.676.259	100%	1.891.648.418	100%	1.937.116.631	100%	1.982.096.760	100%	9.260.727.958	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		90%	25.928.719	90%	26.280.973	90%	26.640.329	95%	27.006.968	95%	27.380.461	95%	132.237.051	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pegawai disiplin		90%	72.049.530	99%	73.677.008	97%	74.884.210	98%	76.111.499	99%	76.739.405	99%	373.521.715	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu		100%	55.568.781	100%	56.267.900	100%	57.031.996	100%	57.816.479	100%	58.616.703	100%	285.235.981	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan pelayanan kepegawaian berbasis sistem informasi		100%	31.632.726	100%	32.692.339	100%	33.490.483	100%	34.537.395	100%	35.393.274	100%	162.498.220	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.25	Program Pendidikan dan Pelatihan	Rasio pegawai yang mendapatkan diklat teknis		100%	1.806.776.344	100%	1.828.605.332	100%	1.850.887.857	100%	1.873.575.760	100%	1.896.739.338	100%	8.255.584.665	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rasio pegawai yang mengikuti diklat jabatan		100%	1.269.999.653	100%	1.287.753.336	100%	1.304.948.718	100%	1.322.796.664	100%	1.341.106.667	100%	6.545.007.379	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.4.05.08.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rasio jabatan yang terpenuhi		100%	2.121.909.368	100%	2.150.736.634	100%	2.180.136.584	100%	2.210.124.594	100%	2.240.714.418	100%	10.903.621.498	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	TOTAL				492.619.000.000		500.328.190.509		507.184.400.000		514.140.300.000		521.254.600.000		2.528.505.600.000	

Tabel 7.3
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	71.835.953.975	72.811.887.014	73.807.204.536	74.822.430.447	75.858.030.438	369.135.506.410
2	DINAS KESEHATAN	70.952.073.438	71.915.998.448	72.899.069.432	73.901.803.848	74.924.661.659	364.593.606.824
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	25.425.250.751	26.784.253.087	27.150.386.112	27.523.842.547	27.904.793.699	135.788.526.196
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	115.293.249.659	116.859.575.229	118.457.011.961	120.086.400.698	121.748.488.855	592.444.726.402
5	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perkebunan	24.341.528.525	24.672.222.287	25.009.484.459	25.353.492.565	25.704.404.404	125.081.132.249
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.845.845.714	2.884.508.176	2.923.938.572	2.964.157.656	3.005.183.878	14.623.633.995
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.663.260.209	5.740.198.879	5.818.665.744	5.898.702.107	5.980.344.682	29.101.171.622
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.587.529.238	5.663.439.058	5.740.856.639	5.819.822.730	5.900.373.553	28.712.021.217
9	DINAS SOSIAL	3.965.028.321	4.018.895.527	4.073.832.671	4.129.868.671	4.187.029.230	20.374.654.419
10	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3.586.974.281	3.635.705.404	3.685.404.450	3.736.597.578	3.787.808.042	18.431.989.755
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.387.674.765	4.447.283.868	4.508.076.957	4.570.086.033	4.633.339.539	22.546.461.163
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.627.991.578	5.704.451.103	5.782.429.307	5.861.967.234	5.943.101.370	28.919.940.593
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.063.913.364	9.187.051.877	9.312.636.230	9.440.732.527	9.571.399.527	46.575.733.525
14	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	11.446.723.629	11.602.233.999	11.760.833.196	11.922.604.701	12.087.622.721	58.820.018.246
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.595.405.020	2.630.665.100	2.666.625.534	2.703.305.251	2.740.721.075	13.336.721.980
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.472.203.459	4.532.960.933	4.594.925.203	4.658.128.886	4.722.600.973	22.980.819.453
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.265.725.774	2.296.506.970	2.327.899.559	2.359.920.064	2.392.583.173	11.642.635.540
18	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.004.409.179	6.085.982.556	6.169.176.184	6.254.033.856	6.340.594.495	30.854.196.270
19	Dinas Pertanian	17.648.842.576	17.888.612.324	18.133.144.501	18.382.567.823	18.636.996.702	90.690.163.926
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.545.595.431	7.648.106.715	7.752.654.130	7.859.292.708	7.968.071.365	38.773.720.349
21	SEKRETARIAT DAERAH	21.941.288.651	22.239.373.765	22.543.379.598	22.853.466.171	23.169.775.722	112.747.283.907
22	SEKRETARIAT DPRD	15.418.453.232	15.627.921.849	15.841.551.099	16.059.453.250	16.281.728.436	79.229.107.805
23	KECAMATAN DAMANG BATU	1.428.996.382	1.448.410.126	1.468.209.475	1.488.404.852	1.509.005.520	7.343.026.355
24	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	1.572.873.878	1.594.242.280	1.616.035.113	1.638.263.847	1.660.938.679	8.082.353.797
25	KECAMATAN KURUN	2.575.684.610	2.610.676.777	2.646.363.977	2.682.764.993	2.719.896.525	13.235.386.882
26	KECAMATAN MANUHING	1.581.858.273	1.603.348.734	1.625.266.049	1.647.621.756	1.670.426.108	8.128.520.921
27	KECAMATAN MANUHING RAYA	1.310.594.774	1.328.399.963	1.346.558.808	1.365.080.867	1.383.974.636	6.734.609.049
28	KECAMATAN MEHING RAYA	1.328.074.700	1.346.117.364	1.364.518.400	1.383.287.495	1.402.433.258	6.824.431.217
29	KECAMATAN MIRS MANASA	1.555.821.995	1.576.958.738	1.598.515.310	1.620.503.057	1.642.933.066	7.994.731.167
30	KECAMATAN RUNGAN	1.717.662.378	1.740.997.816	1.764.796.755	1.789.071.721	1.813.833.850	8.826.362.521
31	KECAMATAN RUNGAN BARAT	1.579.207.121	1.600.661.564	1.622.342.147	1.644.860.386	1.667.626.519	8.114.897.736
32	KECAMATAN RUNGAN HULU	1.466.898.635	1.486.827.303	1.507.151.804	1.527.882.836	1.549.029.910	7.537.790.488
33	KECAMATAN SEPANG	1.371.047.273	1.389.673.744	1.408.670.184	1.428.046.592	1.447.811.855	7.045.249.648
34	KECAMATAN TEWAH	1.780.495.412	1.804.684.473	1.829.353.990	1.854.516.948	1.880.184.889	9.149.235.710
35	INSPEKTORAT KABUPATEN	3.978.716.439	4.032.769.606	4.087.896.405	4.144.125.853	4.201.483.742	20.444.992.044
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	5.776.989.457	5.855.473.205	5.935.515.837	6.017.159.485	6.100.441.601	29.685.579.586
37	Badan Kemajuan dan Aset Daerah	13.619.842.913	13.804.876.367	13.993.585.051	14.186.068.294	14.382.414.391	69.986.787.016
38	Badan Pendataan Daerah	5.045.979.109	5.114.531.658	5.184.445.832	5.255.758.433	5.328.502.173	25.929.217.204
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.013.335.882	7.108.616.112	7.205.788.847	7.304.905.235	7.406.010.743	36.038.656.819
Jumlah Pagu		493.619.000.000	500.325.100.000	507.164.400.000	514.140.500.000	521.256.600.000	2.536.505.600.000

q.



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Kinerja pembangunan suatu Daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan Daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*), yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Luas Kawasan Kumuh	NA	27,5	25	22,5	20	17,5	17,5
Cakupan aksesibilitas antar wilayah	NA	55	60	65	70	75	75
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	39	51	54	57	60	63	63
Persentase RT yang terakses air bersih	NA	55	60	65	70	75	75
Rasio elektrifikasi	56,36 (2013)	77,19	79,79	82,4	85	88	88
IPM	69,95	72,56	73,16	73,76	74,36	74,89	74,89

9-



Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	
IPG	92,00 (2015)	94	94,33	94,67	95	95	95
Rata-Rata Lama Sekolah	8,96	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406	10,406
Harapan lama sekolah	11,75	12,41	12,57	12,72	12,87	13	13
Angka harapan hidup	70,15	70,91	71,09	71,28	71,46	72,1746	72,1746
Indek Pemberdayaa n Gender (IDG)	79,98 (2015)	83,33	83,88	84,44	85	85,85	85,85
Tingkat kemiskinan	5,83	4,78	4,52	4,26	4	3,8	3,8
Pengeluaran perkapita	1.181.810	1.649.347	1.766.231	1.883.116	2.000.000	2.200.000	2.200.000
Indeks Gini	0,296	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
Tingkat Penganggura n Terbuka	1,17	1,07	1,05	1,02	1	0,8	0,8
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	NA	15	20	25	30	35	35
LPE	6,93	0,54	7,69	7,85	8	8,2	8,2
PDRB sektor Pertanian (Milyar Rp)	1.526,09	1.982,68	2.100,80	2.218,92	2.337,04	2.570,74	2.570,74
PDRB Sektor pariwisata (Milyar Rp)	NA	30	35	42,5	50	55	55
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	62,5	63	64	65	66	66
Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	A	A	A	A
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

d



Indikator Daerah	Data Awal	Target					Kondisi Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
Jumlah penghargaan kebudayaan	NA	3	4	4	4	5	5
Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah	NA	3	4	4	5	5	5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	73,24	73,82	74,41	75	75,75	75,75
Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)	NA	65	66	67	68	69	69
Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)	NA	93,25	93,5	94	94,5	95	95
Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	NA	66,5	68	70	72,5	73,225	73,225

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas pada 2013-2018 merupakan capaian pembangunan. Tahun 2019-2024 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel 8.22 sebagai berikut:

q



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
I	ASPEK KESEJAHTERAAN								
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga								
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	6,91	7,09	7,15	7,2	7,26	7,3	7,3
2	Laju Inflasi	(%)	8,4	6	5,00	4,00	3,50	3	3
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	5.212.668 ,0	6.565.90 0,35	7.334.87 5,20	8.193.90 9,65	9.153.55 1,15	10.000.00 0,00	10.000.00 0,00
4	Tingkat kemiskinan	(%)	5,83	4,78	4,52	4,26	4	3,8	3,8
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	1,17	1,07	1,05	1,02	1	0,8	0,8
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	69,95	72,56	73,16	73,76	74,36	74,89	74,89
7	Perkapita/Tahun	Ribu Rp	1.181.810	1.649.34 7,00	1.766.23 1,00	1.883.11 6,00	2.000.00 0,00	2.200.000 ,00	2.200.000
8	Indeks Gini		0,296	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
9	LPE		6,93	0,54	7,69	7,85	8	8,2	8,2

9



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan								
1.1	Angka melek huruf (%)	(%)	99,8	100	100	100	100	100	100
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	79,65	90	92,5	95	97,5	100	100
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	114,87	116	117	118	119	120	120
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	85,40	101	100	100	100	100	100
1.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (%)	(%)	81,97	97	98	99	100	100	100
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	99,42	100	100	100	100	100	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	80,31	84,78	88,34	92,56	94,78	99,12	100
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	(%)	53,09	54,5	55	57,5	60	65	65



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
1.5	SD/MI								
1.5.1	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts		1:12	1:12	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	110,67	108	106	104	102	100	100
1.5.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		133	0,131944 444	0,128472 222	1:120	1:115	0,118055 556	0,118055 556
1.6	SMP/MTs								
1.6.1	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		1:12	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11
1.6.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	102,54	102	101,5	101	100,5	100	100
1.6.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		NA	1:130	1:125	1:125	1:120	1:120	1:120
1.7	Pendidikan Menengah								
1.7.1	Rasio siswa terhadap guru		15	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
1.7.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	NA	55	60	65,00	70,00	75	75
1.7.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		NA	50	55	60	70	80	80

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
1.8	Fasilitas Pendidikan								
1.8.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	20,13	27,5	30	32,5	35	40	40
1.8.2	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	25,48	35	40	45	50	60	60
1.8.3	Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	30,49	40	45	50	60	70	70
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah		11,75	12,41	12,57	12,72	12,87	13	13
1.10	Rata-rata Lama Sekolah		8,96	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406	10,406
1.11.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	80,31	83,00	84,00	85,00	86,00	88	88
1.11.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	92,17	94,00	95,00	96,00	97,00	98	98
1.11.3	Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	98,62	98,5	98,75	99,00	99,25	99,5	99,5
1.12	Angka Kelulusan								
1.12.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	98,06	100	100	100	100	100	100
1.12.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	96,81	100	100	100	100	100	100

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
1.123	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(%)	NA	100	100	100	100	100	100
1.12.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	88,08	100	100	100	100	100	100
1.12.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(%)	NA	100	100	100	100	100	100
2 Kesehatan									
2.1	Angka Kelangsungan hidup Bayi	(%)	93,79	95,32	96,28	97,24	98,19	99	99
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,15	70,91	71,09	71,28	71,46	72,17	72,17
2.3	Angka Gizi Buruk (%)	(%)	3	1	1	1	0	0	0
2.4	Angka kematian ibu	per 100 KLH	103	96,84	94,87	92,94	91,05	90	90
2.5	Angka Kematian Bayi	per 100 KLH	8	5	4	3	2	1	1
2.6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	102	105	110	115	125	135	145
2.7	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	80	84	86	88	90	92	92

9



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
2.9	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	98	98	98,5	98,5	99	99,5	99,5
2.10	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D	Type D
2.11	Cakupan Desa Siaga Aktif		17	47	47	47	47	47	47
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
3.2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	20	20	20	20	20	20	20
3.3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,45	7,492	7,506	7,52	7,534	7,55	7,55
3.4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	25,04	37,75	42,17	46,58	50,99	55,00	55,00
3.5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	78	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
3.6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	39	55,60	60,00	64,40	68,80	72,50	72,50
3.7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	10,63	23,37	25,91	28,45	30,99	33,50	33,50
3.8	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	12,21	20	25	30	35	40	40

q



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
3.9	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	23,33	33,65	36,47	39,30	42,12	45,00	45,00
3.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	6,909	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500	7.500
3.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
3.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	25,04	27	28	29	30	31	31
3.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	4,40	6	7	8,5	10	11,5	11,5
3.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	3	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
3.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	3	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa
3.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	12,42	20	25	30	35	40	40
3.17	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	(%)	NA	55	60	65	70	75	75
3.18	Rasio elektrifikasi		56,36 (2013)	77,19		82,4	85	88	88

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
4	Perumahan dan Pemukiman								
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	14.844	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	39	51	55	57	60	63	63
4.3	Rumah Layak Huni (unit)	(%)	26,241	39.274	42.052	44.831	47.610	50.000	50.000
4.4	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	23,33	27,50	30,00	32,50	35,00	37,5	37,5
4.5	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0,81	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.6	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0,98	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
4.7	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	15	15	15	15	15	15	15
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum								
5.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	NA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
5.2	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan	NA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
6	Sosial								
6.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	44,95%	58,12%	68,45	78,34%	88,91%	100%	100%
6.2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)	0,86	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar								
1	Ketenagakerjaan								
1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	75,76	90	90,00	90,00	90,00	90	90
1.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	2,19	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03	1,03
1.3	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.390	1.402	1.407	1.413	1.418	1.425	1.425
1.4	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92

2



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	NA	15,00	16,00	16,00	17,00	17	17
2.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)	NA	22,50	25,00	27,50	30,00	32,5	32,5
2.3	Rasio KDRT	kasus	2	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
2.4	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	(%)	NA	100	100	100	100	100	100
2.5	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		79,98 (2015)	83,33	83,88	84,44	85	85,85	85,85
2.6	IPG		92,00 (2015)	94	94	94,67	95	95	95
3	Ketahanan Pangan								
3.1	Regulasi Ketahanan Pangan (Peraturan Bupati/ Keputusan Bupati)	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1

✗



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
4	Pertanahan								
4.1	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	sertifikat	57,14	65	70	73,5	77	80	80
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	2	2	2	2	2	2	2
5.2	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	10	11	12	13	14	15	16
5.3	Pencemaran status mutu air	(%)	49,17	32,50	31,90	31,02	30,14	30,00	30,00
5.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	79	85,00	87,50	90,00	92,50	95	95
5.5	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	(%)	73,3	80,00	85,00	90,00	95,00	100	100
5.7	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	82,84	85	87	89	91	92	94
5.8	Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)		NA	65	66	67	68	69	69



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
5.9	Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)		NA	93,25	93,5	94	94,5	95	95
5.10	Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)		NA	66,5	68	70	72,5	73,225	73,225
6	Kependudukan dan Catatan Sipil								
6.2	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Jumlah Desa yang terperbaharui Profil Desanya	desa/kel	114	114	114	114	114	114	114
7.2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	72	72	72	72	72	72	72
7.3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1	1
7.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	373	373	373	373	373	373	373

d



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
7.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	4	5	6	6	7	8	8
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
8.1	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,729	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
8.2	Rasio Akseptor KB	(%)	76,23	79,00	80,5	82,00	83,50	85	85
8.3	Cakupan Peserta KB Aktif	(%)	85,33	88,50	90,00	91,50	93,00	95	95
8.4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	18	18	20	20	22	22	22
8.5	Terpadunya program Kerja KB (program)	program	2	2	2	2	2	2	2
8.6	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	90	100	105	110	115	120	120
8.7	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	28	28	30	30	32	32	32
8.8	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	49	60	65	70	75	80	80
8.9	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	60	60	62	62	64	65	65

d



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
8.10	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	NA	100	100	100	100	100	100
8.11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	NA	25	27	27	29	29	29
8.12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	NA	1	1	1	1	1	1
8.13	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	NA	2	2	2	2	2	2
8.14	Pengembangan Anak Usia Dini (Holistik Integratif) (Kelompok)		37	59	81	104	127	127	127
8.15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	(%)	1,86	1,81	1,76	1,71	1,66	1,63	1,63
8.16	Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (%)	(%)	67	62	57	52	42	36	36
8.17	Total Fertility Rate (TFR) (%)	(%)	2,83	2,79	2,76	2,73	2,72	2,71	2,71

df



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
8.18	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)	(%)	68,78	69,30	70,50	71,50	72,50	73,00	73,00
8.19	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	(%)	11,75	12,79	13,68	14,44	15,09	15,69	15,69
8.20	Usia Kawin Pertama (UKP) (Usia)	usia	19	19	20	20	21	21	21
8.21	Peserta KB Baru (%)	(%)	2,459	2,359	2,259	2,259	2,159	2,059	2,059
8.22	Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)								
8.22.1	Tribina Keluarga :								
	1.Bina Keluarga Balita (BKB HI)		34	52	70	88	106	127	127
	2. Bina Keluarga Remaja (BKR)		11	35	59	83	107	127	127
	3. Bina Keluarga Lansia (BKL)		16	34	57	80	103	127	127
8.22.2	UPPKS		66	78	90	102	114	127	1127
8.22.3	Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)		34	39	44	49	54	68	68
8.23	Pembinaan Kampung KB Oleh Instansi Mitra (Desa)	desa	5	10	15	20	23	23	23

2



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
8.24	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	(%)	14,7	13,23	11,90	10,78	9,70	8,73	14,7
9	Perhubungan								
9.1	Jumlah Bandara (buah)	buah	1	1	1	1	1	1	1
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1	Website milik pemerintah daerah (buah)	buah	33	33	33	33	33	33	33
10.2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	unit	54	60	62	64	66	68	68
10.3	Jumlah Radio/TV lokal	unit	1	1	1	1	1	1	1
10.4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	(%)	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6	6	6	6	6	6	6
10.6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	2	2	2	2	2	2	2
10.7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	9	9	9	9	9	9	9

d



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
10.8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7	7	7	7	7	7	7
10.9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14	14	14	14	14	14	14
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	2	2	2	2	2	2	2
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	624	624	624	624	624	624	624
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI	unit	0	0	0	0	0	0	0
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	24	24	24	24	24	24	24
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	2	2	2	2	2	2	2
10.15	Pameran / expo	pameran	1	1	1	1	1	1	1
10.16	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	85,8	87	88,00	89,00	90,00	91	91

2



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
10.17	Buletin/Majalah/Brosur/Ta bloid/Koran Lokal	unit	14	14	15	15	15	5	5
10.18	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	17	17	18	18	19	20	20
10.19	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)	49,16%	52	54	56	58	60	60
11 Koperasi dan UMKM									
11.1	Koperasi Aktif (%)	(%)	52%	65	69	73	77	80	80
11.2	Jumlah UMKM	unit	2.943	2.985	2.999	3.013	3.027	3.050	3.050
11.3	Jumlah Industri	industri	257	325	350	375	400	425	425
11.4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kelur ahan	3	4	4	4	4	4	4
11.5	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	(%)	27%	36%	39%	42%	45%	47,50%	47,50%
11.6	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	(%)	63,40%	67,5	70	72	73,5	75	75
12 Penanaman Modal									
12.1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	42	55	60	65	70	75	75

d



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
12.2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12.3	Lamanya hari proses perizinan	hari	10	9	9	8	8	7	7
12.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	79,06	83,00	85,00	87,00	88,50	90	90
12.5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	100%	100	100	100	100	100	100
12.6	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	4,8 T	5,2	5,4	5,6	5,8	6	6
12.7	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi		NA	15	20	25	30	35	35
13	Pemuda dan Olahraga								
13.1	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	1	2	2	3	3	3	3
13.2	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	1	1	1	2	2	2	2
14	Statistik								
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
15	Kebudayaan								
15.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	1	3	4	4	5	5	5
15.2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1	1	1	1	1	1	1
15.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	25	25	25	25	25	25	25
15.4	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26	26	26	26	26	26	26
15.5	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1	1
15.6	Jumlah penghargaan kebudayaan	buah	NA	3	4	4	4	5	5

4.



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
16	Perpustakaan								
16.1	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1	1	1	1	1	1	1
16.1.1	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40	40	40	40	40	40	40
16.1.2	Jumlah perpustakaan sekolah :								
16.1.2.1	-. SD/MI	buah	166	166	166	166	166	166	166
16.1.2.2	-. SMP/MTs	buah	56	56	56	56	56	56	56
16.1.2.3	-. SMA/MA	buah	13	13	13	13	13	13	13
16.1.3	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	50	50	52	52	54	54	54
16.1.4	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	0	1	2	2	2	2	2
16.2	Jumlah anggota	buah	1.478	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
16.3	Jumah pengunjung	buah	4.028	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.500
16.4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	30.130	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000

9



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
17	Kearsipan								
17.1	Pengelolaan arsip secara baku :								
17.1.1	a. Umum	buah	98	110	115	120	125	130	130
17.1.2	b. Pemerintahan	buah	100	110	115	120	125	130	130
17.1.3	c. Politik	buah	60	75	80	85	90	95	95
17.1.4	d. Keamanan dan ketertiban	buah	60	75	80	85	90	95	95
17.1.5	e. Kesejahteraan rakyat	buah	50	65	70	75	80	85	85
17.1.6	f. Perekonomian	buah	73	85	90	95	100	105	105
17.1.7	g. Pekerjaaan umum	buah	86	95	100	105	110	115	115
17.1.8	h. Pengawasan	buah	89	105	110	115	120	125	125
17.1.9	i. Kepegawaian	buah	92	105	110	115	120	125	125
17.1.10	j. Keuangan	buah	120	125	130	135	140	145	145

9



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
C	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata								
1.1	Kunjungan Wisata	jiwa	24.948	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
1.2	Jumlah objek wisata daerah	buah	27	27	28	28	29	29	29
1.3	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	25%	14,5	15,5	17,0	18,5	20	20
1.4	PDRB Sektor Pariwisata	(Milyar Rp)	NA	30	35	42,5	50	55	55
2	Pertanian								
2.1	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	NA	33,50	34,00	34,50	35,00	36	36
2.2	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(Milyar Rp)	1.526,09	1.982,68	2.100,80	2.218,92	2.337,04	2.570,74	2.570,74
3	Kehutanan								
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	HA	18,270	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	25.000
3.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	juta Rp	40,065,65 0,002	42.500	43.000	43.500	44.250	45.000	45.000



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH									
	Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
3.3	Km	75	80	85	90	95	100	100	
3.4	Ha	2,000	2.750	3.000	3.250	3.500	4.000	4.000	
3.5	unit	-	1	1	1	1	1	1	
3.6	unit	0	1	1	1	1	1	1	
3.7	unit	0	1	1	1	1	1	1	
3.8	unit	1	1	1	1	1	1	1	
3.9	HA	12	12	12	12	12	12	12	
5	Perdagangan								
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,50	10,50	11,00	11,50	12,00	12,5	12,5	

8



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
8	Transmigrasi								
8.1	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22
9	Penanggulangan Bencana								
9.1	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	4	4	4	5	5	5	5
9.2	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100	100	100	100	100	100	100
D	Urusan Penunjang								
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

8



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan turunannya	(%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan								
2.1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Indeks Persepsi Korupsi		NA	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,6
3	Reformasi Birokrasi								
3.2	Nilai Reformasi Birokrasi		NA	62,5	63	64	65	66	66
3.3	Nilai Sakip								



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
3.4	Level Kapabilitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.5	Level Maturitas		Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.6	IKM		79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
3.7	Predikat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	A	A	A	A
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.224.307	1.240.309	1.275.697	1.311.084	1.346.472	1.381.860	1.381.860
1.2	Nilai Tukar Petani								
1.3	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	591.814	532.256	554.920	577.583	600.247	622.911	622.911
2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur								
2.2	Luas wilayah produktif	HA	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000

4



FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
3	Fokus Iklim berinvestasi								
3.1	lama proses perijinan	hari	10	9	8	8	7	7	7
4	Fokus Sumber Daya Manusia								
4.2	Rasio ketergantungan	(%)	52,12	51,50	51,00	50,50	50,00	50	50

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

9



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
3	dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis; Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	SMP/MTs	68,97	78,00	85,00	93,00	100,00	100,00
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD/MI SMP/MTs	67,37 63,36	72,89 74,90	78,98 83,12	86,45 89,53	97,37 96,24	100,00 100,00



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	79,10	82,19	88,67	95,89	100,00	100,00
		MI	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP/MTs	50,86	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	88,98	90,56	92,67	95,12	98,5	100,00
		MI	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

d



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	66,29	72,17	84,39	91,45	96,29	100,00
		MTs	75,00	84,39	91,45	96,29	100,00	100,00
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn	SMP	55,17	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00

4



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	68,79	72,17	84,39	91,45	96,29	100,00
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	69,83	72,17	84,39	91,45	96,29	100,00
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD/MI	81,54	83,12	89,53	96,24	100,00	100,00

af



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	SD/MI	50	60,00	70,00	80,00	90,00	100
		SMP/MTs	50	60,00	70,00	80,00	90,00	100
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD/MI	96,61	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	94,83	100	100	100	100	100
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,	SD/MI	80,57	84,39	91,45	96,29	100,00	100,00



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
	IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik							
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SMP/MTs	82,63	86,39	91,45	98,29	100,00	100,00
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	SD	93,22	98,23	100	100	100	100



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	SD/MI	93,22	98,23	100	100	100	100
		SMP/MTs	77,59	82,63	86,39	91,45	98,29	100,00
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	SD	97,31	100	100	100	100	100
		MI	97,31	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	86,21	91,45	98,29	100,00	100	100
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan	SD/MI dan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
		SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
	pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu							
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD/MI dan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
		SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100

4



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
		SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
		SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100

2



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	SD/MI dan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
		SD/MI	100	100	100	100	100	100
		SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memiliki Laporan tahunan	100	100	100	100	100	100
		Memiliki rencana kerja tahunan	100	100	100	100	100	100

2



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal	Target				
				2020	2021	2022	2022	2024
		Memiliki Komite Sekolah	100	100	100	100	100	100

Handwritten signature



Tabel 8.4
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan								
NO	BIDANG URUSAN /INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target				
			2018	2020	2021	2022	2023	2024
URUSAN KESEHATAN								
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	90,12	100	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	85,57	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	97,93	100	100	100	100	100
4	Persentase anak usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	84,64	100	100	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	92,89	100	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target				
			2018	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	4,49	10,89	26,90	38,67	46,12	55
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	24,32	100	100	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	27,79	38,67	46,12	55	74,34	85,00
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	19,92	22,89	26,90	38,67	46,12	55
10	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100

4



NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target				
			2018	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Persen	64,43	69,00	79,00	89,00	99,0	100
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	28,36	38,67	46,12	55	74,34	85,00

4



Tabel 8.5
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial

No	Uraian SPM	Indikator	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	25,85%	45%	65%	85%	95%	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	25,85%	45%	65%	85%	95%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	23,75%	38,12%	45%	55%	65%	85%
4	Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten	Presentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah menerima Bantuan Sosial	44,95%	58,12%	68,45	78,34%	88,91%	100%

g



No	Uraian SPM	Indikator	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial skala Kabupaten	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	85,50%	95,50%	100%	100%	100%	100%

Tabel 8.6

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Standar Pelayanan Minimal	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Minum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	40%	55%	65%	75%	85%	100%
2	Sanitasi	Penyediaan pelayanan pengelola air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	39%	45%	55%	65%	75%	85%
3	Perumahan Rakyat	Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	60%	75%	85%	95%	100%	100%

g



Tabel 8.7
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana

INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah masyarakat / relawan yang mendapat pelatihan	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat pelatihan	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penilaian dan pendataan kerusakan akibat bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah korban yang dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%

g



Tabel 8.8
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penegakan Perda dan peraturan Bupati	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat	Persen	NA	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 8.9
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran	%	NA	100	100	100	100	100
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	NA	100	100	100	100	100
	b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk	%	NA	100	100	100	100	100
2	Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM	%	NA	100	100	100	100	100
	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	NA	100	100	100	100	100



BAB IX

PENUTUP

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ini penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPJMD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Gunung Mas yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunung Mas, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2024 hingga terpilihnya Kepala Daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Pemerintahan Daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.



Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, menyusun dokumen:

a. RPJMD Teknokratik

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, menyatakan bahwa pemungutan suara serentak Nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tahun 2024 tepat pada saat selesainya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah. Dengan ini penyusunan RPJMD teknokratik dilakukan dengan pendekatan teknokratis dengan berpedoman pada RPJPD, hasil analisa capaian kinerja RPJMD periode lalu (2019-2024), RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMN, untuk keselarasan kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Kemudian RPJMD teknokratik ini selanjutnya bisa dijadikan acuan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum serentak Bulan November 2024. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2019-2024), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. RPJMD teknokratik ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.



b. RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD tahun 2025 disusun mengacu pada RPJMD Teknokratik periode 2025-2030. Diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD tahun 2025 selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD tahun 2025-2030. RKPD sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS tahun 2025 serta APBD tahun anggaran 2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2020 hingga 2024.
4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mastahun 2019-2024, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib menyebarluaskan Perda tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas di masa yang akan datang.

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mastahun 2019-2024, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib menyebarluaskan Perda tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas di masa yang akan datang.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG